

LAPORAN

STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2007



Diterbitkan : Desember 2007

Data : Oktober 2006 – Oktober 2007



**BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Alamat :

Jalan MT. Haryono (Rawa Indah) Samarinda 75124

Telp. (0541) 760304 Fax. (0541) 760306

E-Mail : bpdl-ktm@smd.mega.net.id

Web : <http://www.kaltim.net/bapedalda>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas ijin dan perkenan Nya Laporan Status Lingkungan Hidup daerah (SLHD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007 dapat diselesaikan dengan baik dan lancer.

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah merupakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang menjamin adanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup secara berlanjut. Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dapat dilakukan saling bertautan dengan upaya-upaya pengelolaan lainnya yaitu penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian.

Tujuan disusunnya Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang upaya-upaya pemeliharaan lingkungan di daerah. Konsep yang tertuang di dalamnya dapat merupakan arahan dan dasar pemikiran yang perlu dilengkapi dengan inisiatif dan kreatifitas daerah untuk dapat mengembangkan lebih jauh sesuai dengan kondisi dan situasi daerahnya. Inisiatif dan kreatifitas tersebut sangat penting sebagai bentuk nyata dari perwujudan kewenangan otonomi daerah. Lebih jauh lagi Kabupaten dan Kota dapat merumuskan suatu kebijakan pengelolaan lingkungan yang lebih spesifik dan konsep ini dapat merupakan salah satu alternative pemeliharaan lingkungan yang dapat dikembangkan di daerahnya masing-masing.

Kami sadari dengan segala kelebihan dan kekurangannya Laporan SLHD ini telah selesai disusun, namun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran maupun kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Samarinda, Desember 2007

Plt. Gubernur Kaltim,

Drs. Yurnalis Ngayoh, M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Isu dan Masalah Utama Lingkungan Hidup Tahun 2006	3
1.4. Visi dan Misi Provinsi Kalimantan Timur	4
1.5. Gambaran Umum	5
1.5.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah	5
1.5.2. Topografi	7
1.5.2.1. Tingkat Kemiringan	7
1.5.2.2. Kelas Ketinggian	8
1.5.2.3. Keadaan Iklim dan Suhu	8
1.5.3. Demografi	9
1.5.3.1. Keadaan Penduduk	9
1.5.3.2. ualitas Sumberdaya Manusia	10
1.5.3.3. Pendudk dan Kemiskinan	10
1.5.3.4. Penduduk dan Kesehatan	12
1.5.4. Kebijakan Pendanaan Lingkungan dan Sosial	14
1.5.5.	16
BAB II. ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA	19
BAB III. AIR	29
3.1. Kualitas Air Sungai Mahakam	29
3.2. Kualitas Air Limbah	37
3.2.1. Industri	37
3.2.2. Rumah Sakit	39
3.2.3. Hotel	42
3.3. Air Hujan	43
3.3.1. Curah Hujan	43
3.3.2. Jumlah Hari Hujan	45
BAB IV. UDARA	47
4.1. Kualitas Udara	47
4.1.1. Kualitas Udara Emisi PLTU	47
4.2. Kualitas Udara Ambien	48
4.2.1. Nitrogen Dioksida (NO ₂)	48

	Halaman
4.2.2. Sulfur Dioksida (SO ₂)	49
4.2.3. Kualitas Udara Ambien Beberapa Lokasi Pemantauan	50
4.2.4. Kualitas Udara Ambien Beberapa Parameter di Kota Samarinda	53
4.2.5. Banyaknya Kendaraan Menurut Jenisnya di Kaltim	55
BAB V. LAHAN DAN HUTAN	56
5.1. Hutan	56
5.1.1. Luas Penguasaan Hutan Oleh HPH Tahun 2006	58
5.1.2. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Tahun 2006	59
5.1.3. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Transmigrasi Tahun 2006	60
5.1.4. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Pertukangan Tahun 2006	61
5.1.5. Luas Hutan Menurut Fungsi	62
5.1.6. Luas Konversi Hutan	63
5.1.7. Luas Kerusakan Hutan	64
5.1.8. Luas Kebakaran dan Lahan	65
5.1.9. Rekapitulasi Penggunaan Lahan	66
5.2. Lahan	66
5.2.1. Luas Lahan Kritis	68
5.2.2. Rencana Reboisasi	69
5.2.3. Rencana Pebghijauan	70
5.2.4. Luas Areal Perkebunan	71
5.2.5. Luas Areal Perkebunan Mulai Tahun 2002 Sampai Tahun 2006	72
5.2.6. Luas Areal Perkebunan Rakyat	73
5.2.7. Luas Areal Perkebunan Rakyat Sejak Tahun 2002 – Tahun 2006	74
5.2.8. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta	75
5.2.9. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta	76
5.2.10. Luas Areal Perkebunan Negara	76
5.2.10.1. Komoditi Karet dan Kelapa Sawit	76
5.2.10.2. Luas Areal dan Produksi	77
5.2.11. Pengelolaan Lingkungan Hidup	78
5.2.11.1. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari APBD dan APBN	78
5.2.11.2. Total Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari APBD dan APBN	79
5.2.11.3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Diterima 13 Kabupaten/Kota	79
5.2.11.4. DAK Lingkungan Hidup	80
5.3. Mangrove	81
5.3.1. Luas Tutupan Mangrove	81
5.3.2. Kerapatan Mangrove	82

	Halaman
BAB VI. KEANEKARAGAMAN HAYATI	85
BAB VII. PESISIR DAN LAUT	89
BAB VIII. AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	95
8.1. Isu Lingkungan Hidup Utama : Deforestasi Lahan dan Hutan.	95
8.1.1. Sektor Kehutanan (Degradasi Vegetasi)	95
8.1.2. Sektor Pertambangan Batubara	96
8.1.3. Sektor Perkebunan	96
8.2. Air.....	96
8.2.1. Air Sungai Mahakam	96
8.2.2. Air Bersih	97
8.3. Udara	98
8.3.1. Kualitas Udara Ambien	98
8.3.2. Emisi Gas Buang (Sumber : Tidak Bergerak)	98
8.3.3. Emisi Gas Buang (Sumber : Bergerak)	99
8.4. Lahan dan Hutan	99
8.4.1. Lahan	99
8.4.2. Hutan	100
8.4.3. Reboisasi dan Penghijauan	100
8.5. Keanekaragaman Hayati	101
8.6. Pesisir dan Laut	101
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004	6
2.	Luas Masing-Masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan	8
3.	Penyebaran dan Luas Masing-Masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan	8
4.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003 s/d 2004.....	9
5.	Jumlah Penduduk di Atas Usia 5 Tahun dan Tingkat Pendidikan Tertinggi per-Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kalimantan Timur	10
6.	Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kaltim Tahun 2000 s/d 2005	11
7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 s/d 2005	11
8.	Distribusi Persentase Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Tingkat Kemiskinan Tahun 2005	12
9.	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2001 s/d 2004	13
10.	Derajat Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Per-Kabupaten/Kota Tahun 2002	13
11.	Inventarisasi Anggaran Pembangunan (APBN/PHLN) Provinsi Kalimantan Timur Mulai Tahun 2001 s/d 2005 yang Berbasis pada Lingkungan dan Sosial	14
12.	Realisasi Penyaluran Dana PKPS-BBM dalam Wilayah Bayar KPPPN Samarinda Tahun 2005	15
13.	Rincian Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin yang Telah Disalurkan secara Langsung Melalui Kantor Pos Indonesia (Persero) Tahun 2005.....	16

Nomor		Halaman
14.	Penerimaan Dana Penunjang Kabupaten/Kota Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PKPS-BBM Bidang Kesehatan) Tahun Anggaran 2005	17
15.	Rekapitulasi Luas Hutan dan Lahan yang Telah Direhabilitasi dengan Menggunakan Dana DAK-DR Periode Tahun 2001 s/d 2004	17
16.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2007 yang Diterima 13 Kabupaten/Kota (x 1.000)	18
17.	Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan Sejak Tahun 2002-2006 di Kalimantan Timur	19
18.	Produksi Kayu Bulat pada Tahun 2004 S/D 2006 Dalam Wilayah Kalimantan Timur (dalam m ³)	20
19.	Luas Lahan Kritis Berdasarkan Kelas Kekritisian per-Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur ..	21
20.	Jumlah Kasus dan Jumlah Tersangka Illegal Logging dan Illegal Mining di Kalimantan Timur Tahun 2006	22
21.	Jumlah Pertambangan Batubara Menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Sampai Dengan Tahun 2007	22
22.	Perbandingan Luas Lahan Reklamasi Terhadap Luas Lahan Terganggu dari Kegiatan Perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur	23
23.	Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2006	24
24.	Uji <i>Check List</i> Kejadian Kerusakan Hutan dan Lahan di Kaltim Terhadap Kriteria Isu Lingkungan Hidup Utama	25
25.	Kualitas Fisik Air Sungai Mahakam Tahun 2007 di Beberapa Lokasi Pemantauan	29
26.	Kualitas Kimia Air Sungai Mahakam Tahun 2007 di Beberapa Lokasi Pemantauan	33

Nomor		Halaman
27.	Kualitas Limbah Cair PT. Sumalindo Jaya Tbk Loa Janan Tahun 2007	37
28.	Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Tahun 2007	39
29.	Kualitas Limbah Cair Beberapa Rumah Sakit di Kaltim Tahun 2006	40
30.	Kualitas Limbah Cair Hotel Mesra Internasional Samarinda Tahun 2007	42
31.	Curah Hujan Menurut Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika pad 5 (lima) Kabupaten (mm/thn)	43
32.	Jumlah Hujan Menurut Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika pad 5 (lima) Kabupaten	45
33.	Kualitas Udara Emisi PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta ..	47
34.	Kualitas Udara Ambien Parameter NO ₂ pada Beberapa Kawasan	48
35.	Kualitas Udara Ambien Parameter SO ₂ pada Beberapa Kawasan	49
36.	Kualitas Udara Ambien pada Beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2007	50
37.	Kualitas Udara Ambien di Kota Samarinda Tahun 2007	53
38.	Taman-Taman Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Tahun 2004 dan 2006	55
39.	Luas Pengusahaan Hutan Oleh HPH pada 8 (delapan) Kabupaten Provinsi Kaltim Sampai Tahun 2006	58
40.	Luas Pengusahaan Hutan Oleh HTI di Provinsi Kaltim Tahun 2006	59
41.	Luas Pengusahaan Hutan Oleh HTI di Provinsi Kaltim Tahun 2006	60
42.	Luas Hutan Menurut Fungsi Status	62

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor		Halaman
43.	Luas Konversi Hutan Tahun 2004	63
44.	Luas Kerusakan Hutan Tahun 2006	64
45.	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2001 – 2006	65
46.	Luas Penggunaan Hutan dan Kebakaran Hutan Sampai Tahun 2006	66
47.	Luas Lahan Kritis pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2004	68
48.	Luas Rencana dan Realisasi Lahan Penghijauan pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006	69
50.	Luas Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi pada 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006 (Ha)	70
51.	Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur	71
52.	Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2002 – 2006	72
53.	Luas Areal Perkebunan Rakyat di Kalimantan Timur Tahun 2006	73
54.	Luas Areal Perkebunan Rakyat di Kalimantan Timur Tahun 2002 – 2006	74
55.	Luas Areal Perkebunan Besar Swasta di Kalimantan Timur Tahun 2006	75
56.	Luas Areal Perkebunan Besar Swasta di Kalimantan Timur Tahun 2006	76
57.	Luas Areal Perkebunan Besar Negara dan Produksi di Kalimantan Timur Tahun 2006	76
58.	Luas Areal Perkebunan Besar Negara di Kalimantan Timur Tahun 2002 – 2006	77
59.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2005 – 2007	78
60.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2005 – 2007	79

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Nomor		Halaman
61.	Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2007 yang Diterima 13 Kabupaten/Kota (x 1.000)	79
62.	DAK Lingkungan Hidup Tahun 2006 – 2007 yang Diterima 13 Kabupaten/Kota	80
63.	Luas Tutupan Mangrove pada 10 Kabupaten/Kota Tahun 2006	81
64.	Kerapatan Mangrove pada 10 Kabupaten/Kota Tahun 2006 ..	82
65.	Luas Hutan Mangrove dan Lua Tambak pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	83
66.	Keanekaragaman Jenis Tumbuhan Tahun 2004 dan 2006	85
67.	Sebaran Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur Tahun 2005	87
68.	Sebaran Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur Tahun 2006	87
69.	Kualitas Air Laut di Kota Tarakan Bulan Agustus 2006	89
70.	Kualitas Air Laut di Kota Balikpapan Tahun 2005 dan 2006 ...	90
71.	Kualitas Air Laut di Kabupaten Berau Tahun 2006	91

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud apabila ketersediaan sumber daya alam pendukungnya terus tersedia secara kualitas dan kuantitas. Oleh karena itu keadaan, kualitas dan kuantitas (status) sumberdaya alam yang “tersisa” saat ini harus diketahui, direkam, didokumentasikan setiap kurun waktu tertentu (pilihan bisa 6 bulan dan/atau 1 tahun) untuk disebarluaskan, diinformasikan ke *stakeholder* (pemangku kepentingan) sebagai titik acuan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut di masa-masa selanjutnya secara transparan dan bertanggung jawab. Dampak dari pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang “tidak bertanggung jawab” oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah menimbulkan berbagai beban pada lingkungan yang akan menjadi masalah, seperti: pencemaran air, udara, tanah, pengurangan keanekaragaman hayati, lahan kritis, kebakaran hutan, timbulnya sampah, limbah dan permasalahan lainnya. Juga terjadi keterbatasan, ketidakadilan dan kekurangan merataan hak rakyat untuk mengakses sumber daya alam.

Implikasi dari dokumentasi status sumberdaya alam, akan berpengaruh pada kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Gambaran-gambaran status sumberdaya alam yang mengalami kemerosotan/ kerusakan, mulai dari yang kecil sampai yang dahsyat (menuju kerusakan permanen) menimbulkan kebijakan pengelolaan penanggulangan, penanganan, perbaikan dan stabilisasi pada sisi lain mencari alternatif substitusinya. Gambaran-gambaran status sumberdaya alam yang masih baik menimbulkan kebijakan pemanfaatan yang rasional dan bertanggung jawab. Sehingga sumberdaya alam yang ada dapat dimanfaatkan dalam rentang waktu lama, semakin lama sumberdaya itu mendukung pembangunan dan semakin panjang kesempatan mensejahterakan manusia Indonesia.

Upaya untuk menanggulangi masalah-masalah lingkungan perlu dicermati dengan suatu kebijakan yang dapat menyentuh dan mengatasi suatu masalah lingkungan. Suatu kebijakan yang sudah diambil akan tepat sasaran dalam implementasinya apabila adanya informasi yang jelas dan akurat. Kebijakan menurut Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kabupaten/Kota mempunyai wewenang penuh mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang dimilikinya secara bertanggung jawab.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah merupakan salah satu bentuk Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi Otonomi Daerah tersebut dikonstruksikan dalam sistem Negara Kesatuan, maka dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu disusun sebuah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Propinsi Kalimantan Timur.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini merupakan data dan informasi dalam pengambilan keputusan yang menggarisbawahi pentingnya kemampuan pemerintah baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional untuk mengumpulkan dan memanfaatkan informasi multisektoral dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi segala aspek lingkungan hidup bagi pengambilan keputusan dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah (Pusat dan Daerah) wajib melaksanakan penyusunan laporan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan menyebarkan kepada masyarakat. Bagi daerah hal ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 152 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, yaitu pada ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2007 memberikan gambaran umum tentang adanya kondisi fisik Sumber Daya Alam (SDA), Sumber daya Buatan (SDB) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) ini dimaksudkan sebagai akuntabilitas publik, informasi akurat, pengawasan, dan keterlibatan publik

dalam menentukan kebijaksanaan pengelolaan di bidang lingkungan hidup. Sedangkan tujuan disusunnya Laporan SLHD ini adalah :

- a. Menyediakan data, informasi dan dokumentasi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada semua tingkat dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah;
- b. Meningkatkan mutu informasi tentang lingkungan hidup sebagai bagian dari sistem pelaporan publik serta sebagai bentuk dari akuntabilitas publik;
- c. Menyediakan sumber informasi utama bagi perencanaan dan program pembangunan tahunan di daerah serta untuk kepentingan penanaman modal (investor), peningkatan peran serta publik dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

1.3. Isu dan Masalah Utama Lingkungan Hidup Tahun 2006

Masalah lingkungan hidup yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di Kalimantan Timur pada dasarnya menuntut perhatian seluruh pelaku pembangunan yakni pemerintah, masyarakat, LSM dan pihak swasta, agar masalahnya tidak menjadi semakin besar dan lebih kompleks. Permasalahan lingkungan hidup di Propinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Deforestasi hutan dan lahan besar-besaran
- Pemahaman tentang arti dan makna lingkungan hidup yang masih terbatas di kalangan masyarakat;
- Kemiskinan dan rendahnya teknologi “kesejahteraan” yang berbasis sumberdaya alam;
- Lemahnya komitmen dan tanggung jawab pemerintah berjalan (berkesinambungan) dalam menjaga sumberdaya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan sebagai akibat dari kebijakan pemanfaatan yang dibuat;
- Terbatasnya data dan pelaksanaan, evaluasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah;
- Munculnya konflik-konflik sosial antara masyarakat dengan kalangan pengusaha, yang dipicu oleh masih kurang perdulinya sebagian pengusaha kepada masyarakat;
- Kasus-kasus lingkungan sering muncul baik berupa pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan maupun masalah-masalah lain;

- Belum dimanfaatkannya secara optimal informasi-informasi yang tertuang di dalam RTRW, AMDAL, NKLD, NSDA dan lain-lain dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
- Masih minimnya dana untuk pembangunan Bidang Lingkungan Hidup, ditambah dengan diserahkannya beberapa tugas/kewenangan yang tidak dibarengi dengan penyerahan dana;
- Pembajakan SDA dan kesenjangan sosial dan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

1.4. Visi dan Misi Provinsi/Kabupaten/Kota

Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

VISI :

PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT KALIMANTAN TIMUR SEJAHTERA.

MISI :

1. Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat sehingga cerdas, berdisiplin, memiliki etos kerja yang tinggi dan terampil.
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menyediakan jaringan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.
3. Membina pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat Kaltim, sehingga beriman, taat beribadah, berakhlak mulia dan terwujud toleransi antar umat beragama.
4. Melakukan regulasi yang menjamin kemudahan berusaha dan berinvestasi sehingga terbuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya.
5. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dengan memberikan perlindungan dan jaminan sosial terutama bagi masyarakat miskin.
6. Membangun fasilitas umum dan infrastruktur yang berkualitas & merata.

7. Memfasilitasi petani dan nelayan sebagai pelaku utama agribisnis untuk memperoleh kemudahan dalam meningkatkan produksi, mengelola dan memasarkan hasil panen.
8. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis agribisnis dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berdaya tahan dan berwawasan lingkungan.
9. Menjaga agar pengelolaan sumberdaya alam dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan.
10. Memantapkan dan memanfaatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan keterpaduan dan keserasian pembangunan antar wilayah.
11. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, didukung oleh aparatur yang berwawasan luas, bermoral, penuh dedikasi dan bebas KKN.
12. Mengembangkan daya saing daerah dalam rangka mendukung Kaltim sebagai pusat perdagangan, jasa, industri dan agrobisnis terkemuka di wilayah timur Indonesia dan Asia Pasifik.
13. Menegakkan hukum agar terwujud kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
14. Melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin.
15. Mengembangkan dinamika pemuda dan olahraga.
16. Mewujudkan kehidupan dan pranata sosial yang berperadaban tinggi

1.5. Gambaran Umum

1.5.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam, dimana sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar di ekspor keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan daerah penghasil devisa utama bagi negara khususnya dari sektor pertambangan, kehutanan dan hasil lainnya.

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur terletak pada kedudukan 4° 24' Lintang Utara (LU) – 2° 25' Lintang Selatan (LS) dan 113° 44' Bujur Timur (BT) – 119° 00' Bujur Timur (BT). Wilayah perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi di bagian Laut Kalimantan Timur merupakan jalur alur laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) sehingga posisi Kalimantan Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Provinsi Kalimantan Timur terletak di bagian Timur Pulau Kalimantan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Malaysia (Negara Bagian Sabah)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia (Negara Bagian Serawak).

Luas Provinsi Kalimantan Timur adalah 245.237 Km², meliputi wilayah daratan seluas 200.395 Km² dan wilayah lautan sejauh 12 mil laut, dari garis pantai terluar ke arah laut seluas 44.842 Km². Wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 9 (sembilan) Kabupaten; yaitu : Kabupaten Nunukan, Malinau, Kutai Barat, Bulungan, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser serta memiliki 4 (empat) Kota; yaitu : Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang dan Tarakan.

Tabel di bawah ini menggambarkan luas wilayah daratan masing-masing Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2004

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Daratan (Ha)
1.	Kota Balikpapan	52.700
2.	Kabupaten Berau	2.124.000
3.	Kota Bontang	14.780
4.	Kabupaten Bulungan	1.558.790
5.	Kabupaten Kutai Kartanegara	2.611.690
6.	Kabupaten Kutai Barat	3.162.870
7.	Kabupaten Kutai Timur	3.429.260
8.	Kabupaten Malinau	4.199.040
9.	Kabupaten Nunukan	1.391.790

Tabel 1. Lanjutan

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Daratan (Ha)
10.	Kabupaten Pasir	1.077.640
11.	Kabupaten Penajam Paser Utara	313.560
12.	Kota Samarinda	78.300
13.	Kota Tarakan	25.080
	TOTAL	20.039.500

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

1.5.2. Topografi

1.5.2.1. Tingkat Kemiringan

Provinsi Kalimantan Timur didominasi topografi bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 m di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60%. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai di kawasan sepanjang sungai, sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 m di atas permukaan laut dengan kemiringan 30%, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia.

Dengan kondisi topografi seperti tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi. Berdasarkan data tahun 2004 luas kemiringan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

- Datar (0 - 2%) seluas 2.317.641 Ha
- Bergelombang (2 -15%) seluas 2.781.823 Ha
- Curam (16 - 40%) seluas 4.306.946 Ha
- Sangat Curam seluas 10.707.590 Ha

Dilihat dari topografi, sebagian besar atau 40,62% wilayah daratan Kalimantan Timur termasuk kemiringan 40 - 60% dan 52,60% terletak pada ketinggian 100 - 1000 m di atas permukaan laut, sehingga pemanfaatan lahan di daerah ini harus memperhatikan karakteristik lahan tersebut.

Tabel 2. Luas Masing-Masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan

No	Kelas Ketinggian (m)	Luas (Ha)	Persentase Ketinggian
1.	0-2	2.309.894	11,52
2.	2-8	2.203.843	11,00
3.	8-15	528.843	2,64
4.	15-25	3.129.635	15,62
5.	25-40	1.111.592	5,55
6.	40-60	3.222.376	41,03
	> 60	2.533.317	12,64

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur

1.5.2.2. Kelas Ketinggian

Sedangkan untuk penyebaran dan luas masing-masing kelas ketinggian wilayah daratan bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Penyebaran & Luas Masing-Masing Kelas Ketinggian Wilayah Daratan

No	Kelas Ketinggian (m)	Luas (Ha)	Persentase Ketinggian
1.	0-7	1.002.363	5,00
2.	7-25	1.702.308	8,50
3.	25-100	4.786.985	23,89
4.	100-500	5.316.156	26,53
5.	500-1000	5.235.021	26,12
6.	> 1000	1.996.667	9,96

Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur

1.5.2.3. Keadaan Iklim dan Suhu

Karakteristik iklim di Provinsi Kalimantan Timur termasuk iklim Tropika Humida dengan curah hujan 267,32 mm/tahun, dengan temperatur udara rata-rata 26°C dengan perbedaan temperatur siang dan malam antara 5°C dan 7°C. Temperatur minimum umumnya terjadi pada bulan Oktober sampai dengan Januari, sedangkan temperatur maksimum terjadi antara bulan Juli sampai dengan Agustus.

Kelembaban udara relatif tinggi dengan rata-rata 87,08% dengan kecepatan angin rata-rata 6,50 knot. Daerah beriklim seperti ini tidak mempunyai perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau, meskipun pada saat tertentu terjadi musim kemarau panjang seperti pada akhir tahun 1997. Pada musim angin barat hujan

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

turun sekitar bulan Agustus sampai bulan Maret, sedangkan pada musim angin timur relatif kurang biasanya terjadi sekitar bulan April sampai bulan September.

1.5.3. Demografi

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah 24.523.783 ha (1,5 X luas pulau Jawa dan Madura), yang terdiri dari daratan seluas 20.039.500 ha, dan laut seluas 4.484.283 ha.

1.5.3.1. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduknya pada tahun 2003 berjumlah 2.704.851 jiwa, pada tahun 2004 berjumlah 2.705.369 jiwa. Secara lengkap kepadatan dan keadaan penduduk Kalimantan Timur per-kabupaten/kota dituangkan pada tabel di bawah :

Tabel 4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/kota tahun 2003 s/d 2004.

No	Kabupaten/Kota	T A H U N			
		2003		2004	
		Jumlah	Kepadatan	Jumlah	Kepadatan
1.	Pasir	172.845	13,87	171.773	7,90
2.	Kutai Barat	142.136	4,54	147.468	4,66
3.	Kutai Kartanegara	480.499	16,58	485.375	17,00
4.	Kutai Timur	163.549	4,38	168.321	4,92
5.	Berau	133.386	3,91	140.731	4,13
6.	Malinau	46.694	1,11	47.258	1,19
7.	Bulungan	94.564	4,98	96.598	4,98
8.	Nunukan	104.112	6,14	106.915	7,17
9.	Penajam Paser Utara	113.659	34,10	118.219	32,41
10.	Balikpapan	428.819	494,50	431.113	558,44
11.	Samarinda	431.113	717,08	567.997	790,83
12.	Tarakan	567.997	225,64	152.299	226,75
13.	Bontang	116.302	227,65	116.302	273,21
JUMLAH/RATA-RATA		2.704.851*	11,03 [#]	2.705.369*	13,18 [#]

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur. 2006

Keterangan : * = jumlah, [#] = rata-rata

1.5.3.2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur dengan indikator pendidikan adalah sebagai berikut : 165.159 jiwa (6.104%) pernah sekolah SD, 465.124 jiwa (17.192%) tamat SD, 947.454 jiwa (35.021) tamat SLTP, 1.942.079 jiwa (71.786) tamat SLTA dan 205.247 (7.586%) tamat Diploma, akademi atau sarjana. Kualitas sumberdaya manusia Kalimantan Timur dengan indikator pendidikan per-kabupaten/kota seperti tertuang pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah penduduk di atas usia 5 tahun dan tingkat pendidikan tertinggi per-kabupaten/kota dalam wilayah Kalimantan Timur

No	Kab./Kota	Pernah Sekolah	Tamat SD	SLTP	SLTA	Diploma/Akademi/Sarjana	Jumlah
1.	Pasir	8.263	22.857	35.752	44.058	3.876	115.147
2.	Kutai Barat	11.569	14.798	31.597	41.686	1.586	101.236
3.	Kutai Kartanegara	13.376	38.837	100.799	172.462	10.522	325.996
4.	Kutai Timur	5.805	19.298	35.429	47.645	2.708	110.834
5.	Berau	6.628	18.519	27.316	40.996	4.807	98.226
6.	Malinau	2.145	6.748	11.155	9.935	1.569	31.820
7.	Bulungan	5.169	11.043	20.912	28.240	1.745	67.289
8.	Nunukan	4.078	15.563	17.684	31.864	1.846	71.063
9.	Penajam Paser Utara	6.994	13.927	26.276	31.864	1.706	80.761
10.	Balikpapan	5.308	22.705	52.046	191.876	30.430	302.366
11.	Samarinda	9.985	37.342	80.803	242.803	30.430	302.366
12.	Tarakan	2.373	7.801	27.609	62.493	6.015	105.292
13.	Bontang	83.466	235.686	480.076	996.157	108.007	1.903.372
Kalimantan Timur		165.159	465.124	947.454	1.942.079	205.247	
% dari jumlah penduduk		6.104	17.192	35.021	71.786	7.586	

1.5.3.3. Penduduk dan Kemiskinan

Adapun kualitas sumberdaya manusia dari aspek kesejahteraan yang diproyeksikan dalam Jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur berdasarkan data dasar dari pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005, adalah sebagai berikut : 330.147 jiwa (11,27% dari

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

jumlah penduduk) miskin. Data jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2000 s/d 2005, seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kaltim Tahun 2000 s/d 2005

No	Tahun	Uraian		
		Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Prosentase (%)
1.	2000	2.411.066	532.751	21,80
2.	2001	2.494.625	392.137	15,47
3.	2002	2.558.572	313.040	12,23
4.	2003	2.704.851	328.597	11,34
5.	2004	2.842.569	318.300	11,65
6.	2005	2.928.654	330.147	11,27

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur (2006)

Sedangkan untuk data jumlah penduduk berdasarkan Rumah Tangga Miskin Kalimantan Timur adalah : 168.565 rumah tangga. Data jumlah penduduk berdasarkan Rumah Tangga Miskin yang sesuai dengan data dari penyaluran beras miskin oleh pihak Badan Logistik Provinsi Kalimantan Timur per-kabupaten/kota tahun 2000 s/d 2005 adalah seperti pada tabel di bawah :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga Miskin Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2000 s/d 2005

No	Kabupaten/Kota	Rumah Tangga miskin untuk penyaluran Gakin	Persentase (%)
1.	Pasir	17.581	10,43
2.	Kutai Barat	10.697	6,35
3.	Kutai Kartanegara	34.888	20,70
4.	Kutai Timur	16.583	9,84
5.	Berau	9.906	5,86
6.	Malinau	7.556	4,48
7.	Bulungan	7.293	4,33
8.	Nunukan	9.009	5,34
9.	Penajam Paser Utara	10.925	6,48
10.	Balikpapan	8.184	4,86
11.	Samarinda	23.546	13,97
12.	Tarakan	5.810	3,45
13.	Bontang	6.587	3,91
	Kalimantan Timur	168.565	100,00

Sumber : Profil Pembangunan Kaltim, 2006

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Adapun distribusi persentase kecamatan menurut kabupaten/kota dan kategori tingkat kemiskinan di provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 8. Distribusi Persentase Kecamatan Menurut Kabupaten/kota dan Kategori Tingkat Kemiskinan Tahun 2005

No	Kabupaten/Kota	Pddk Miskin (%)	Jumlah Kecamatan	Tingkat Kemiskinan				Jumlah
				Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1.	Pasir	39,85	10	0.00	20.00	20.00	60.00	100.00
2.	Kutai Barat	28,44	21	4.76	33.33	38.10	23.81	100.00
3.	Kutai Kartanegara	28,02	18	0.00	42.86	22.22	34.92	100.00
4.	Kutai Timur	44,52	11	0.00	18.18	27.27	54.55	100.00
5.	Berau	29,59	13	7.69	7.69	30.77	53.86	100.00
6.	Malinau	53,26	9	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7.	Bulungan	29,84	13	0.00	38.46	15.39	46.15	100.00
8.	Nunukan	32,99	7	0.00	28.57	28.57	42.86	100.00
9.	Penajam Paser Utara	36,02	4	0.00	0.00	25.00	75.00	100.00
10.	Balikpapan	6,13	5	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
11.	Samarinda	17,03	6	50.00	33.33	16.67	0.00	100.00
12.	Tarakan	20,18	4	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00
13.	Bontang	20,82	3	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Kalimantan Timur		24,25	124	16.34	28.65	17.23	37.78	100.00

1.5.3.4. Penduduk dan Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia berdasarkan faktor kesehatan masyarakat menunjukkan kecenderungan membaik. Keadaan ini ditunjukkan dengan data pada indikator kesehatan "Angka Kematian Bayi" (AKB) dan "Angka Harapan Hidup" (AHH), pada tahun 2001 terjadi 36 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan umur harapan hidup mencapai 66 tahun, tahun 2004 menurun menjadi 33 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dan umur harapan hidup mencapai 69,9 tahun. Secara lebih rinci Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) kurun waktu dari tahun 2001 s/d 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 9. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Umur Harapan Hidup (UHH) Penduduk Kalimantan Timur Tahun 2001 s/d 2004

No.	Indikator	2001	2002	2003	2004
1.	Angka Kematian Bayi	36	34	34	33
2.	Umur Harapan Hidup	66	68,02	68,94	69,9

Sumber : Profil Pembangunan Kaltim, 2006

Salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah Umur Harapan Hidup dan Angka Kematian Bayi, selain Indikator Pendidikan dan Pendapatan Perkapita. Semakin tinggi Umur Harapan Hidup dan semakin kecilnya Angka Kematian Bayi, maka semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur pada tahun 2002 adalah sebesar 64,14. Derajat Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Per-kabupaten/kota diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 10. Derajat Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur Per-kabupaten/kota Tahun 2002

No.	Kabupaten	UHH	AKB	IPM
1.	Pasir	67,74	48	49,38
2.	Kutai Barat	68,01	44	57,25
3.	Kutai Kartanegara	68,00	46	62,13
4.	Kutai Timur	66,09	43	61,38
5.	Berau	65,24	47	67,83
6.	Malinau	67,22	44	56,56
7.	Bulungan	66,98	40	63,40
8.	Nunukan	70,24	31	65,15
9.	Penajam Paser Utara	-	-	-
10.	Balikpapan	71,05	23	70,69
11.	Samarinda	69,83	28	69,76
12.	Tarakan	70,92	24	72,69
13.	Bontang	69,31	26	88,61
Rata-rata Provinsi Kaltim		68,02	34	64,14

Sumber : Profil Pembangunan Kaltim, 2006

1.5.4. Kebijakan Pendanaan Lingkungan dan Sosial

Pelaksanaan Pembangunan Anggaran dan Belanja Negara (APBN/PHLN) dari tahun 2001 s/d 2005 setiap tahunnya mengalami perubahan, alokasi dana APBN Tahun Anggaran 2001 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2000 mengalami kenaikan 128,3%; Tahun Anggaran 2002 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2001 mengalami penurunan 16,8%; Tahun Anggaran 2003 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2002 mengalami kenaikan 48,06%; Tahun Anggaran 2004 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2003 mengalami penurunan 3,26%; Tahun Anggaran 2005 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2004 mengalami kenaikan 57,063%. Secara lengkap Anggaran dan Belanja Negara (APBN/PHLN) mulai tahun 2001 s/d 2005 dituangkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 11. Inventarisasi Anggaran Pembangunan (APBN/PHLN) Provinsi Kalimantan Timur mulai Tahun 2001 s/d 2005 yang berbasis pada Lingkungan dan Sosial

Instansi/Departemen	Tahun Anggaran (X Rp. 1.000.000)					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Pertanian	39.173,998	20.703,786	33.158,778	53.237,301	56.097,330	67.707,011
Energi Sumberdaya Mineral	2.438,689	35.078,091	20.163,957	41.325,285	10.427,922	21.500,506
Pendidikan Nasional	133.095,133	153.406,578	140.409,919	125.880,637	128.980,208	264.345,869
Kesehatan	12.156,273	14.313,334	17.065,600	50.254,561	74.504,369	67.154,348
Sosial	6.065,494	5.496,360	6.789,251	23.506,032	29.696,271	30.080,000
Kehutanan	3.648,159	5.011,721	11.106,404	13.107,563	5.882,014	36.102,895
Tenaga kerja dan Transmigrasi	18.783,991	16.254,831	15.485,411	45.232,264	36.306,104	31.379,718
Kelautan dan Periklanan	-	4.069,567	8.188,924	11.265,163	17.058,184	16.560,654
Pemberdayaan Perempuan	-	3.330,940	3.519,777	5.226,663	3.478,906	5.472,254
Koperasi dan UKM	1.415,779	1.731,129	6.070,546	11.037,829	5.464,683	13.900,281*

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur, 2006

Keterangan : * Gabungan Perindustrian, perdagangan dan Koperasi.

Dalam hal penanganan kemiskinan oleh program dari pemerintah pusat, Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak dalam wilayah bayar KPPN Samarinda tahun 2005 sebesar Rp.

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

107.678.395.000,00,- (Seratus Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah), yang tersealisasi penyalurannya berjumlah Rp. 84.292.314.565,00,- (Delapan Puluh Empat Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), masih tersisa dana sebesar Rp.714.731.085,00,- (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Secara Lebih Rinci dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 12. Realisasi Penyaluran Dana PKPS-BBM Dalam Wilayah Bayar KPPPN Samarinda Tahun 2005.

Kode Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Bidang Pendidikan Nasional			
Bantuan Operasional Sekolah	70.604.975.000	68.484.541.250	2.120.433.750
Bantuan Khusus Murid	3.317.340.000	3.280.290.000	37.050.000
Bidang Infrastruktur			
PKPS BBM Provinsi Kalimantan Timur	2.022.810.000	384.506.400	1.638.303.600
PKPS BBM Samarinda	4.055.890.000	1.500.890.000	2.555.000.000
PKPS BBM Kab. Kutai Kertanegara	5.086.040.000	2.000.000.000	3.086.040.000
PKPS BBM Kab. Kutai Barat	5.077.040.000	1.219.806.000	3.857.232.000
PKPS BBM Kab. Kutai Timur	15.231.340.000	5.854.060.000	9.377.280.000
PKPS BBM Bontang	2.282.960.000	1.568.220.915	714.731.085
T o t a l	107.678.395.000	84.292.314.565	23.386.070.435

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur, 2006

Selain Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, Kaltim memperoleh bantuan dana dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT) dengan prioritas utama adalah sektor kesehatan; yang langsung disalurkan kepada masyarakat melalui kantor Pos Indonesia sebesar Rp. 50.571.300.000,-, yang teralisasi sebesar Rp.34.331.700.000,00,-. Sisa dana yang masih berada di kantor Pos Indonesia berjumlah Rp.16.239.000,00,-. Rincian biaya pelayanan kesehatan keluarga miskin yang telah disalurkan dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 13. Rincian Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin yang Telah Disalurkan Secara Langsung Melalui Kantor Pos Indonesia (Persero) Tahun 2005.

Kabupaten/ Kota	Alokasi		Realisasi*			Sisa		
	KK	(Rp.X 1.000.000)	KK	(Rp. X 1.000.000)	%	KK	(Rp.X 1.000.000)	%
Pasir	17.581	5.274,300	15.458	4.637,400	87,92	2.133	636,900	12,08
Kutai Barat	10.697	3.209,100	1.819	545,700	17,00	8.878	2.663,400	83,00
Kutai Kartanegara	34.888	10.466,400	20.564	6.169,200	58,94	14.324	4.297,200	41,06
Kutai Timur	16.583	4.974,900	7.715	2.314,500	46,52	8.868	2.660,400	53,48
Berau	9.906	2.971,800	6.125	1.837,500	61,83	3.781	1.134,300	38,17
Malinau	7.556	2.266,800	3.362	1.008,600	44,49	4.194	1.258,200	55,51
Bulungan	7.299	2.189,700	5.085	1.525,500	69,67	2.214	664,200	30,33
Nunukan	9.009	2.702,700	6.002	1.800,600	66,62	3.007	902,100	33,38
Penajam Paser Utara	10.925	3.277,500	10.335	3.100,500	94,60	590	177,000	5,40
Balikpapan	8.184	2.445,200	8.001	2.400,300	97,76	183	54,900	2,24
Samarinda	23.546	7.063,800	18.689	5.606,700	79,37	4.857	1.457,100	20,36
Tarakan	5.810	1.743,000	5.022	1.506,600	86,44	788	236,400	13,56
Bontang	6.587	1.976,100	6.262	1.878,600	95,07	325	97,500	4,93
Jumlah	168.571	50.571,300	114.439	34.331,700	67,89	54.132	16.239,600	32,11

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur, 2006

Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kalimantan Timur memperoleh dana Rp.9.117.011.130,00,-; yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain dana penunjang dari Kabupaten/kota berjumlah Rp.250.500.000,- dan Program Pelayanan Kesehatan Rp. 4.928.123.311,-; dana persalinan Rp. 1.111.120.890,- ; dana OPS Puskesmas berjumlah Rp.1.586.213.513,- dan dan OPS Posyandu/Gizi berjumlah Rp.1.241.053.416,-

Pelaksanaan Program kesehatan yang berasal dari subsidi Provinsi Kalimantan Timur untuk 3 rumah sakit umum, yaitu RSUD A.Wahab Syahrani, RS KD dan RSUD Tarakan berjumlah Rp.11.092.939.200. Dana penunjang dari program kesehatan yang berasal dari kabupaten/kota berjumlah Rp.250.500.000,-; secara lebih rinci, dituangkan dalam tabel di bawah ini :

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 14. Penerimaan Dana Penunjang Kabupaten/Kota Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PKPS-BBM bidang kesehatan) Tahun Anggaran 2005

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah
1.	Pasir	32.280.000
2.	Kutai Barat	33.572.000
3.	Kutai Kartanegara	34.028.000
4.	Kutai Timur	23.242.000
5.	Berau	21.951.000
6.	Malinau	14.204.000
7.	Bulungan	19.369.000
8.	Nunukan	15.039.000
9.	Penajam Paser Utara	15.495.500
10.	Balikpapan	12.912.000
11.	Samarinda	14.204.000
12.	Tarakan	10.330.000
13.	Bontang	3.874.000
Total		250.000.000

Sumber : Profil Pembangunan Kalimantan Timur, 2006

Untuk perbaikan kondisi lingkungan yakni Rehabilitasi Hutan dan Lahan, alokasi dana DAK-DR Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2001 s/d 2004 berjumlah Rp.704.713.811.820,-. Luasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi dengan dana DAK-DR sejak tahun 2001 s/d 2004 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Rekapitulasi Luas Hutan dan Lahan Yang Telah Direhabilitasi Dengan Menggunakan Dana DAK-DR Periode Tahun 2001 s/d 2004

No.	Jenis Kegiatan	Tahun	Luas (ha)	Alokasi Dana (Rp.)
1.	Penghijauan	2001	21.585	190.736.786.820,-
2.	Reboasasi		11.457	
3.	Penghijauan	2002	21.188	220.628.153.000,-
4.	Reboasasi		7.298,5	
5.	Penghijauan	2003	20.670,38	163.753.242.000,-

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 15. Lanjutan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun	Luas (ha)	Alokasi Dana (Rp.)
6.	Reboasasi		7.749	
7.	Penghijauan	2004	63.443,38	131.538.799.000,-
8.	Reboasasi		26.504,50	
TOTAL				704.713.811.820,-

Sumber : Zain (2006)

Adapun Dana Alokasi Khusus Lingkungan Hidup yang diterima Provinsi Kalimantan Timur tahun 2007 sebesar Rp. 6.446.000.000,-, naik sebesar 671% dari tahun 2006, yakni sebesar Rp 960.000.000,-

Tabel 16. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2007 Yang Diterima 13 Kabupaten/Kota (x 1.000)

No	Kab/Kota	Tahun 2007 (Rp)
1	Berau	198.000
2	Bulungan	205.000
3	Kukar	222.000
4	Kubar	1.451.000
5	Kutim	1.252.000
6	Malinau	1.189.000
7	nunukan	1.118.000
8	Pasir	178.000
9	Balikpapan	124.000
10	Bontang	128.000
11	Samarinda	132.000
12	Tarakan	120.000
13	PPU	129.000
Jumlah		6.446.000

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007

BAB II ISU LINGKUNGAN HIDUP UTAMA

Kalimantan Timur memiliki potensi sumberdaya alam (hutan dan lahan) sumberdaya mineral yang cukup besar, hal tersebut merupakan daya tarik yang tinggi bagi investor bidang perkebunan dan pertambangan. Hal ini digambarkan dengan besarnya penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan di Kalimantan Timur sejak tahun 2002 – 2006, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan sejak Tahun 2002- 2006 di Kalimantan Timur

Sektor	Jenis Modal	2002 (X 1000 US\$)		2003 (X 1000 US\$)		2004 (X 1000 US\$)		2005 (X 1000 US\$)		2006 (X 1000 US\$)	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Perkebunan	PMA	-	-	1	30.500,0	3	152.000	-	-	6	146.068,78
Kehutanan		1	120,0	-	-	1	31.400,0	-	-	-	-
Pertambangan		-	-	1	8.000,0	1	10.000,0	-	-	2	5.500,0
Sektor	Jenis Modal	2002 (X 1 Milyar)		2003 (X 1 Milyar)		2004 (X 1 Milyar)		2005 (X 1 Milyar)		2006 (X 1 Milyar)	
		Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi	Proyek	Investasi
Perkebunan	PMDN	3	1.062.597	1	0.474	2	0.128.729	7	2.042.287	4	0.742.361
Kehutanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan		1	0.080,00	-	-	3	0.856.887	3	0.469.099	2	758.000

Sumber : BPID Provinsi Kaltim, 2007

Saat ini sumberdaya alam hutan (kayu) Kalimantan Timur kehilangan momentum untuk terus mendukung pembangunan Kalimantan Timur, HPH dan industri hilirnya rontok. Ekses ekonomisnya, penurunan pemasukan APBD Kaltim dan pemutusan hubungan ± 15.000 pekerja (sumber : Disnakertrans Kaltim, 2005). Ekses ekologisnya, terjadi kerusakan ekosistem hutan dan daya dukung kualitas kehidupan yang baik. Menurut Daroni (2006), pada pengelolaan hutan Kaltim terjadi degradasi yang cukup serius akibat eksploitasi, deforestasi sumberdaya hutan secara besar-besaran ± 6 juta ha. Menurut Walhi Kaltim, luas hutan Kalimantan Timur pada tahun tinggal 5,2 juta ha dari 14 juta ha. Penguasaan hutan oleh pengusaha bidang “perkebunan” sampai saat ini masih ada dalam bentuk izin-izin HPH, HTI, IUPHHK, dll meskipun potensi tegakan ekonomis sudah tidak ada. Jumlah luas penguasaan hutan oleh HPH, HTI, IUPHHK dan lainnya digambarkan pada tabel di bawah.

Tabel 17. Luas Penggunaan Hutan dan Kebakaran Hutan Sampai Tahun 2006

Luas Kerusakan Hutan Berdasarkan Penyebabnya		
No	Penggunaan Hutan	Luas (Ha)
1	HPH	69.580,52
2	HTI Pulp	20.507,93
3	HTI Transmigrasi	7.367,28
4	HTI Pertukangan	12.582
5	Konversi	2.219,18
6	Ladang Berpindah	243,6
7	Kebakaran Hutan	4.628,95
Jumlah		117.126,46

Meski kondisi hutan Kalimantan Timur telah mengalami deforestasi sumberdaya secara besar-besaran, produksi kayu masih keluar dari hutan-hutan Kalimantan Timur, seperti pada tabel di bawah.

Tabel 18. Produksi Kayu Bulat Pada Tahun 2004 S/D 2006 Dalam Wilayah Kalimantan Timur (dalam m³)

No.	Jenis Kayu	Tahun		
		2004	2005	2006*
1.	Meranti	1.670.743,67	179.303,36	233.643,86
2.	Kapur	375.350,44	47.250,86	15.077,46
3.	Keruing	316.463,38	35.514,66	52.885,02
4.	Bengkirai	167.927,08	27.155,21	21.476,44
5.	Nyatoh	51.617,54	7.093,18	12.229,16
6.	Anggi	1.509,97	-	106,52
7.	Agatis	2.640,71	193,58	2.338,51
8.	Mersawa	17.379,38	3.827,17	1.831,71
9.	Ulin	747,40	-	-
10.	Lainnya	961.731,10	203.331,07	166.673,50
Jumlah		3.566.290,67	503.669,09	506.262,18

Sumber : Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Timur

Keterangan : * Data tahun 2006 sampai dengan bulan Agustus 2006

Pada era sentralisasi, proses pra-pengelolaan (perizinan, penetapan lokasi) dan pengelolaan didominasi oleh pemerintah pusat (Departemen Kehutanan), sehingga daerah (terlebih masyarakat sekitar kegiatan) tidak mempunyai akses ekonomis terhadap hutan (fisik kayu) - *Trickle down effect* kecil (Daroni, 2006), kecuali hasil ikutan hutan (binatang buruan, rotan, damar). Pengelolaan dan pengawasan yang buruk, tidak

efektif dan tidak efisien, menyebabkan laju penebangan kayu tidak dapat diimbangi dengan laju penanaman, maupun suksesi alam; akibatnya sumberdaya hutan kayu sangat cepat menurun. Memasuki era desentralisasi (setelah diundangkan Undang-undang 32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah), sumberdaya hutan kaltim sudah habis dengan meninggalkan "jejak" kerusakan lingkungan, berupa perubahan kualitas lahan. Menurut data, telah terjadi kekritisian lahan di dalam kawasan hutan secara gradual sebesar 1.530.466,25 ha, dengan rincian sebagai berikut : sangat kritis : 4.062,50 ha, kritis : 170.017,75 ha, agak kritis : 1.170.167,25 ha serta potensial kritis : 186.218,75 ha (Zain, 2006). Menurut hasil pemutakhiran data dari BP DAS saat expose tanggal 21 Juni 2005, luas lahan kritis menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, digambarkan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Luas Lahan Kritis Berdasarkan Kelas Kekritisian Per-Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kekritisian			Total (ha)	Persen (%)
		Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis		
1.	Pasir	6.735	83.667	608.014	698.416	10,91
2.	Kutai Barat	766	113.962	947.049	1.061.777	16,58
3.	Kutai Kartanegara	6.690	122.295	854.533	983.518	15,36
4.	Kutai Timur	15.916	169.473	946.876	1.150.265	17,97
5.	Berau	5.774	115.340	661.186	782.300	12,22
6.	Malinau	-	71.084	420.444	491.528	7,68
7.	Bulungan	-	89.292	522.231	611.523	9,55
8.	Nunukan	1.192	39.414	336.688	377.294	5,89
9.	Penajam Paser Utara	882	20.016	147.699	168.597	2,63
10.	Balikpapan	105	8.975	19.271	28.351	0,44
11.	Samarinda	-	16.265	16.440	32.705	0,51
12.	Tarakan	-	66	9.951	10.017	0,16
13.	Bontang	-	359	5.823	6.182	0,10
Jumlah		38.060	850.208	5.514.205	6.402.473	100,00

Sumber : Buku pintar Bidang Pembinaan Hutan Dishut Prop. Kaltim tahun 2005
 Hasil pemutakhiran data dari BP DAS saat expose tanggal 21 Juni 2005.

Didorong oleh euforia otonomi daerah; masyarakat secara tidak terkontrol mengambil akses ekonomis pada "sisa" sumberdaya hutan (kayu) yang masih ada, melakukan penebangan pohon tanpa proses perizinan (*illegal logging*). Menurut data dari Polda Kaltim, kasus *illegal loging* yang diproses sebanyak 117 kasus, dengan jumlah tersangka 127 (Polda Kaltim, 2006)

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 20. Jumlah Kasus dan Jumlah tersangka Illegal Logging dan Illegal Mining di Kalimantan Timur Tahun 2006

No.	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1.	<i>Illegal Logging</i>	117
2.	<i>Illegal Mining</i>	127

Sumber : Bidang Pembinaan Hukum Polda Kaltim, 2006

Jika mengikuti pola ekstrapolasi pengangguran, bila ada 1 penganggur nyata, maka akan ada 3 penganggur tidak nyata di belakangnya. Maka pada kasus *illegal logging* akan ada "351" kasus yang tidak terungkap, ada "381" pelaku yang tidak tertangkap. Praktek Pengelolaan lingkungan pada *illegal logging* lebih buruk; penebangan yang tidak lagi memperhatikan diameter ekonomis, jenis dan umur kayu, menyebabkan kerusakan hutan yang sangat drastis.

Pada sektor pertambangan umum, Kaltim merupakan lumbung batu bara ke 2 di Indonesia setelah Sumsel (data versi Direktorat Jendral Geologi Dep. ESDM : cadangan 43 milyar ton, terukur 23 milyar ton). Besarnya cadangan batubara di Kalimantan Timur menyebabkan pesatnya pertambangan perusahaan tambang batubara. Menurut Zain (2006), setidaknya terdapat 239 perusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur. Jumlah pertambangan batubara menurut Kabupaten/Kota di Kaltim, digambarkan pada tabel di bawah :

Tabel 21. Jumlah pertambangan batubara menurut Kabupaten/Kota di Kaltim Sampai dengan Tahun 2007

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang terdaftar
1.	Samarinda	40 buah
2.	Penajam Paser Utara	16 buah
3.	Paser	22 buah
4.	Nunukan	17 buah
5.	Malinau	9 buah
6.	Kutai Timur	47 buah
7.	Kutai Barat	24 buah
8.	Kutai Kartanegara	239 buah
9.	Berau	9 buah
10.	Bulungan	18 buah
J u m l a h		239 buah

Sumber : Distamben Prov. Kaltim 2007

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pada praktek penambangan, alat-alat berat menumbangkan pohon, membongkar sawah dan tanah, membuat lubang menggali batu bara. Bukaan tambang sudah 1.330,46 ha dari luas areal konsesi 261.271,14 ha (Hartono, 2006). Awal potensi ancaman yang dahsyat, karena realisasi reklamasi baru 57,141%, Dari luasan lahan yang telah direklamasi tadi baru 15 s/d 30% (Zain, 2006). Gambaran luas lahan yang direklamasi terhadap luas lahan yang terganggu (sampai dengan Triwulan II tahun 2007) adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Perbandingan Luas Lahan Reklamasi terhadap Luas Lahan Terganggu Dari kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara di Kalimantan Timur.

No.	Nama Perusahaan	Luas Areal (ha)	Luas Lahan Yang Terganggu (ha)	Luas Lahan Yang Direklamasi (ha)
1.	PT. Kaltim Prima Coal	90.960,00	10.331,94	2.671,20
2.	PT. Multi Harapan Utama	46.218,35	2.164,49	1.352,65
3.	PT. Tanito harum	6.487,35	1.845,11	1.663,11
4.	PT. Bukit Baiduri Enterprise	2.081,00	1.112,30	483,70
5.	PT. Fajar Bumi Sakti	988,34	-	-
6.	PT. Kitadin Embalut	2.973,60	1.196,00	630,05
7.	PT. Berau Coal			
	a. Samarata Operation	15.600,00	353,23	125,30
	b. Lati Operation	6.489,12	1.666,70	703,06
	c. Binungan Operation	12.130,00	1.481,60	492,89
8.	PT. Kideco Jaya Agung	27.434,00	4.800,29	881,10
9.	PT. Indominco Mandiri	71.939,00	4.958,17	2.553,54
10.	PT. Baradinamika MS	1.000,00	-	-
11.	PT. Gunung Bayan PC	15.380,00	-	-
12.	PT. Kelian Equatorial Mining	6.725,00	1.192,22	1.111,21
13.	PT. Kitadin Tandung Mayang	2.338,00	70,40	51,85
14.	PT. Lanna Harita Indonesia	30.018,00	542,37	337,24
15.	PT. Kartika Selabumi Mining	17.550,00	-	-
16.	PT. Mahakam Sumber Jaya	20.380,00	846,53	134,55
17.	PT. Trubaindo Coal Mining	23.650,00	-	-
18.	PT. Dharma Puspita Mining	2.811,00	168,77	134,00
19.	PT. Mandiri Inti Perkasa	9.240,00	542,10	29,99
Jumlah			33.272,22	13.355,44 (40%)

Sumber : Distamben Prov. Kaltim 2007

Hasil pertumbuhan tanaman revegetasi rata-rata berkisar antara 60 s/d 80% (Dinas Pertambangan Prop. Kaltim, 2006). Adanya kebijakan dari pemerintah Kabupaten/kota tertentu di Kaltim yang mengeluarkan izin penambangan batu bara

dengan luasan skala kecil (< 100 ha) yang dikelola oleh KUD, CV, dll; memberi kesempatan pada kerusakan pada hutan dan lahan yang permanen karena praktek pengelolaan lingkungan oleh pengusaha pertambangan skala kecil sama sekali tidak mengikuti kaidah-kaidah (pedoman) reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang yang dikeluarkan oleh Departemen ESDM. Menurut data pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kertanegara ada 40-an pemegang izin kuasa pertambangan (KP) eksploitasi skala kecil.

Pada sektor perkebunan, perkembangan luas penanaman perkebunan di Kalimantan Timur sampai akhir tahun 2006 telah mencapai luas bukaan 4.296,874 ha dengan komoditi yang tergambar pada tabel di bawah :

Tabel 23. Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2006

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Karet	64.957	43.845
2	Kelapa	47.808	44.11
3	Kelapa Sawit	225.337	1268600
4	Kopi	17.469	4613
5	Kakao	41.413	26774
6	Lada	14.769	9959
7	Cengkeh	252	20
8	Pala	24	3
9	Kemiri	5.121	2281
10	Kayu Manis	197	47
11	Aren	1.351	836
12	Kapok	423	148
13	Jambu Mete	163	29
14	Panili	257	5
15	Melinjo	155	54
16	Nipah	77	45
17	Pinang	61	8
18	Sagu	15	6
19	Jarak Pagar	424	0
20	Tebu	43	10
21	Jahe	408	975
22	Kenaf	30	51
J u m l a h		4.296,874	

Sumber : Dinas Perkebunan Kaltim, 2007

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dari narasi dan data yang disampaikan di atas, dan memperhatikan kriteria isu lingkungan hidup utama; maka untuk Provinsi Kalimantan Timur Isu Lingkungan Hidup Utama-nya adalah kerusakan hutan dan lahan.

Tabel 24. Uji *Check List* Kejadian kerusakan hutan dan lahanti Kaltim Terhadap Kriteria Isu Lingkungan Hidup Utama

No.	Kriteria Isu Lingkungan Hidup Utama	Kejadian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah
1.	Bersifat lintas media lingkungan	√	1
2.	Mempunyai dampak terhadap lingkungan (kerusakan, pencemaran dan perubahan status)	√	1
3.	Mempunyai dampak terhadap kesehatan dan keselamatan manusia	√	1
4.	Mempunyai dampak terhadap perekonomian	√	1
5.	Ada indikasi menimbulkan masalah besar di masa depan (tahun depan)	√	1
6.	Mempunyai skala dan intensitas tinggi serta luas	√	1
7.	Merupakan berita yang mempunyai durasi tinggi dalam pemberitaan media	√	1

Status : Pada Sektor Kehutanan

- 1). Kerusakan hutan (deforestasi) Kalimantan Timur seluas 350.000 ha/tahun. Total deforestrasi saat ini 6 jt ha - 40% dari total luas hutan Kaltim - (luas hutan Kaltim 14.65 jt ha, ± 70% hutan produksi, 26,46% KBNK).
- 2). Penciutan/penyusutan kawasan hutan (2 jt ha kawasan hutan sedang diminta ke Menteri Kehutanan untuk dijadikan KBNK).
- 3). Degradasi hutan menjadi lahan kritis (Lahan kritis di dalam kawasan hutan; sangat kritis : 4.062,50 ha, kritis : 170.017,75ha, agak kritis : 1.170.167,25 ha, potensial kritis : 186.218.75 ha. Total : 1.530.466,25 ha)

Status : Pada Sektor Pertambangan batubara

- 1). Terdapat 130 perusahaan tambang batubara di Kaltim. Pada Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2005 terdapat 205 KP (KP yang mempunyai luas ≥ 5.000 ha ada 28 perusahaan, KP dengan luas ≤ 100 ha 62 perusahaan)

- 2). Bukaian tambang 1.330,46 ha dari luas areal konsesi 261.271,14 ha realisasi reklamasi baru 38.71%
- 3). Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi dijalankan dengan tidak konsekuen

Status : Pada Sektor Delta mahakam (Hutan Mangrove)

- 1). Terjadi kerusakan 95.000 ha, terjadi sedimentasi pada 50.000 ha (Luas total delta mahakam 150.000 ha)

Pressure : Penyebab perubahan kondisi hutan

• **Sektor Kehutanan**

- 1). TPI, TPTI, TJTI dan PMDH tidak dijalankan dengan konsekuen
- 2). Pembalakan dan *illegal logging*
- 3). Kebakaran hutan
- 4). Ladang Berpindah

• **Sektor Pertambangan batubara**

- 1). Pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang tidak dilakukan sesuai dengan pedoman/kaidah reklamasi dan revegetasi yang baik dan benar
- 2). *Illegal Mining*

• **Sektor Delta Mahakam (hutan Mangrove)**

- 1). Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak dan kegiatan lain (eksploitasi kayu bakau).

Impact : Implikasinya terhadap lingkungan biofisik dan ekonomi

• **Sektor Kehutanan**

- 1). Perubahan iklim mikro (suhu, curah hujan)
- 2). Perubahan siklus dan durasi banjir
- 3). Berkurangnya akses ekonomi masyarakat dari hutan (hewan buruan, buah-buah hutan, hasil ikutan lain)
- 4). Menurunnya pendapatan daerah
- 5). Menjadi beban APBD I dan II, pada dana pendamping program RHL

- **Sektor Pertambangan**

- 1). Terjadi penurunan kesuburan lahan dengan drastis
- 2). Terjadi penurunan keanekaragaman species pohon hutan dari kegiatan revegetasi
- 3). Terjadi perusakan pada sawah-sawah yang subur
- 4). Terjadi pencemaran air
- 5). Terjadi konflik sosial

- **Sektor Delta Mahakam (hutan mangrove)**

- 1). Mendorong terjadinya intrusi air laut
- 2). Menurunnya tempat-tempat pemijahan bibit-bibit ikan dll

Respons : Tindakan Pemerintah dan Masyarakat (sejauhmana dapat merestorasi lingkungan hidup)

- **Sektor Kehutanan**

- 1). Program pengelolaan hutan lestari oleh pemerintah melalui Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI). Program ini tidak berhasil merestorasi hutan produksi Kalimantan Timur.
- 2). Program pemberdayaan masyarakat melalui program PMDH (Pember dayaan Masyarakat Desa Hutan). Program ini tidak berhasil memberdayakan masyarakat, karena orientasi pengusaha HPH hanya pada profit maksimum.
- 3). Kebijakan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) oleh pemerintah. Kebijakan ini banyak disalahgunakan oleh pemegang IPK.

- **Sektor Pertambangan Batubara**

- 1). Program Proper Batubara. Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper ini dicanangkan oleh pusat dan juga oleh Pemda Provinsi Kaltim. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.

2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang yang dicanangkan oleh Pemda Kaltim melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim. Program ini hanya mengumpulkan data tentang reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang yang sedang berjalan. Tidak ada tindak lanjut pembinaan.

- **Sektor Delta Mahakam (Hutan Mangrove)**

1). Pembinaan pembuatan tambak berwawasan lingkungan. Kegiatan ini diprakarsai oleh dunia usaha Migas. Kegiatan ini memberikan pengetahuan kepada petani tambak di Delta Mahakam tentang hubungan kelestarian mangrove dan kelangsungan usaha budidaya perikanan tambak.

BAB III. A I R

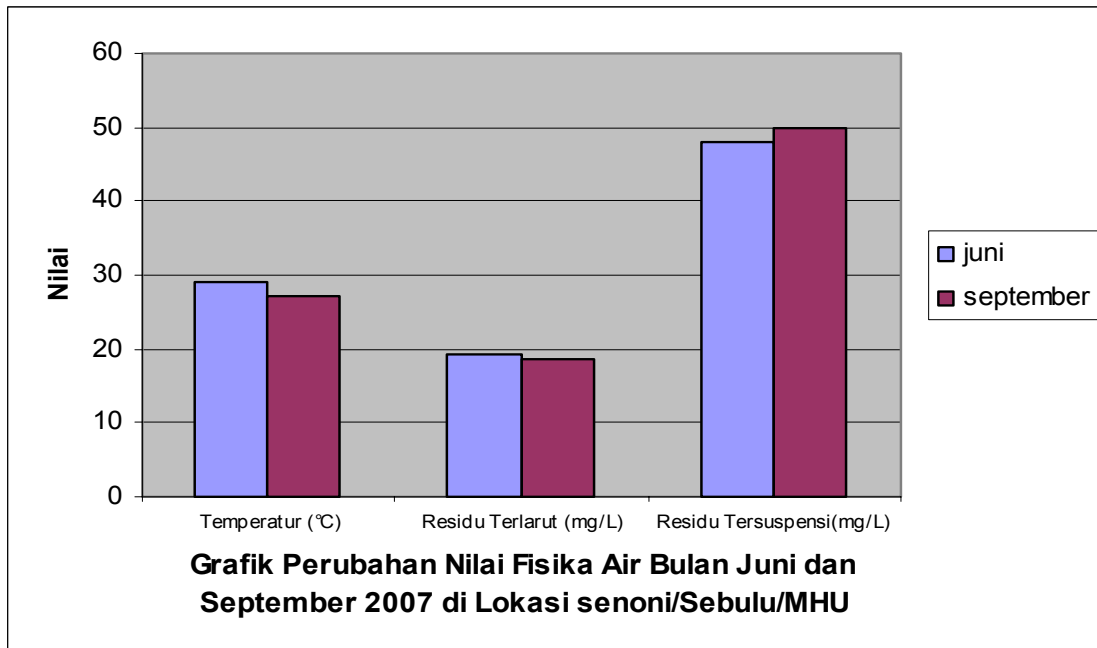
3.1. Kualitas Air Sungai Mahakam

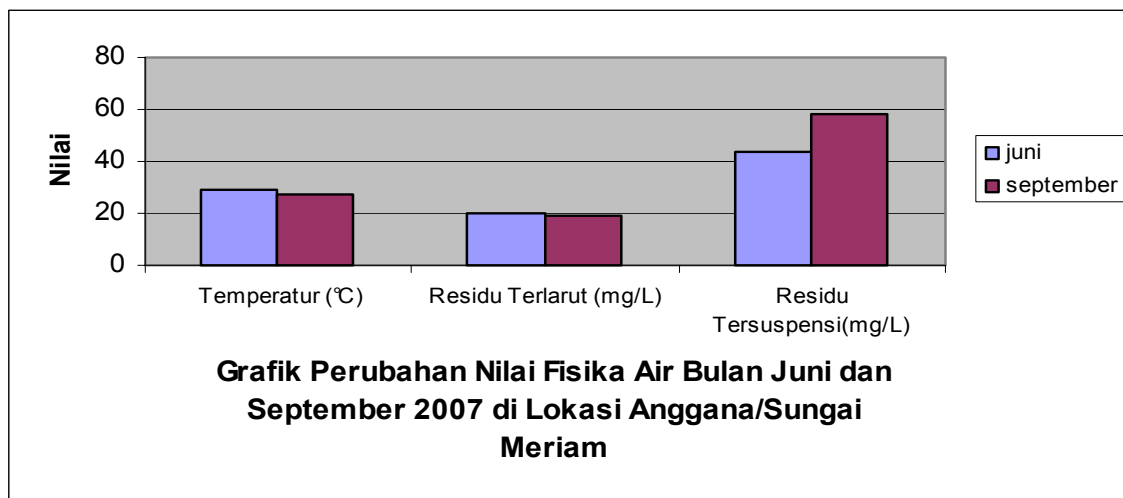
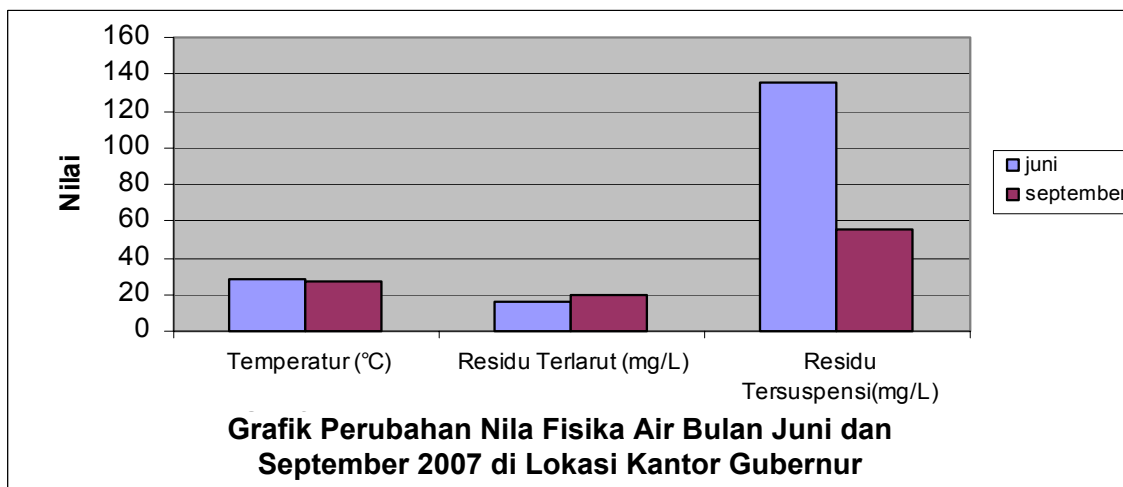
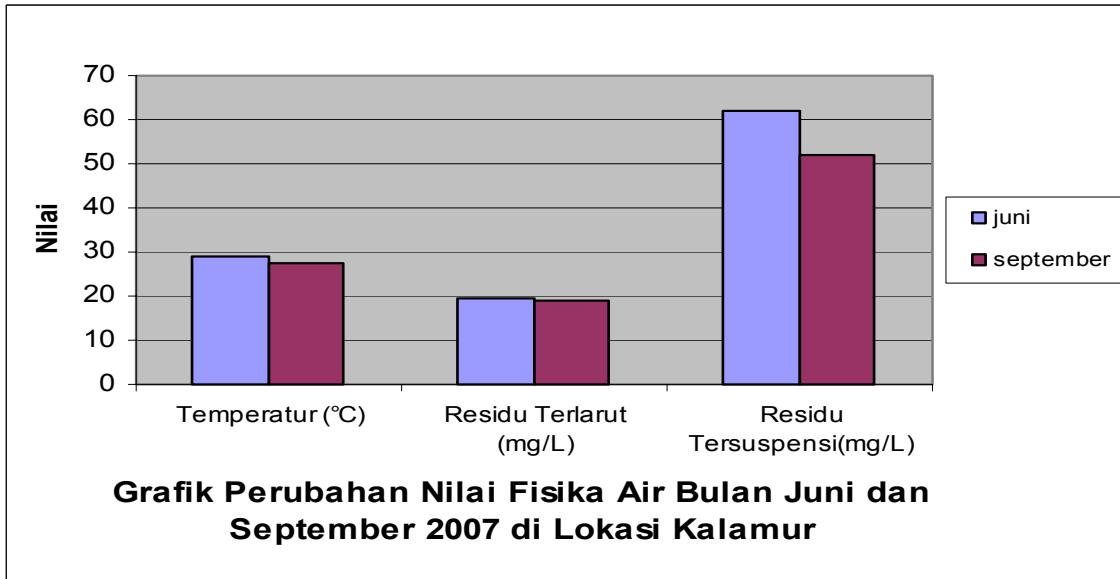
Tabel 25. Kualitas Fisik Air Sungai Mahakam Tahun 2007 di Beberapa Lokasi Pemantauan

Sifat fisika	Juni						
	1	2	3	4	5	6	BM
Temperatur (°C)	29.00	28.93	29.13	28.93	28.83	28.87	± 3*
Residu Terlarut (mg/L)	19.40	19.07	19.60	16.47	19.77	19.77	1.000
Residu Tersuspensi(mg/L)	48.00	46.00	62.00	136	52.00	44.00	50
Sifat fisika	September						
	1	2	3	4	5	6	BM
Temperatur (°C)	27.23	27.50	27.40	27.03	27.20	27.40	± 3*
Residu Terlarut (mg/L)	18.53	18.76	18.76	19.33	20.07	19.17	1.000
Residu Tersuspensi(mg/L)	50.00	52.00	52.00	56.00	54.00	58.00	50

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim 2007

Keterangan : 1 : Senoni/Sebulu/MHU, 2.: Tenggarong, 3 : Kalamur
 4 : Depan Kantor Gubernur, 5 : Palaran
 6 : Anggana Sungai Meriam, 7 : **Baku Mutu PP No. 82 Th 2001**
 * : ± 3° dari kondisi suhu air mahakam alami





Status :

1. Residu Tersuspensi (mg/L) pengukuran pada bulan Juni pada lokasi : Kalamur (3), Depan Kantor Gubernur (4) dan, Palaran (5) diatas ambang batas menurut PP No. 82 Tahun 2001.
2. Residu Tersuspensi (mg/L) pengukuran pada bulan September pada lokasi : Tenggarong (2), Kalamur (3), Depan Kantor Gubernur (4), Palaran (5), dan Anggana Sungai Meriam, diatas ambang batas menurut PP No. 82 Tahun 2001.

Pressure :

1. Erosi akibat pembukaan hutan dan lahan (Perkebunan, Pertambangan, dan ladang berpindah serta penebangan liar/*illegal logging*).

Impact :

1. Menurunkan penetrasi sinar matahari ke dalam perairan, mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas primer (fitoplankton)
2. Mempengaruhi kehidupan jenis ikan tertentu yang tidak tahan kekeruhan
3. Jika digunakan sebagai bahan baku air bersih (PDAM), akan memerlukan perlakuan lebih intensif

Respons : Tindakan Pemerintah dan Masyarakat (sejauhmana dapat merestorasi lingkungan hidup)

• **Sektor Kehutanan**

- 1). Kebijakan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini banyak disalahgunakan oleh pemegang IPK .
- 2). Operasi terhadap Pembalakan dan *illegal logging* belum berhasil menghentikan kejadian Pembalakan dan *illegal logging*.

• **Sektor Pertambangan Batu Bara**

- 1). Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper oleh pemerintah pusat dan juga oleh Pemda Provinsi Kaltim. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.

2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang hanya mengumpulkan data tentang tentang reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang yang sedang berjalan. Tidak ada tindak lanjut sanksi maupun pembinaan.

- **Sektor Perkebunan**

1). Sistem pembukaan lahan (*land clearing*) belum yang dilakukan belum dapat mengurangi terjadinya erosi

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 26. Kualitas Kimia Air Sungai Mahakam Tahun 2007 di Beberapa Lokasi Pemantauan

Sifat Fisika	Juni						BM
	1	2	3	4	5	6	
pH	6	5,33	5	5	5	5	6-9
BOD	2,28	2,31	2,46	2,52	2,75	2,81	3
COD	27,94	28,94	24,95	14,97	20,96	23,95	25
DO	3,7	2,57	4	2,67	2,63	3,87	4
Fosfat	0,60	0,48	0,64	0,52	0,48	0,51	0.2
NO ₃	0,642	1,248	1,068	1,931	0,819	0,650	10
NH ₃ -N	0,06	0,11	0,07	0,09	0,08	<0,001	-
Cu	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	<0,003	0.02
Fe	0,49	0,41	0,46	0,39	0,44	0,58	0.3
Mn	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	<0,006	ttd	-
Air Raksa	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	-
Nitrit	0,009	0,122	0,032	0,035	0,047	0,032	-
Sulfat	6,38	6,07	6,76	7,44	7,67	6,53	-
	September						BM
pH	6.8	6.9	6.2	6	5,66	5,83	6-9
BOD	2,13	2,33	2,54	3,21	3,55	3,70	3
COD	15,24	13,33	14,28	25,71	20	22,86	25
DO	54	5,28	5,37	53	5,19	5,57	4
Fosfat	0,80	0,84	0,99	0,86	0,86	0,85	0.2
NO ₃	0,101	0,089	0,118	0,095	0,105	0,095	10
NH ₃ -N	0,04	0,02	ttd	0,02	ttd	ttd	-
Cu	0,016	<0,003	0,012	0,032	0,015	0,030	0.02
Fe	0,17	0,11	0,47	<0,02	0,07	0,23	0.3
Mn	0,037	0,063	0,070	0,055	0,074	0,073	-
Air Raksa	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	<0,0001	-
Nitrit	0,014	0,013	0,013	0,015	0,015	0,013	-
Sulfat	5,52	32,56	6,68	6,05	6,71	5,68	-

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007

Keterangan : 1 : Senoni/Sebulu/MHU, 2.: Tenggarong, 3 : Kalamur
 4 : Depan Kantor Gubernur, 5 : Palaran
 6 : Anggana Sungai Meriam, 7 : Baku Mutu PP No.82 Th 2001

Status :

Pengukuran pada bulan Juni 2007

1. pH pada lokasi : 2, 3, 4, 5 dan 6 dibawah ambang batas minimum
2. COD pada lokasi : 1 dan 2 diatas ambang batas
3. Fosfat pada semua lokasi diatas ambang batas
4. DO pada lokasi 1, 2, 4 , 5 dan 6 dibawah batas minimum

Pengukuran pada bulan September 2007

1. pH pada lokasi : 5 dan 6 dibawah ambang batas minimum
2. BOD pada lokasi : 4, 5 dan 6 diatas ambang batas
3. COD pada lokasi : 4 diatas ambang batas
4. Cu pada lokasi 4 dan 6 diatas ambang batas

Pressure :

1. Erosi akibat pembukaan hutan dan lahan (Perkebunan, Pertambangan, dan ladang berpindah serta penebangan liar/*illegal logging*)
2. Industri

Impact :

1. Menurunkan kualiat kimia perairan, mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas primer (fitoplankton)
3. Mempengaruhi kehidupan ikan
4. Jika digunakan sebagai bahan baku air bersih (PDAM), akan memerlukan perlakuan lebih intensif

Respons : Tindakan Pemerintah dan Masyarakat (sejauhmana dapat merestorasi lingkungan hidup)

• **Sektor Kehutanan**

- 1). Kebijakan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kebijakan ini banyak disalahgunakan oleh pemegang IPK .

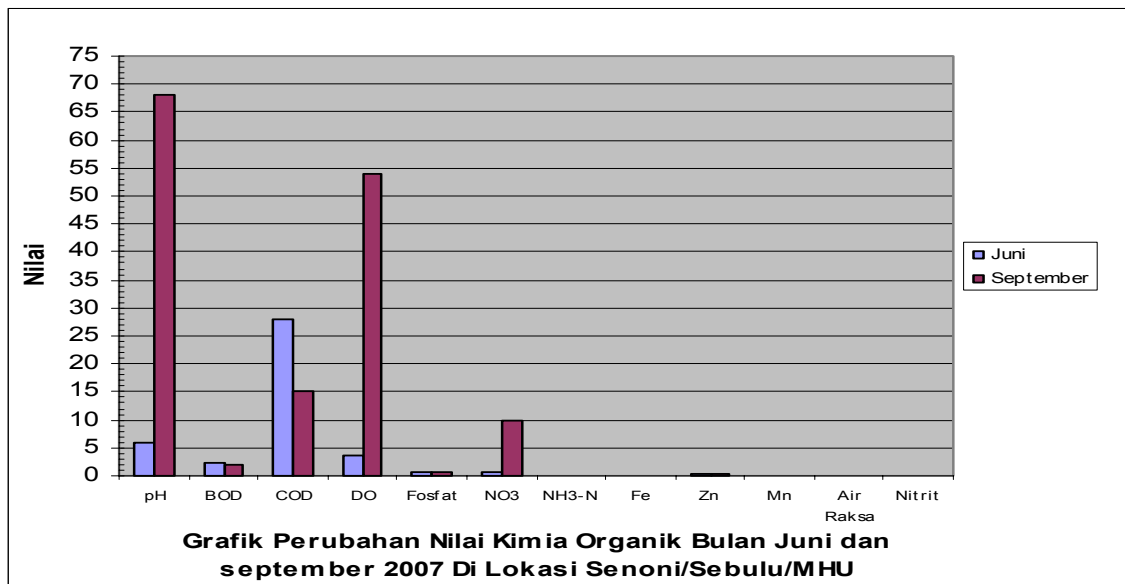
2). Operasi terhadap Pembalakan dan *illegal logging* belum berhasil menghentikan kejadian Pembalakan dan *illegal logging*.

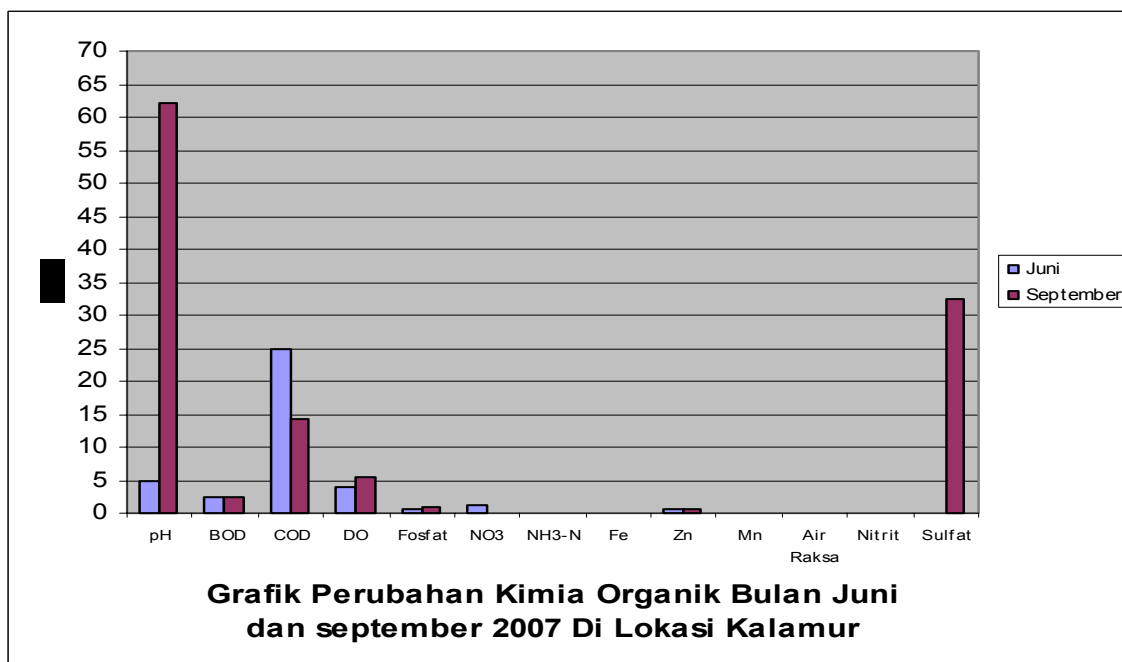
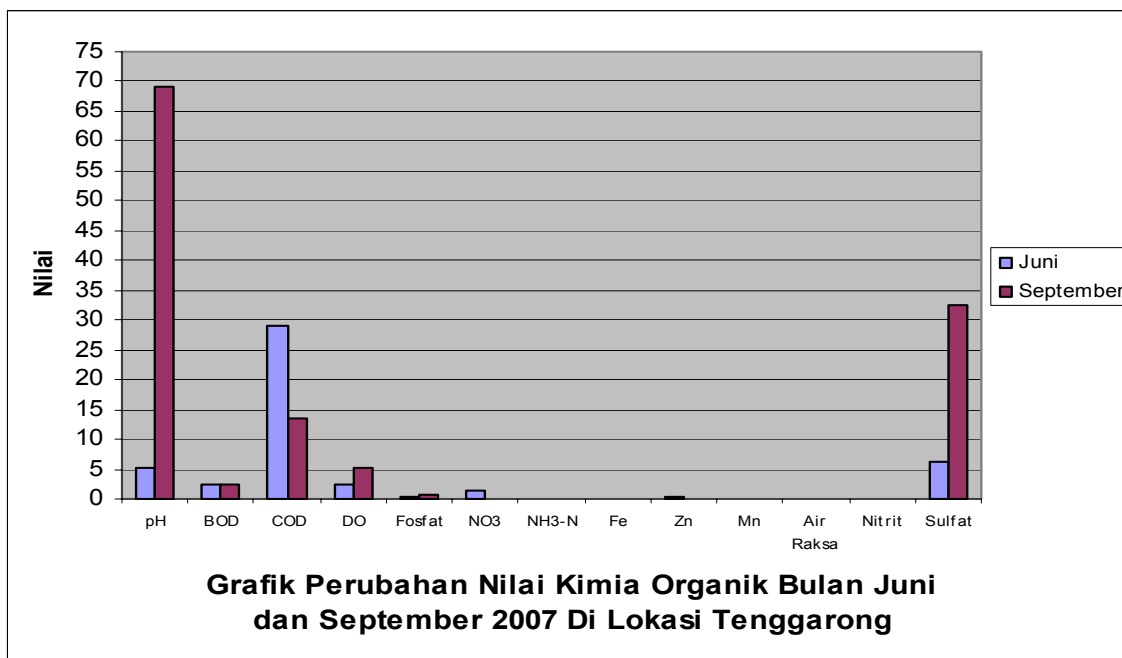
- **Sektor Pertambangan Batubara**

- 1). Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper oleh pemerintah pusat dan juga oleh Pemda Provinsi Kaltim. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.
- 2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang hanya mengumpulkan data tentang tentang reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang yang sedang berjalan. Tidak ada tindak lanjut sanksi maupun pembinaan.

- **Sektor Perkebunan**

- 1). Sistem pembukaan lahan (*land clearing*) belum yang dilakukan belum dapat mengurangi terjadinya erosi







3.2. Kualitas Air Limbah

3.2.1. Industri

Tabel 27. Kualitas Limbah Cair PT. Sumalindo Jaya Tbk Loa Janan Tahun 2007

Parameter	Bulan Pemantauan						BM
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	
TDS mg/L	54	42	36	20	24	22	2.000
pH	7.13	6.85	6.89	6.86	7.02	6.74	6-9
NH3-N mg/L	0.22	0.17	3.27	0.72	0.95	0.16	6.0
BOD mg/L	2.98	3.19	2.89	2.91	4.65	2.55	-
COD mg/L	9.86	15.84	16.8	19.23	16.47	11.63	150
Fenol mg/L	0.013	0.105	0.123	0.02	0.023	0.022	0.2
Minyak Nabati mg/L	0.118	0.214	0.109	0.05	0.017	0.069	10
Formal-dehide	0.6	0.18	0.08	0.06	0.07	0.04	-

Sumber : Laporan Data Swapantau PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

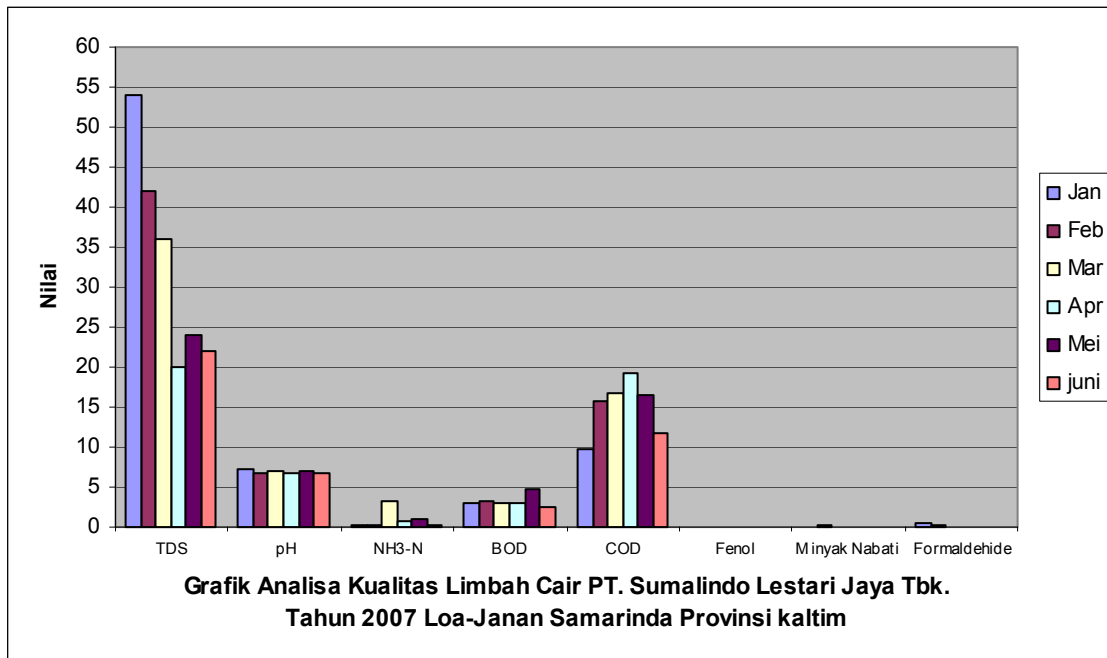
Keterangan : BM = Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2002

Status : Semua parameter kunci yang dipantau tidak melebihi ambang batas.

Pressure : Sistem pengelolaan limbah oleh pengelola industri PT. Sumalindo Jaya Tbk Loa Janan, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik.

Impact : Limbah cair industri PT. Sumalindo Jaya Tbk Loa Janan yang dibuang ke lingkungan sekitar mencemari, sehingga lingkungan sekitar tetap baik kualitasnya.

Respons : Pemeliharaan sistem instalasi pengolahan limbah cair secara berkala oleh pihak pengelola industri PT. Sumalindo Jaya Tbk Loa Janan, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.



3.2.2. Rumah Sakit

a. Rumah Sakit Dirgahayu

Tabel 28. Kualitas Limbah Cair Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda Tahun 2007

No	Parameter	Bulan Pemantauan					BM
		Jan	Feb	juni	Juli	Agt	
1	TDS	18	36	38	36	34	2.000
2	pH	7.33	7.57	7.28	6.58	6.42	6.0-9.0
3	NH3-N	0.8	0.19	0.14	1.35	0.02	0.5
4	BOD	4.53	2.34	7.54	4.43	2.77	50
5	COD	15.56	15.84	23.62	6.92	20.39	100
6	Phosfat	0.11	0.14	0.02	0.217	0.22	2
7	Coliform	2	9	33	33	33	10.000

Laporan Data Swapantau dari Rumah Sakit Dirgahayu

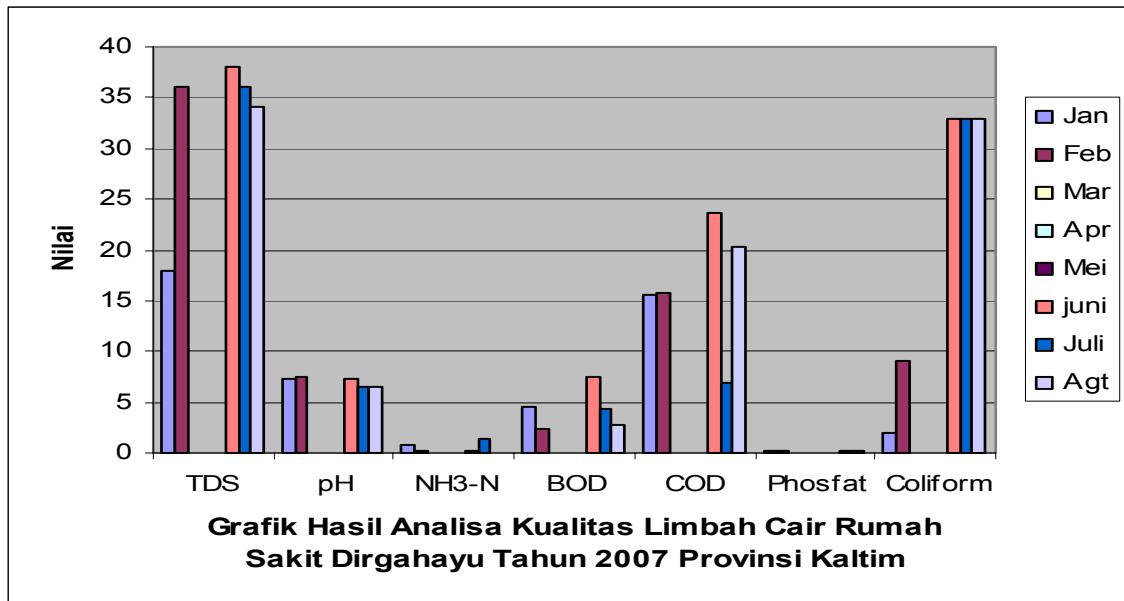
Keterangan : BM = Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2002

Status : Semua parameter kunci yang dipantau tidak melebihi ambang batas

Pressure : Sistem pengelolaan limbah oleh pengelola Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik

Impact : Limbah cair Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda yang dibuang ke lingkungan sekitar menjadi tidak mencemari, sehingga lingkungan sekitar tetap baik kualitasnya.

Respons : Pemeliharaan sistem instalasi pengolahan limbah cair secara berkala oleh pihak pengelola Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.



b. Beberapa Rumah Sakit di Kalimantan Timur Tahun 2006

Tabel 29. Kualitas Limbah Cair Beberapa Rumah Sakit di Kaltim Tahun 2007

Parameter	Baku Mutu	RSUD (Tp C) Bntg	RS. PKT (Tp C) Bntg	RSUD (Tp C) Sgt	Pusk. R.Inap Petung	RSUD (Tp B) AWS Smd	RSUD (Tp B) Kanujoso Bpp	RSUD (Tp C) P Sebaya Psr	Rsud (Tp C) Parikesit Tgr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Suhu (°C)	≤30	25	25	28	24	0	29	32.5	0
TDS (mg/L)	100	54.4	33.6	43.6	350	8	88	408.5	3
pH (mg/L)	6-9	7.25	7.68	6	6	7.6	7	6	7.6
NH ₃ -N (mg/L)	0.5	32	3.18	6.5	7	9.46	9.95	5.175	25.313
BOD (mg/L)	50	96.49	1.45	41.06	75.71	6.5	148.04	21.8325	7.3
COD (mg/L)	100	315.85	22.56	10.46	1347.33	34	56.26	1946.2	37
PO ₄ (mg/L)	2	0.5914	0.0337	0.0361	2.6951	0.24	0.688	1.1481	0.147

Sumber : Hasil Uji petik Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim bekerja sama dengan BTKL Banjarbaru
Pemeriksaan dilakukan antara Bulan Mei s/d Agustus 2006

Keterangan : BM = Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2002

Status :

1. Suhu pada rumah sakit lokasi 10 diatas ambang batas
2. TDS pada rumah sakit lokasi 6 dan 9 diatas ambang batas
3. NH₃-N pada semua rumah sakit diatas ambang batas
4. BOD pada rumah sakit lokasi 10 diatas ambang batas
5. COD pada rumah sakit lokasi 3, 6 dan 9 diatas ambang batas
6. PO₄ pada rumah sakit lokasi 6 dan 9 diatas ambang batas

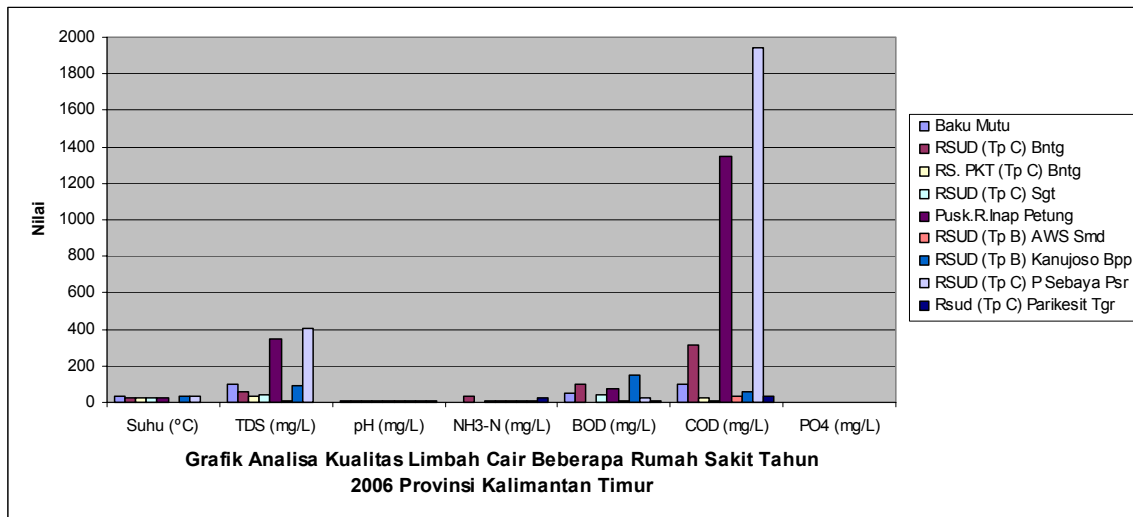
Pressure :

1. Sistem pengelolaan limbah cair oleh beberapa rumah sakit di Kalimantan Timur masih belum berjalan dengan baik
2. Pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah belum berjalan dengan baik

Impact : Limbah cair rumah sakit yang dibuang atau terbuang ke lingkungan sekitar akan menimbulkan pencemaran.

Respons :

1. Sistem instalasi pengolahan limbah cair yang dimiliki belum mampu menurunkan kadar bahan kimia limbah cair seperti yang disyaratkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya Dalam Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah belum efektif belum mampu menurunkan kadar limbah cair rumah sakit seperti yang disyaratkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 26 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha lainnya Dalam Provinsi Kalimantan Timur.



3.2.3. Hotel

Tabel 30. Kualitas Limbah Cair Hotel Mesra Internasional Samarinda Tahun 2007

No	Parameter	Bulan Pemantauan						BM
		Mar	Mei	juni	Juli	Agt	Sept	
1	Suhu (°C)	6.5	5.8	6.4	5.7	7.3	7.7	≤ 30
2	TDS(mg/L)	272	73	61	54	8	0	-
3	BOD(mg/L)	39	145.8	128.2	79.6	10.8	44.3	100
4	COD(mg/L)	82.4	493	783	856	112	136	150

Sumber : Laporan Data Swapantau dari Rumah Sakit Dirgahayu

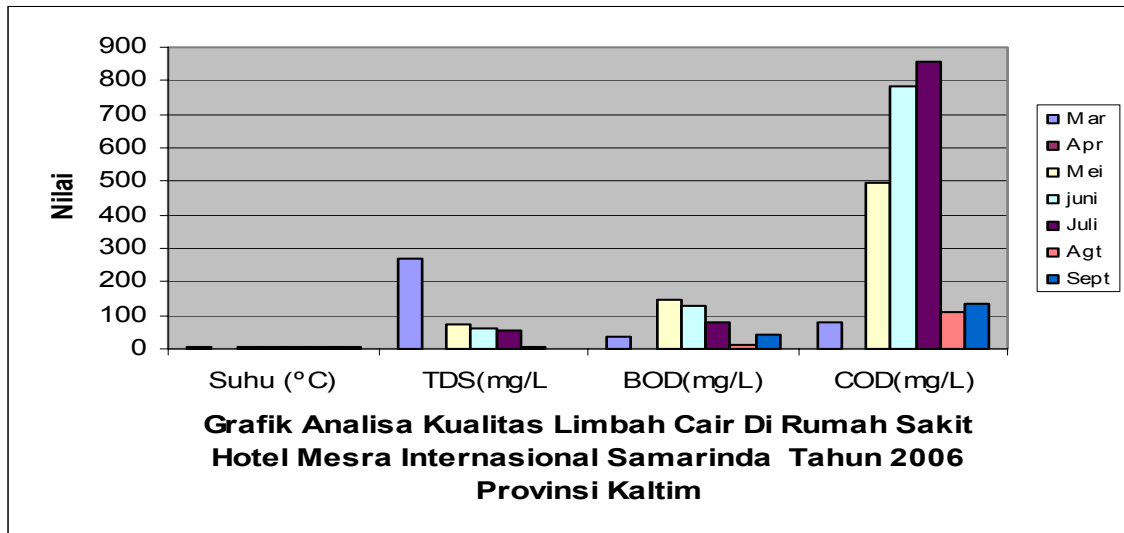
Keterangan : BM = Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.26 Tahun 2002

Status : Semua parameter kunci yang dipantau tidak melebihi ambang batas

Pressure : Sistem pengelolaan limbah cair oleh pengelola Hotel Mesra Internasional Samarinda, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik

Impact : Limbah cair Hotel Mesra Internasional Samarinda yang dibuang atau terlepas ke lingkungan sekitar tidak mencemari, sehingga lingkungan sekitar tetap baik kualitasnya.

Respons : Pemeliharaan sistem instalasi pengolahan limbah cair secara berkala oleh pihak pengelola Hotel Mesra Internasional Samarinda, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.



3.3. Air Hujan

3.3.1. Curah Hujan

Tabel 31. Curah Hujan Menurut Stasiun Badan Meteorologi dan Geofisika pada 5 (lima) Kabupaten (mm/thn)

No	Kabupaten	Tahun 2006	Tahun 2007	Kecenderungan
1	Tanjung Selor	214.52	234.90	Naik
2	Kalimara	191.09	253.22	Naik
3	Tarakan	354.54	288.85	Turun
4	Balikpapan	233.85	270.25	Naik
5	Samarinda	162.25	227.33	Naik
Jumlah		1156.25	1274.55	

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim 2007

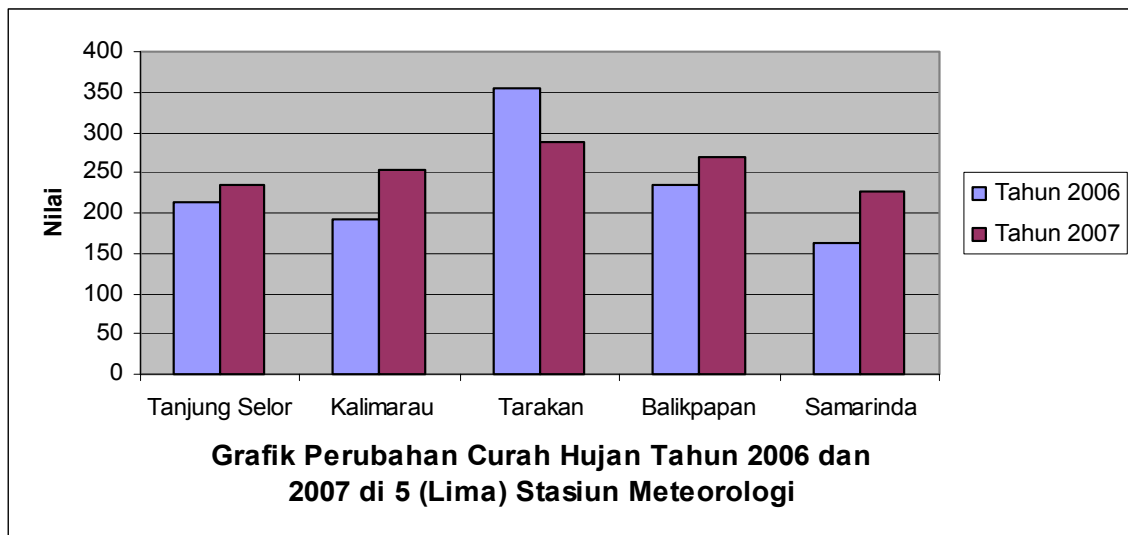
Status :

1. Jumlah curah hujan di Tanjung Selor tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 9.5% dibanding tahun 2006
2. Jumlah curah hujan di Berau tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 32.5% dibanding tahun 2006
3. Jumlah curah hujan di Tarakan tahun 2007 (sampai dengan Oktober) turun 22.7% dibanding tahun 2006
4. Jumlah curah hujan di Balikpapan tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 15.6% dibanding tahun 2006
5. Jumlah curah hujan di Samarinda tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 40.1% dibanding tahun 2006

Pressure : Kondisi alam.

Impact : Perubahan suplai dan penerimaan air pada sistem hidrologi sungai, danau, rawa dan saluran-saluran air.

Respons : Diperlukan pemetaan siklus musim dan disosialisasikan kepada masyarakat.



3.3.2. Jumlah Hari Hujan

Tabel 32. Jumlah Hujan Menurut Stasiun Badan Meteorologi dan geofisika pada 5 (lima) Kabupaten

No	Kabupaten	Tahun 2006	Tahun 2007	Kecenderungan
1	Tanjung Selor	19.42	21.30	Naik
2	Kalimmarau	18.58	20.44	Naik
3	Tarakan	22.83	22.11	Turun
4	Samarinda	16.00	20.56	Naik
Jumlah		76.83	84.41	

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim 2007

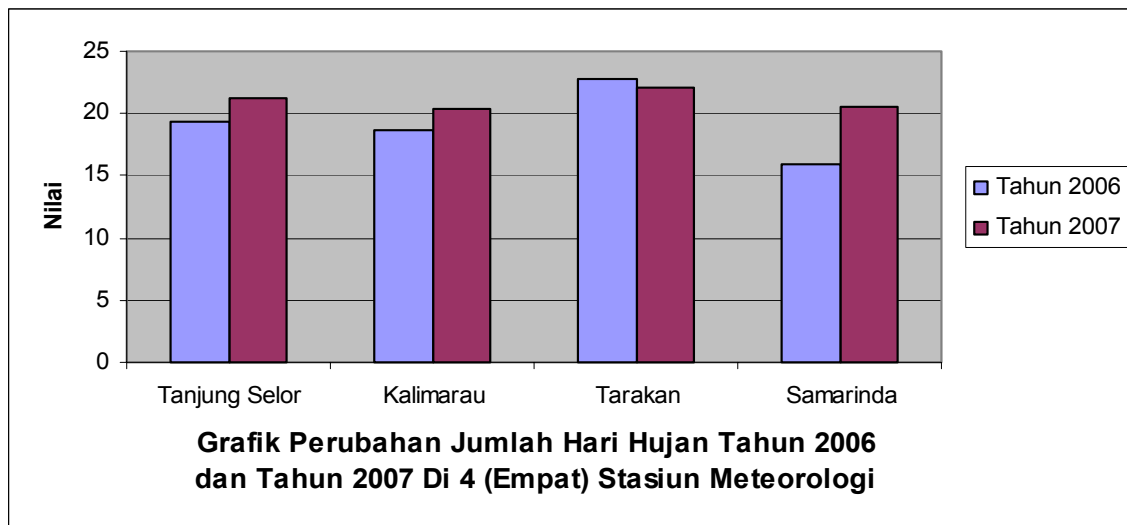
Status :

1. Jumlah Hari hujan di Tanjung Selor tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 9.7% dibanding tahun 2006
2. Jumlah Hari hujan di Berau tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 10% dibanding tahun 2006
3. Jumlah Hari hujan di Tarakan tahun 2007 (sampai dengan Oktober) turun 3.26% dibanding tahun 2006
4. Jumlah Hari hujan di Samarinda tahun 2007 (sampai dengan Oktober) naik 28.51% dibanding tahun 2006

Pressure : Kondisi Alam

Impact : Perubahan panjang penyinaran dan intensitas matahari

Respons : Diperlukan pemetaan siklus musim dan disosialisasikan kepada masyarakat.



BAB IV. UDARA

4.1. Kualitas Udara

4.1.1. Kualitas Udara Emisi PLTU

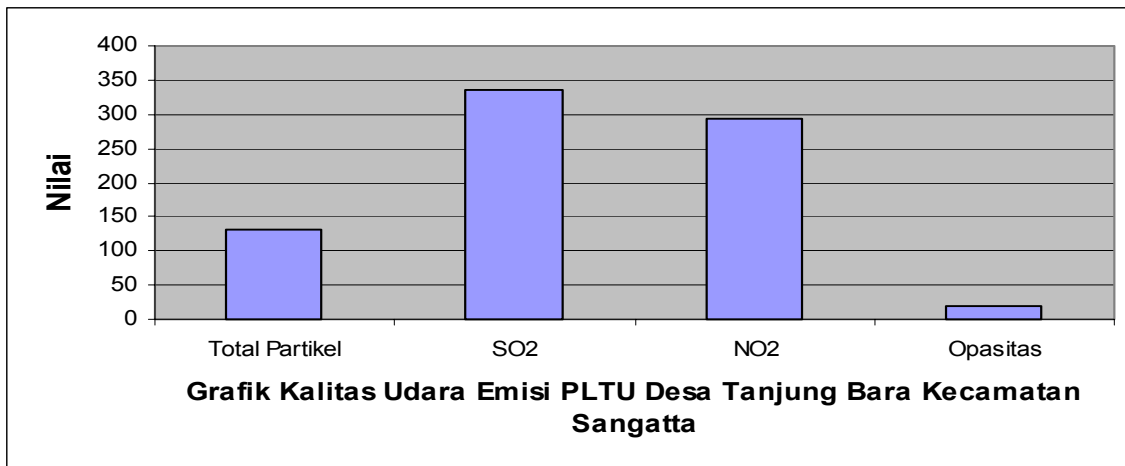
Tabel 33 Kualitas Udara Emisi PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta

Kualitas Udara Emisi PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta				BML
No	Parameter	Satuan	Nilai	
1	Total Partikel	mg/m ³	132.27	350
2	SO ₂	mg/m ³	335	800
3	NO ₂	mg/m ³	292.5	1.000
4	Opasitas	mg/m ³	20%	35%

Sumber : PT. Kaltim Prima Coal, 2007

Keterangan : BM = Baku mutu menurut PP 41 Tahun 1999

- Status** : Semua parameter kunci yang dipantau tidak melebihi ambang batas.
- Pressure** : Sistem pengelolaan limbah oleh pengelola PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik.
- Impact** : Limbah cair PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta yang dibuang ke lingkungan sekitar tidak mencemari, sehingga lingkungan sekitar tetap baik kualitasnya.
- Respons** : Pemeliharaan sistem instalasi pengolahan limbah cair secara berkala oleh pihak pengelola PLTU di Desa Tanjung Bara Sangatta, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.



4.2. Kualitas Udara Ambien

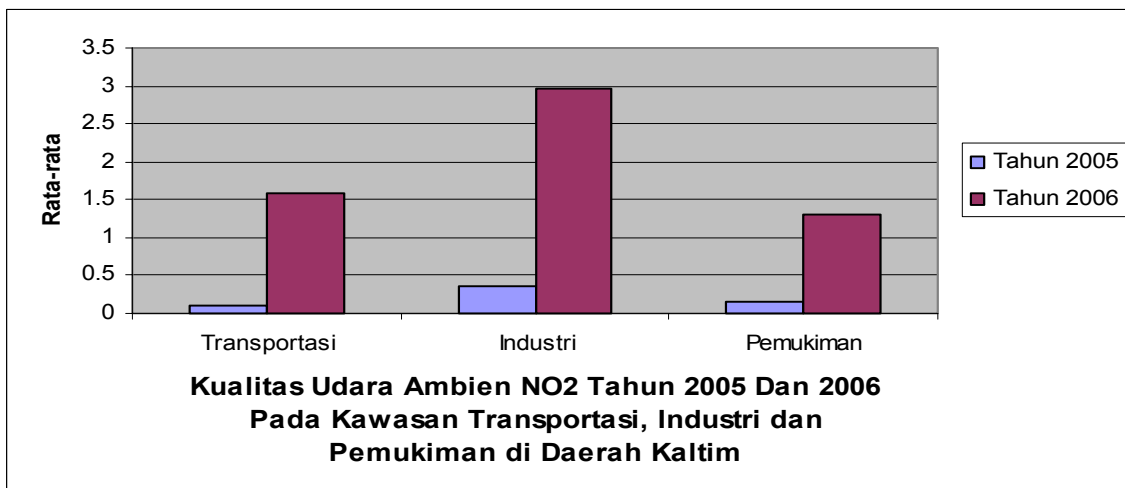
4.2.1. Nitrogen Dioksida (NO₂)

Tabel 34. Kualitas Udara Ambien Parameter NO₂ Pada Beberapa Kawasan

NO	Kawasan	Tahun 2005	Tahun 2006	BM
1	Transportasi	0.104	1.59	400 ug/Nm ³
2	Industri	0.349	2.97	400 ug/Nm ³
3	Pemukiman	0.164	1.31	400 ug/Nm ³

Sumber : Bapedalda Prov. Kaltim, 2007

Keterangan : BM = Baku Mutu menurut PP 41 Tahun 1999



- Status** : Parameter gas NO₂ ambien yang dipantau tidak melebihi ambang batas.
- Pressure** : Sistem pengelolaan emisi gas NO₂ pada sumber emisi, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik terhadap sumber emisi gas NO₂.
- Impact** : Terciptanya kualitas udara ambien dengan kadar gas NO₂ yang memenuhi syarat oleh menurut PP 41 Tahun 1999
- Respons** : Pemeliharaan sistem pengelolaan emisi gas NO₂, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.

4.2.2. Sulfur Dioksida (SO₂)

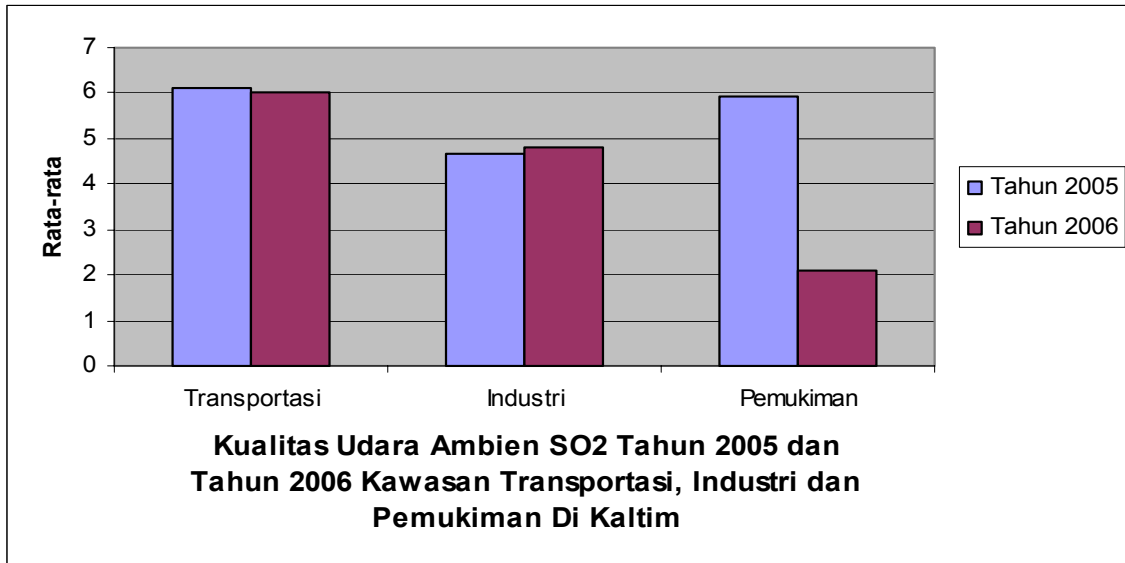
Tabel 34. Kualitas Udara Ambien parameter SO₂ Pada Beberapa Kawasan

NO	Kawasan	Tahun 2005	Tahun 2006	BM
1	Transportasi	6.125	6.01	900 ug/Nm ³
2	Industri	4.69	4.793	900 ug/Nm ³
3	Pemukiman	5.95	2.117	900 ug/Nm ³

Sumber : Bapedalda Prov. Kaltim, 2007

Keterangan : BM = Baku Mutu menurut PP 41 Tahun 1999

- Status** : Parameter gas SO₂ ambien yang dipantau tidak melebihi ambang batas
- Pressure** : Sistem pengelolaan emisi gas SO₂ pada sumber emisi, pengawasan dan pembinaan oleh instansi pemerintah berjalan baik terhadap sumber emisi gas SO₂
- Impact** : Terciptanya kualitas udara dengan kadar gas SO₂ ambien yang memenuhi syarat oleh menurut PP 41 Tahun 1999.
- Respons** : Pemeliharaan sistem pengelolaan emisi gas SO₂, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.



4.2.3. Kualitas Udara Ambien Beberapa Lokasi Pemantauan

Tabel 35. Kualitas Udara Ambien pada Beberapa Kabupaten/Kota di Kaltim Tahun 2007

No	Lokasi	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Waktu/Hasil
1	Simpang Empat Jl. Basuki Rahmad Samarinda	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	0.0378
		CO	(mg/Nm ³)	30	-
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	0.2908
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	0.1039
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.0438
2	Simpang Empat Lembusuana Jl. Dr. Sutomo Samarinda	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	0.0337
		CO	(mg/Nm ³)	30	-
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	0.2625
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	0.1096
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.5175
3	Simpang empat Jl. Sendawar Bontang	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	0.0297
		CO	(mg/Nm ³)	30	-
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	0.2512
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	0.0899
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.0472

Tabel 35. Lanjutan

No	Lokasi	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Waktu/Hasil
4	Simpang Empat Jl. Pupuk Km 6 Bontang	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	0.0419
		CO	(mg/Nm ³)	30	-
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	0.2258
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	0.1011
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.0438
5	Komplek Perumahan Panorama Sangatta	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	8
		CO	(mg/Nm ³)	30	68
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	13
		O ₃	(mg/Nm ³)	-	20
		HC	(mg/Nm ³)	-	1
		PM ₁₀	(mg/Nm ³)	-	57
		PM _{2.5}	(mg/Nm ³)	-	28
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	85
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.1
		Dustfall ton/km ² /bln	(mg/Nm ³)	-	5.1
6	Karang Jawa Balikpapan	SO ₂	(mg/Nm ³)	0.9	2.32
		CO	(mg/Nm ³)	30	47.2
		NO ₂	(mg/Nm ³)	0.4	4.15
		TSP	(mg/Nm ³)	0.23	58.92
		Pb	(mg/Nm ³)	2	0.2

Sumber : Bapedalda Prov. Kaltim, 2007

Keterangan : BM = Baku Mutu menurut PP 41 Tahun 1999

Status :

1. Kualitas udara ambien parameter SO₂, CO, NO₂ dan TSP pada lokasi pemantauan Komplek Perumahan Panorama di Sangatta (Kabupaten Kutai Timur) diatas ambang batas menurut PP 41 Tahun 1999.
2. Kualitas udara ambien parameter SO₂, CO, dan NO₂ pada lokasi pemantauan di Kelurahan Karang Jawa Balikpapan diatas ambang batas menurut PP 41 Tahun 1999.

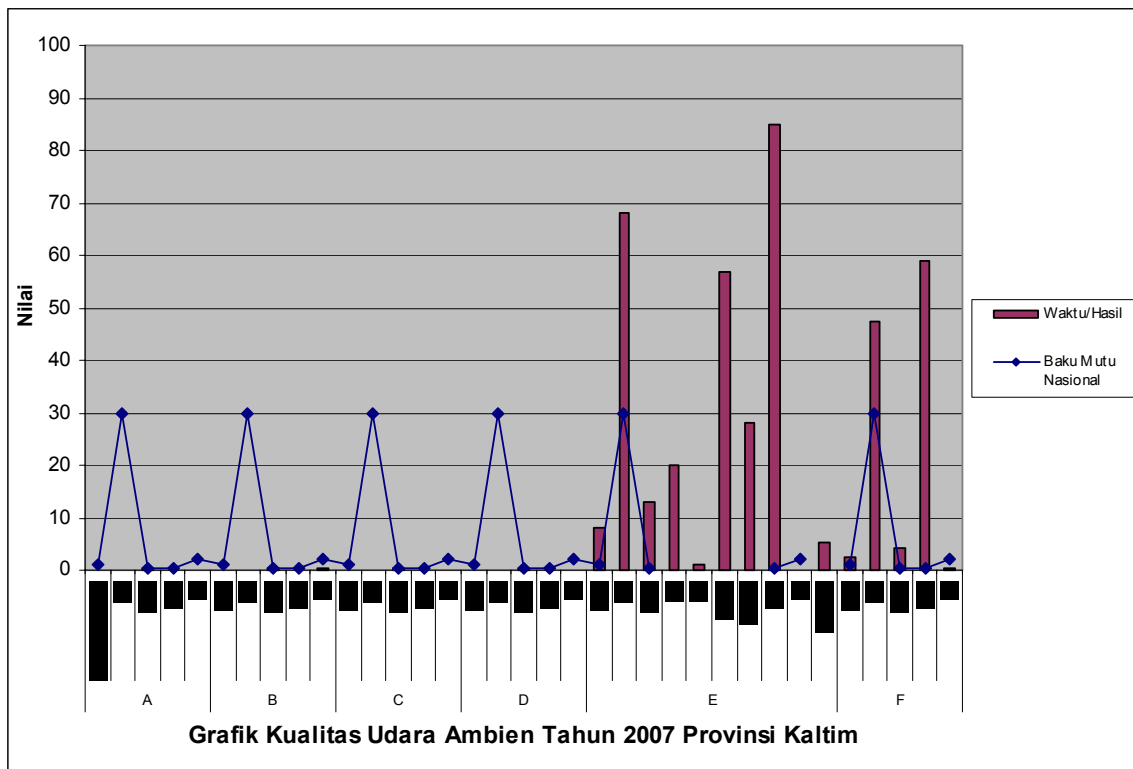
Pressure :

1. Sumber emisi SO₂, CO, NO₂ dan TSP tidak bergerak (Mesin-mesin industri dan kegiatan penambangan PT. Kaltim Prima Coal) untuk pemantauan pada Komplek Perumahan Panorama di Sangatta.

2. Sumber emisi SO₂, CO, NO₂ dan tidak bergerak (Mesin-mesin industri dan kegiatan Pertamina Unit Pengolahan IV) untuk pemantauan pada Kelurahan Karang Jawa Balikpapan.
3. Sumber emisi SO₂, CO, NO₂ dan TSP bergerak untuk pemantauan pada lokasi Komplek Perumahan Panorama di Sangatta dan Kelurahan Karang Jawa Balikpapan.

Impact : Terciptanya kualitas udara dengan kadar gas SO₂, CO, NO₂ dan TSP ambien yang tidak memenuhi syarat oleh menurut PP 41 Tahun 1999.

Respons : Sistem pengelolaan emisi gas SO₂, CO, NO₂ dan TSP dari aktivitas penambangan batubara dan sumber tidak bergerak (mesin-mesin), serta aktivitas transportasi dan sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah belum berhasil menekan kadar emisi gas SO₂, CO, NO₂ dan TSP yang disyaratkan oleh menurut PP 41 tahun 1999.

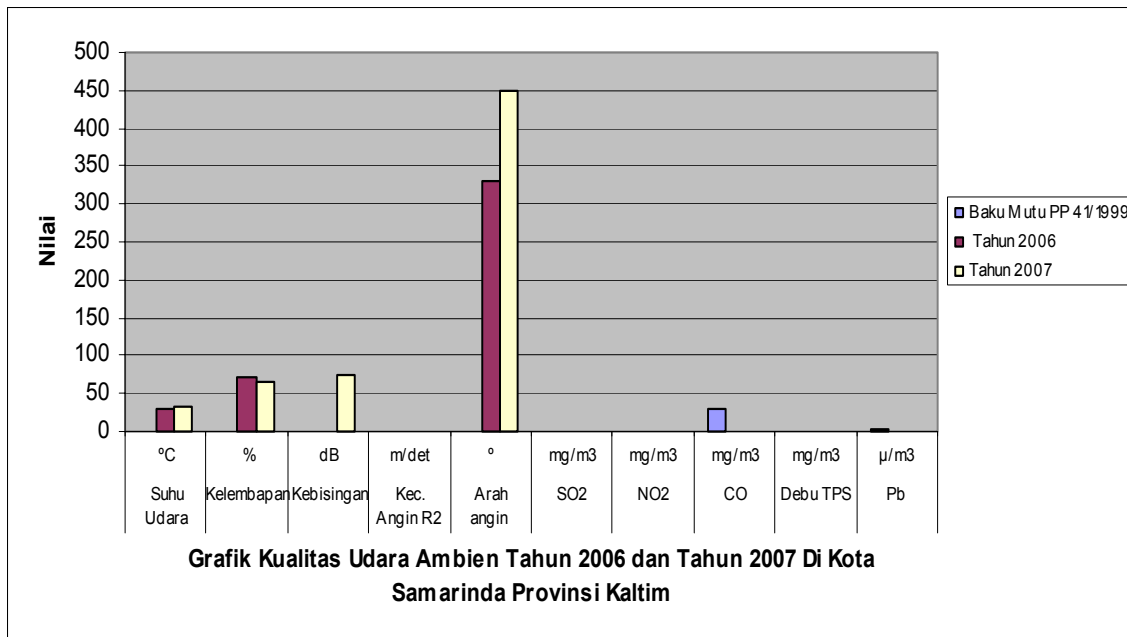


4.2.4. Kualitas Udara Ambien Beberapa Parameter di Kota Samarinda

Tabel 36. Kualitas Udara Ambien di Kota Samarinda Tahun 2007

Parameter	Satuan	Baku Mutu PP 41/1999	Tahun 2006	Tahun 2007	Kecenderungan
Suhu Udara	°C	-	29	34	Naik
Kelembapan	%	-	78	59	Turun
Kebisingan	dB	-	63.9	69.9	Naik
Kec. Angin R2	m/det	-	1.64	1.54	Turun
Arah angin	°	-	230	225	Turun
SO ₂	mg/m ³	0.9	0.0154	0.16945	Naik
NO ₂	mg/m ³	0.4	0.0447	0.2385	Naik
CO	mg/m ³	30	0.6316	No data	=
Debu TPS	mg/m ³	0.23	0.0561	0.0955	Naik
Pb	µ/m ³	2	0.0005	0.0455	Naik

Sumber : Bapedalda Prov. Kaltim, 2007



Status :

1. Parameter gas SO₂, CO, TSP, Pb dan NO₂ ambien yang dipantau tidak melebihi ambang batas
2. Parameter gas SO₂, CO, TSP, Pb dan NO₂ ambien yang dipantau pada tahun 2007 lebih tinggi (cenderung naik) dibanding dengan hasil pemantauan tahun 2006

Pressure : Sistem pengelolaan pada sumber emisi SO₂, CO, TSP, Pb dan NO₂ baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta sistem pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah berhasil menekan kadar emisi gas SO₂, CO, NO₂, TSP dan Pb sehingga memenuhi syarat oleh PP 41 Tahun 1999

Impact : Terciptanya kualitas udara ambien dengan kadar gas SO₂, CO, TSP, Pb dan NO₂ yang memenuhi syarat oleh menurut PP 41 Tahun 1999

Respons : Pemeliharaan sistem pengelolaan emisi gas NO₂, CO, TSP, Pb dan NO₂, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang telah baik, terus dijalankan.

4.2.5. Banyaknya Kendaraan menurut Jenisnya di Kaltim

Tabel 37. Taman Taman Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya Kabupaten / Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2004 dan 2006

No	Kabupaten / Kota	Jenis Kendaraan				Total
		Mobil Penumpang	Mobil Beban	Mobil BUS	Sepeda Motor	
1	2	3	4	5	6	7
Tahun 2004 *						
1.	Balikpapan	0	0	0	0	0
2.	Samarinda	309	1700	866	32246	35121
3.	Bontang	240	171	12	4788	5211
4.	Tarakan	4315	3334	30	40103	47782
5.	Kukar	1397	5045	2041	78213	86696
6.	Pasir	-	-	-	-	0
7.	Berau	1226	1270	35	17564	20095
8.	Bulungan	173	193	16	1434	1816
9.	Kutim	624	383	38	4655	5700
10.	Nunukan	746	283	8	7034	8071
11.	Malinau	69	36	0	698	803
12.	Kubar	0	0	0	0	0
13.	Penajam	0	0	0	0	0
Jumlah		9099	12415	3046	186735	211295
Tahun 2006						
1.	Balikpapan	0	0	0	0	0
2.	Samarinda	419	25560	2389	33266	45.588.12
3.	Bontang	2202	901	72	9369	14.801.92
4.	Tarakan	4445	3409	28	43829	61.018.98
5.	Kukar	1411	5650	2314	89131	116.237.08
6.	Pasir	0	0	0	0	0
7.	Berau	1798	1520	42	22056	24.990.88
8.	Bulungan	200	130	3	2077	2.843.8
9.	Kutim	539	439	35	6661	7674
10.	Nunukan	755	290	8	7792	9.847.1
11.	Malinau	103	56	0	511	790.0
12.	Kubar	5	115	24	4226	5.156.6
13.	Penajam	419	389	66	7220	9.550.42
Jumlah		12296	15459	4981	225638	304.881.32

Sumber : * Ditlantas Polda Provinsi Kalimantan Timur

** Dishub Provinsi Kalimantan Timur

BAB V. LAHAN DAN HUTAN

5.1. Hutan

Status : Luas kawasan hutan dan sumberdaya dalam kawasan hutan mengalami kerusakan besar-besaran

Pressure : Kegiatan HPH, HTI, IUPHHK, perkebunan, pertambangan, *illegal logging*, *illegal Mining*, dan ladang berpindah

Impact : Perubahan iklim mikro, perubahan siklus banjir besar, musnahnya plasma nuftah, menyusutnya sumberdaya hutan pendukung kehidupan masyarakat sekitar hutan,

Respons :

- **Sektor Kehutanan**

- 1). Program pengelolaan hutan lestari oleh pemerintah melalui Tebang Pilih Indonesia (TPI), Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Jalur Tanam Indonesia (TJTI). Program ini tidak berhasil merestorasi hutan produksi Kalimantan Timur.
- 2). Program pemberdayaan masyarakat melalui program PMDH (Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan). Program ini tidak berhasil memberdayakan masyarakat, karena orientasi pengusaha HPH hanya pada profit maksimum.
- 3). Kebijakan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) oleh pemerintah. Kebijakan ini banyak disalahgunakan oleh pemegang IPK.

- **Sektor Pertambangan Batubara**

- 1). Program Proper Batubara. Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper ini dicanangkan oleh pusat dan juga oleh Pemda Provinsi Kaltim. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.
- 2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang yang dicanangkan oleh Pemda Kaltim melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Kaltim. Program ini hanya mengumpulkan data tentang reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang yang sedang berjalan. Tidak ada tindak lanjut pembinaan.

- **Sektor Perkebunan**

- 1). Kebijakan pembangunan perkebunan sawit 2 juta ha, berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
- 2). Orientasi pengembangan perkebunan sawit skala besar (swasta/pengusaha) banyak menyita lahan hutan.
- 3). Perbanyak perkebunan sawit rakyat, akan banyak memanfaatkan lahan bukan hutan.

- **Kebakaran Hutan**

- 1). TUPOKSI dalam hal pencegahan, mitigasi, mengendalikan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan hanya pada Dinas Kehutanan, kurang dapat menangani kejadian kebakaran hutan dan lahan
- 2). Perberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak disertai dengan sarana dan prasarana

- ***Illegal logging dan illegal mining***

- 1). Penanganan dan sanksi bagi pelaku *Illegal logging* dan *illegal mining* tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku.

- **Ladang berpindah**

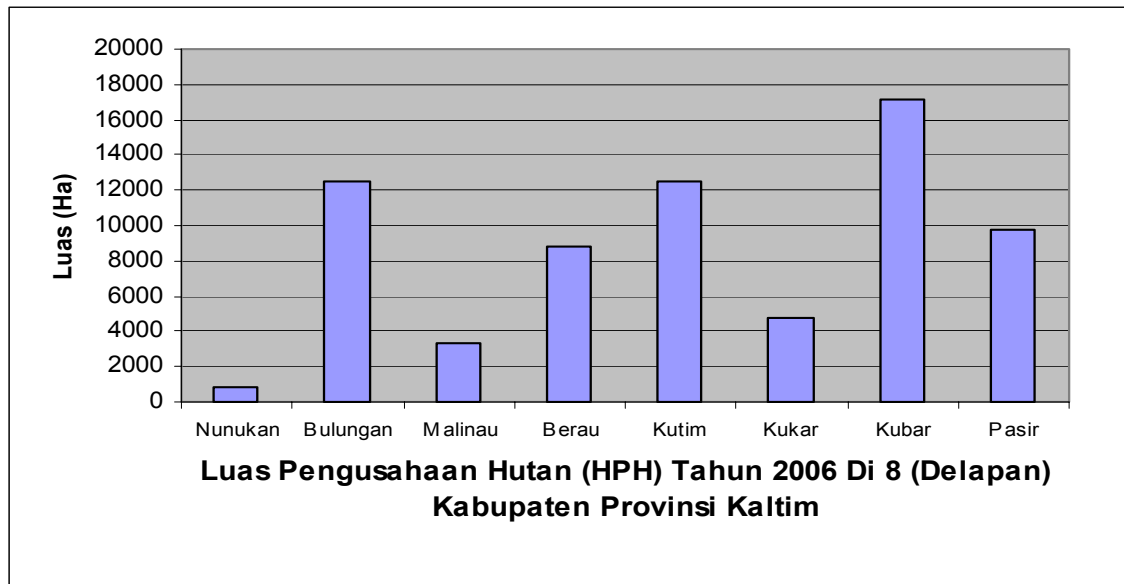
- 1). Tidak ada pembinaan tentang pola pertanian dengan sisten Agroforestry

5.1.1. Luas Penguasaan Hutan Oleh HPH Tahun 2006

Tabel 38. Luas Penguasaan Hutan oleh HPH pada 8 Kabupaten Provinsi Kaltim sampai Tahun 2006

Luas Penguasaan Hutan (HPH) 8 Kabupaten Provinsi Kaltim		
No	Kabupaten	Luas (Ha)
1.	Nunukan	780
2.	Bulungan	12.452,99
3.	Malinau	3.300,9
4.	Berau	8.771,81
5.	Kutim	12.499,75
6.	Kukar	4.816,04
7.	Kubar	17.200,15
8.	Pasir	9.758,9
Jumlah		69.580,52

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007

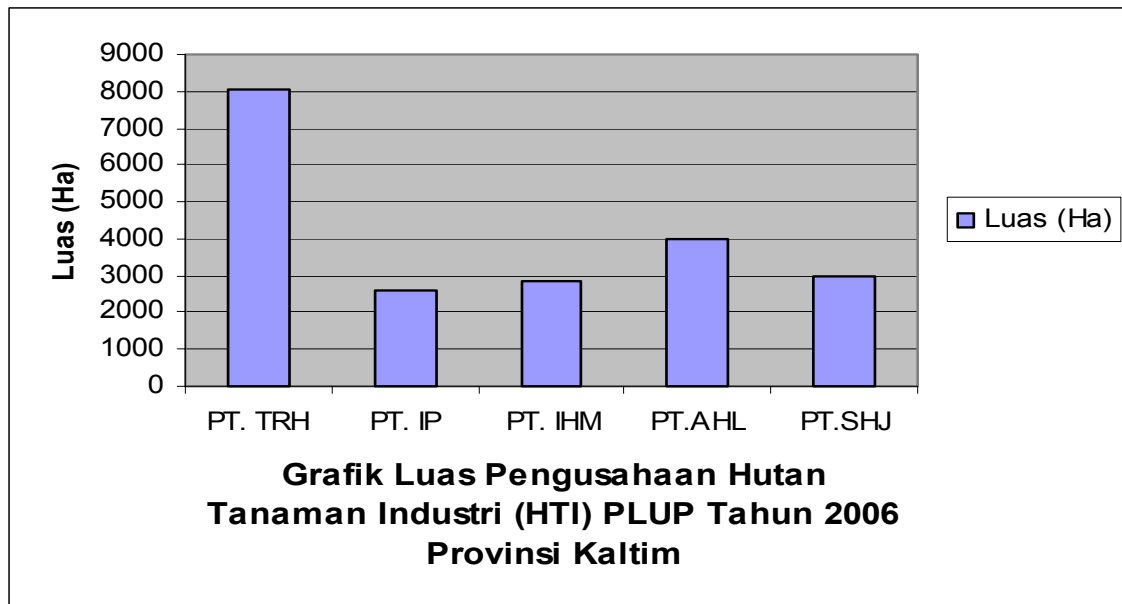


5.1.2. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Tahun 2006

Tabel 39. Luas Penguasaan Hutan oleh HTI di Provinsi Kaltim Tahun 2006

Luas Penguasaan Hutan Tanama Industri (HTI) PULP		
No	Perusahaan	Luas (Ha)
1.	PT. TRH	8.040.23
2.	PT. IP	2.611
3.	PT. IHM	2.866.3
4.	PT.AHL	4.000
5.	PT.SHJ	2.990.4
Jumlah		20.507,93

Sumber : Pembinaan Hutan Dishut Provinsi Kaltim, 2006



Keterangan :

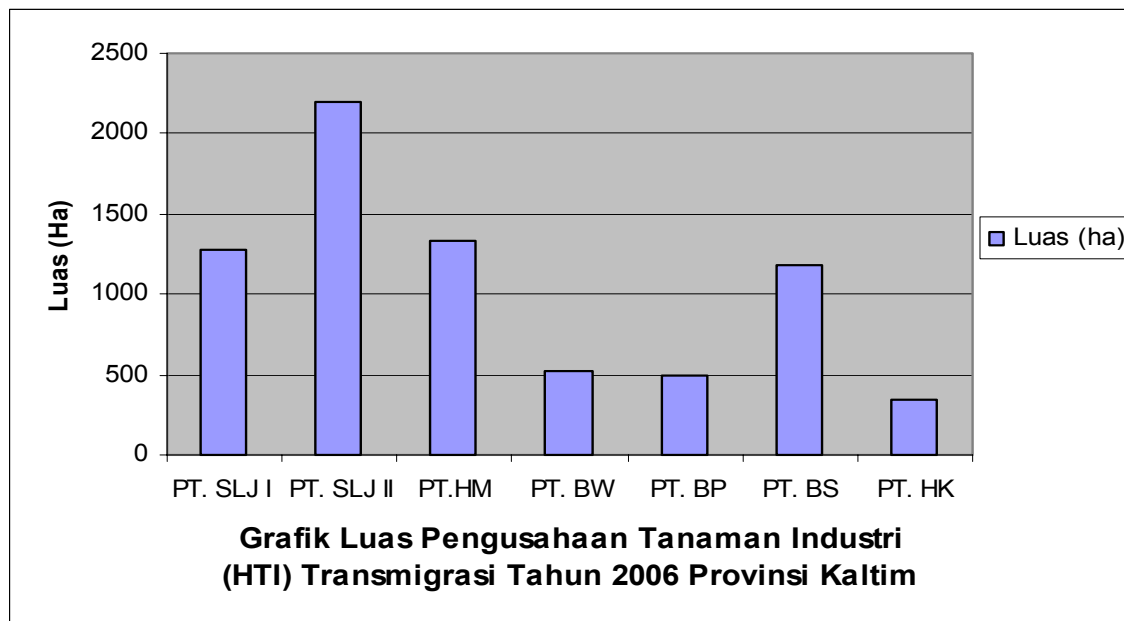
- 1. PT. TRH : PT. Tanjung Redeb Hutani
- 2. PT. IP : PT. Inhutani I Pimping
- 3. PT. IHM : PT. ITCI Hutani Manunggal
- 4. PT. AHL : PT. Adindo Hutani Lestari
- 5. PT. SHJ : PT. Surya Hutani Jaya

5.1.3. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Transmigrasi Tahun 2006

Tabel 40. Luas Penguasaan Hutan oleh HTI di Provinsi Kaltim Tahun 2006

Luas Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Transmigrasi		
No	Perusahaan	Luas (ha)
1.	PT. SLJ I	1.280
2.	PT. SLJ II	2.200
3.	PT.HM	1.330
4.	PT. BW	521
5.	PT. BP	500
6.	PT. BS	1.186,28
7.	PT. HK	350
Jumlah		7.367,28

Sumber : Pembinaan Hutan Dishut Provinsi Kaltim, 2006



Keterangan :

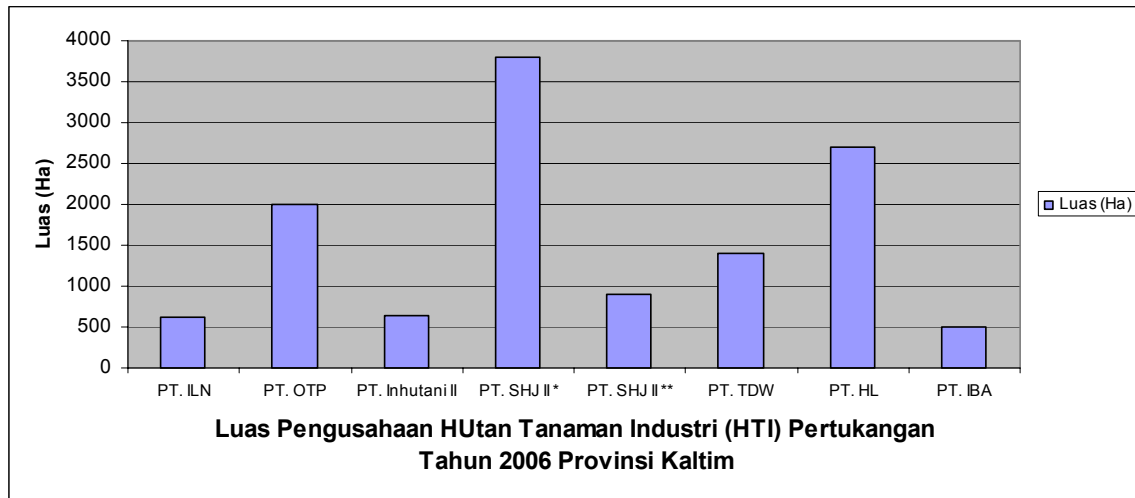
- 1. PT. SLJ I : PT. Sumalindo Lestari Jaya I Batu Putih
- 2. PT. SLJ II : PT. Sumalindo Lestari Jaya II Muara Kaman
- 3. PT. HM : PT. Hutan Mahligai
- 4. PT. BW : PT. Bhineka Wine
- 5. PT. BP : PT. Belantara Pustaka
- 6. PT. BS : PT. Belantara Subur
- 7. PT. HK : PT. Hutan Kesuma

5.1.4. Luas Penguasaan Hutan Oleh HTI Pertukangan Tahun 2006

Tabel 41. Luas Penguasaan Hutan oleh HTI Pertukangan di Provinsi Kaltim Tahun 2006

Luas Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) Pertukangan		
No	Perusahaan	Luas (Ha)
1	PT. ILN	625
2	PT. OTP	2.000
3	PT. Inhutani II	650
4	PT. SHJ II *	3.800
5	PT. SHJ II **	900
6	PT. TDW	1.400
7	PT. HL	2.707
8	PT. IBA	500
Jumlah		12.582

Sumber : Pembinaan Hutan Dishut Provinsi Kaltim, 2006



Keterangan :

1. PT. ILN : Pt Inhutani Log Nas
2. PT. OTP : PT. Oceanis Timber Product
3. PT. Inhutani II : PT. Inhutani II Tanah Grogot
4. PT. SHJ II * : PT. Sumalindo Hutan Jaya II S. Mao
5. PT. SHJ II ** : PT. Sumalindo Hutan Jaya II S. Pesab
6. PT. TDW : PT. Taman Danlat Wananusa
7. PT. HL :Hutani Lestari
8. PT. IBA : PT. Inhutani I Batu ampar

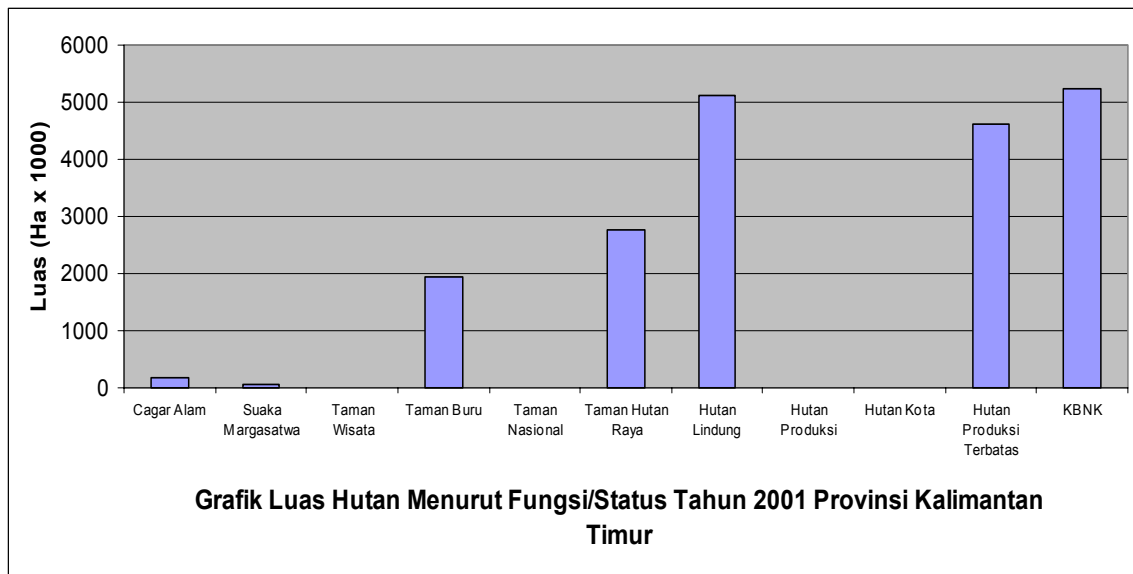
5.1.5. Luas Hutan Menurut Fungsi

Tabel 42. Luas Hutan Menurut Fungsi Status

Luas Hutan Menurut Fungsi Status Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001		
No	Hutan	Luas (Ha) x 1000
1	Cagar Alam	173.272
2	Suaka Margasatwa	61.85
3	Taman Wisata	-
4	Taman Buru	1930.076
5	Taman Nasional	-
6	Taman Hutan Raya	2751.702
7	Hutan Lindung	5121.688
8	Hutan Produksi	-
9	Hutan Kota	-
10	Hutan Produksi Terbatas	4612.965
J u m l a h (KBK)		192.993,581
11	KBNK	5243.3

Sumber : Badan Planologi Kehutanan (2001) (SK Menhut No. 74/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001.

Keterangan : - = Tidak ada data

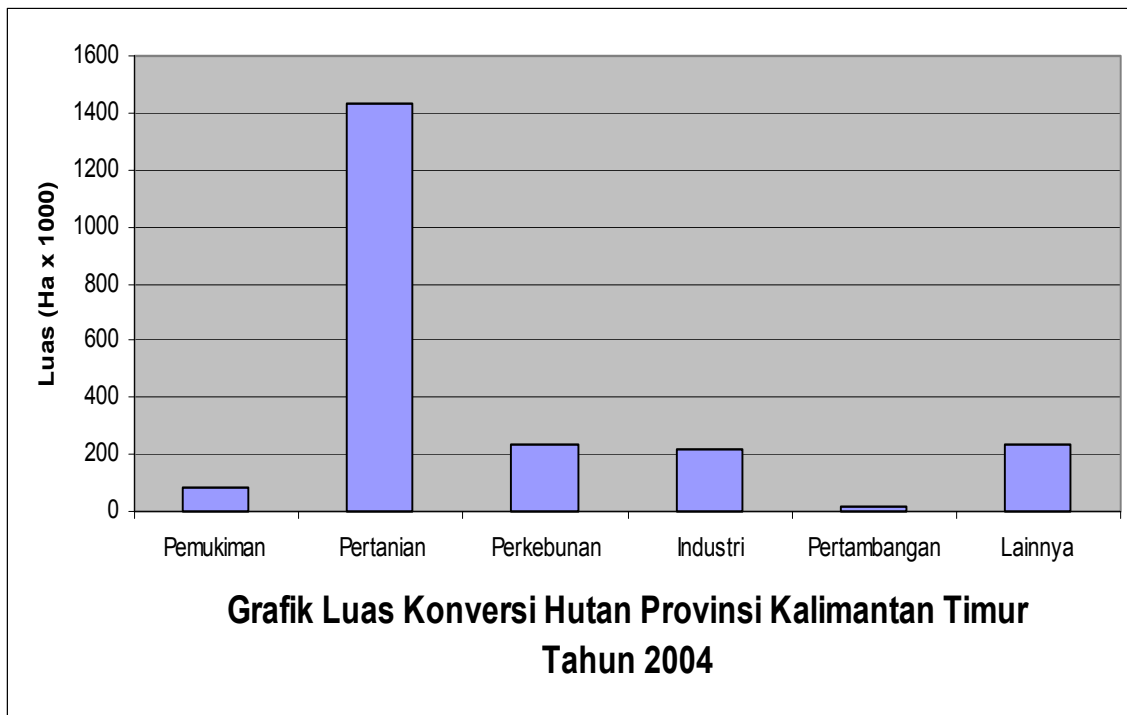


5.1.6. Luas Konversi Hutan

Tabel 43. Luas Konversi hutan Tahun 2004

Luas Koversi Hutan Tahun 2004		
No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Pemukiman	82.321
2	Pertanian	1429.954
3	Perkebunan	238.067
4	Industri	217.615
5	Pertambangan	17.279
6	Lainnya	233.944
J u m l a h		2.219,18

Sumber : Peta Liputan Lahan Hasil Interpretasi Landsat (tahun 2004)



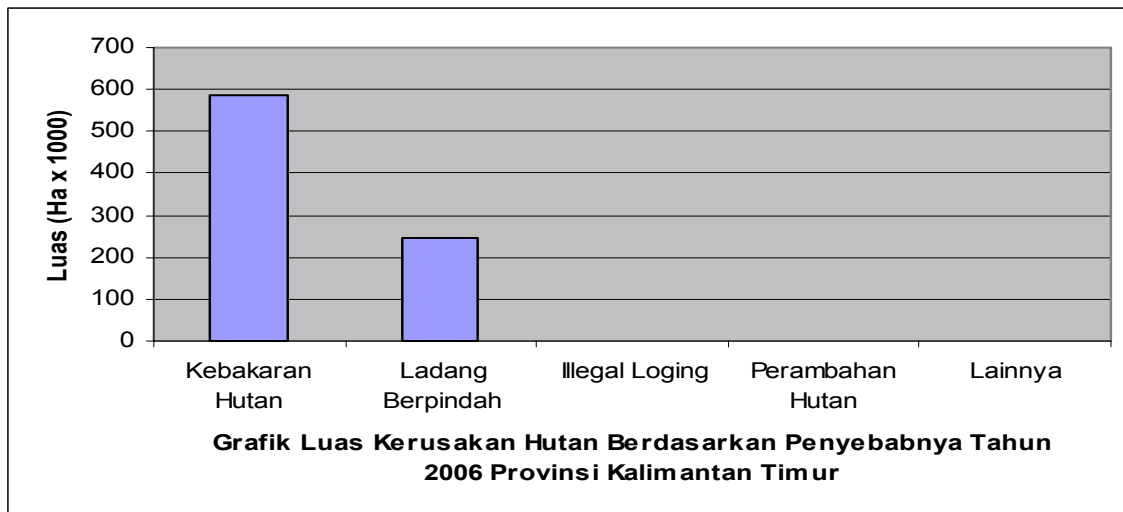
5.1.7. Luas Kerusakan Hutan

Tabel 44. Luas Kerusakan Hutan Tahun 2006

Luas Kerusakan Hutan Berdasarkan Penyebabnya		
No	Penyebab Kerusakan	Luas (Ha)
1	Kebakaran Hutan	588.1
2	Ladang Berpindah	243.6
3	Illegal Logging	-
4	Perambahan Hutan	-
5	Lainnya	-
Jumlah		831.7

Sumber : UPTD PKHL Tahun 2006

Keterangan : - = Tidak ada data



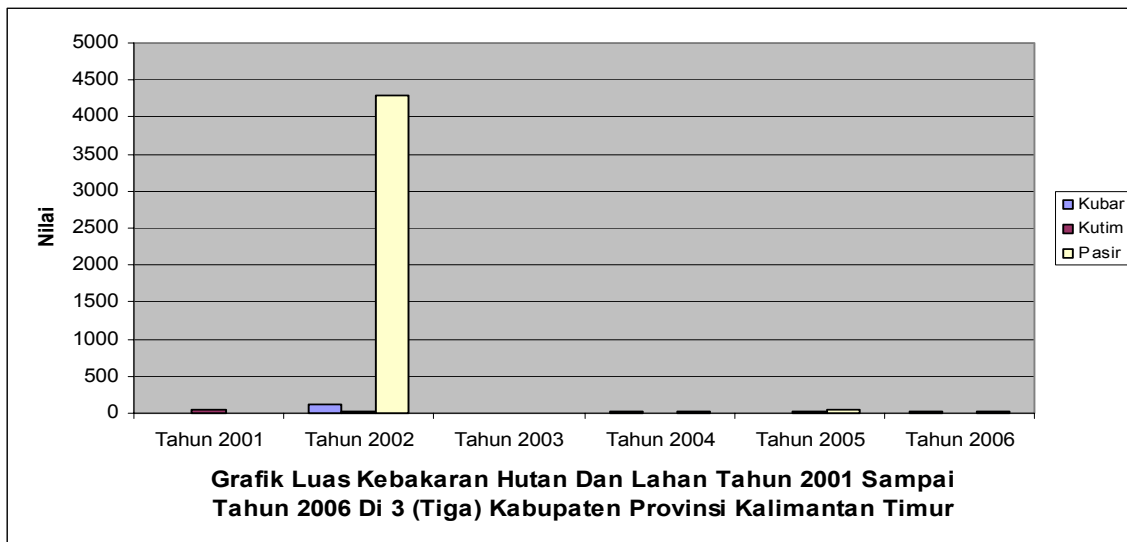
5.1.8. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan

Tabel 45. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2001 - 2006

Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2001 - 2006				
No	Tahun	Kubar	Kutim	Pasir
1	Tahun 2001	-	43.15	-
2	Tahun 2002	114.7	18.5	4292.8
3	Tahun 2003	0.5	-	5
4	Tahun 2004	33.3	-	20
5	Tahun 2005	-	30	38
6	Tahun 2006	12	-	21
Jumlah		160.5	91.65	4.376,8

Sumber : Hormansyah, 2007. Thesis S2 Lingkungan Samarinda

Keterangan : - = Tidak ada data



5.1.9. Rekapitulasi Penggunaan Hutan

Tabel 46. Luas Penggunaan Hutan dan Kebakaran Hutan Sampai Tahun 2006

Luas Kerusakan Hutan Berdasarkan Penyebabnya		
No	Penggunaan Hutan	Luas (Ha)
1	HPH	69.580,52
2	HTI Pulp	20.507,93
3	HTI Transmigrasi	7.367,28
4	HTI Pertukangan	12.582
5	Konversi	2.219,18
6	Ladang Berpindah	243,6
7	Kebakaran Hutan	4.628,95
Jumlah		117.126,46

5.2. Lahan

Status : Luas lahan kritis mencapai 1.530.466,25 ha

1. Sangat kritis : 4.062,50 ha,
2. Kritis : 170.017,75 ha,
3. Agak kritis : 1.170.167,25 ha
4. Potensial kritis : 186.218,75 ha

Pressure :

1. Kegiatan HPH, HTI, IUPHHK, perkebunan, pertambangan, *illegal logging*, *illegal Mining*, dan ladang berpindah.
2. Laju deforestasi tidak dapat diimbangi oleh suksesi alami, reboisasi dan penghijauan.

Impact :

1. Kerusakan kesuburan lahan
2. Terjadi erosi pada lahan dan sedimentasi perairan

Respons :

- **Sektor Kehutanan**

- 1). Laju reboisasi sangat tidak seimbang dengan laju deforestasi
- 2). Laju penghijauan sangat tidak seimbang dengan pembabatan vegetasi
- 3). Kegiatan reboisasi dan penghijauan tidak tumbuh dari keinginan masyarakat

- **Sektor Pertambangan Batu Bara**

- 1). Program Proper Batubara. Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper ini dicanangkan oleh pusat dan juga oleh Pemda Provinsi Kaltim. Kelemahannya adalah tidak ada sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.
- 2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang yang dicanangkan oleh Pemda Kaltim melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim. Program ini hanya mengumpulkan data tentang reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada perusahaan tambang yang sedang berjalan. Tidak ada tindak lanjut pembinaan.

- **Sektor Perkebunan**

- 1). Ijin pembangunan perkebunan sawit lebih banyak pada lahan-lahan subur.
- 2). Orientasi pengembangan perkebunan sawit skala besar (swasta/pengusaha) banyak menyita lahan hutan.
- 3). Pengembangan perkebunan sawit rakyat, tidak banyak dilakukan pemerintah.

- **Kebakaran lahan**

- 1). TUPOKSI dalam hal pencegahan, mitigasi, mengendalikan dan pemadaman kebakaran lahan tidak ada pada Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Bapedalda di kabupaten.
- 2). Perberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak disertai dengan sarana dan prasarana

- **Illegal logging dan illegal mining**

- 1). Penanganan dan sanksi bagi pelaku *Illegal logging* dan *illegal mining* tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku.

- **Ladang berpindah**

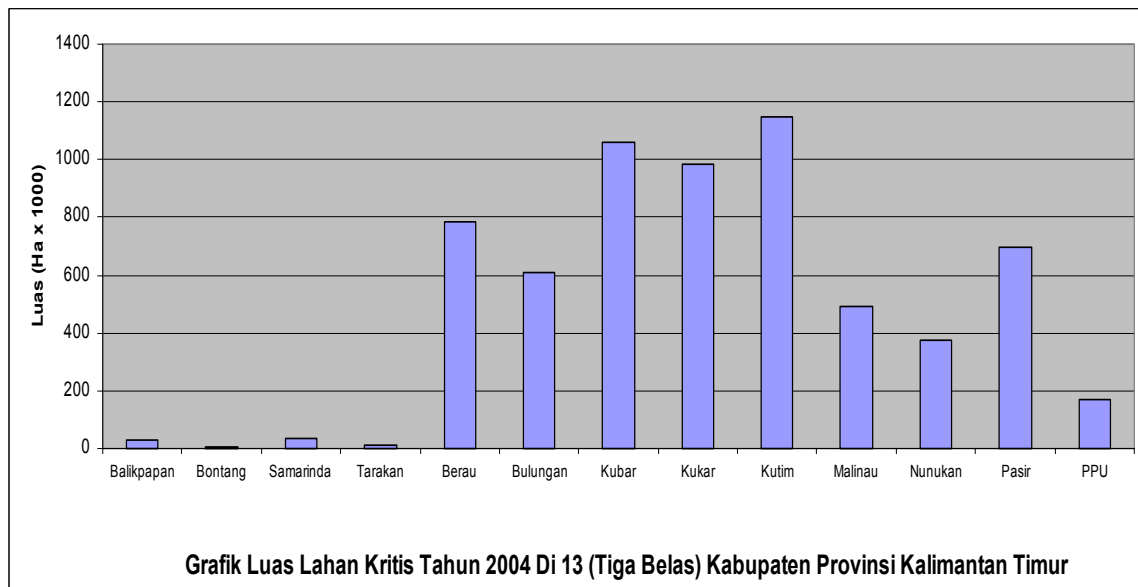
- 1). Tidak ada pembinaan tentang pola pertanian dengan sisten Agroforestry.

5.2.1. Luas Lahan Kritis

Tabel 47. Luas Lahan Kritis pada 13 Kabupetan/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2004

Luas Lahan Kritis		
No	Lokasi	Luas (Ha)
1	Balikpapan	28.350
2	Bontang	6.182
3	Samarinda	32.705
4	Tarakan	10.017
5	Berau	782.300
6	Bulungan	611.523
7	Kutai Barat	1 061.777
8	Kutai Kartanegara	983.581
9	Kutai Timur	1 150.266
10	Malinau	491.528
11	Nunukan	377.294
12	Pasir	698.416
13	Penajam Pasir Utara	168.597
J u m l a h		6.402,536

Sumber : BPDAS Mahakam Berau 2004



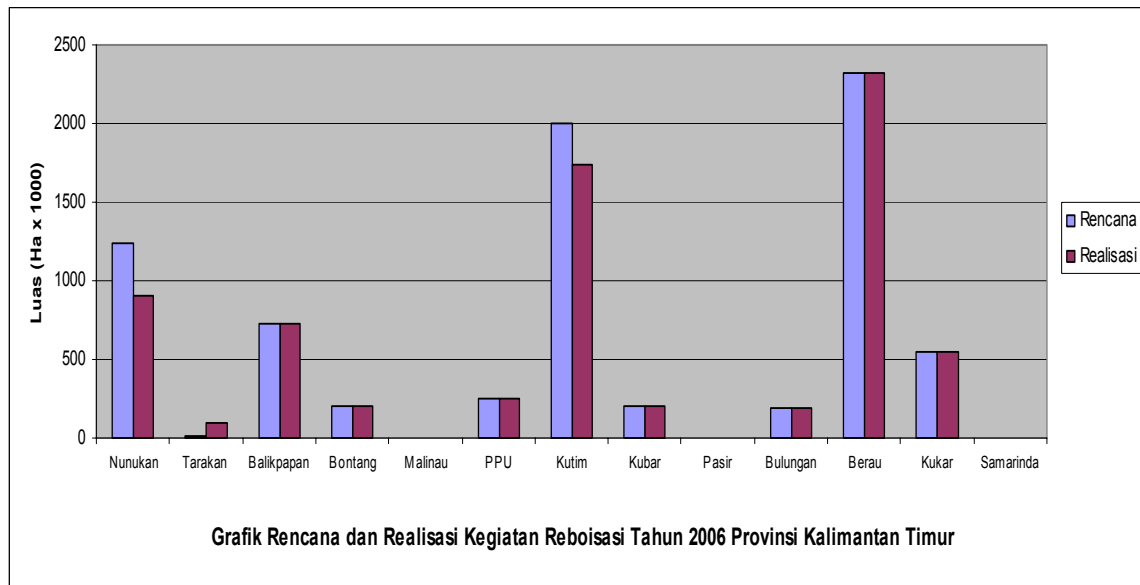
5.2.2. Rencana Reboisasi

Tabel 48. Luas Rencana dan Realisasi Kegiatan Reboisasi Pada 13 Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006

Rencana Dan Realisasi Kegiatan Reboisasi (ha)			
No	Lokasi	Rencana	Realisasi
1	Nunukan	1240	910
2	Tarakan	100	100
3	Balikpapan	730	730
4	Bontang	200	200
5	Malinau	-	-
6	PPU	250	250
7	Kutim	2000	1740
8	Kubar	200	200
9	Pasir	-	-
10	Bulungan	194	194
11	Berau	2318	2318
12	Kukar	553	553
13	Samarinda	-	-
Jumlah		7.785,0	7.195,0

Sumber : Kab/Kota Se-Kaltim dalam Bapedalda Provinsi Kaltim 2006

Keterangan : - = Tidak ada data



5.2.3. Rencana Penghijauan

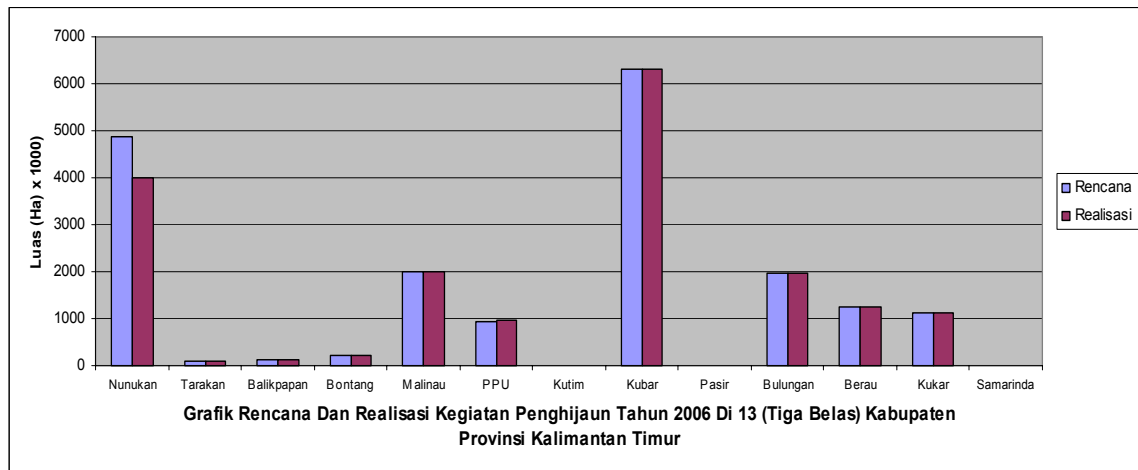
Tabel 49. Luas Rencana dan Realisasi Lahan Penghijauan Pada 13 Kabupetan/ Kota di Kalimantan Timur Tahun 2006 (ha)

Lokasi	Rencana	Realisasi
Nunukan	4861	4011.5
Tarakan	83.38	83.38
Balikpapan	130	130
Bontang	209	209
Malinau	2000	2000
Penajam Paser Utara	946	964
Kutai Timur	-	-
Kutai Barat	6305	6305
Pasir	-	-
Bulungan	1970	1970
Berau	1235	1235
Kutai Kartanegara	1135	1135
Samarinda	-	-
Jumlah	18.892,38	18.042,88

Sumber : Kab/Kota Se-Kaltim dalam Bapedalda Provinsi Kaltim 2006

Keterangan : - = Tidak ada data

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur



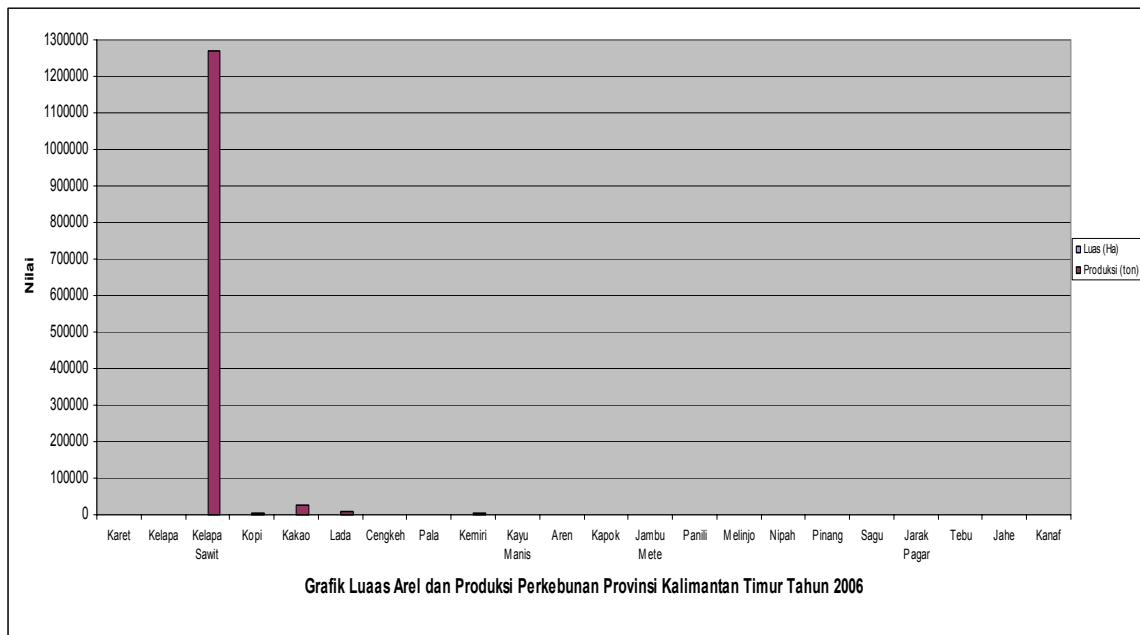
5.2.4. Luas Areal Perkebunan

Tabel 50. Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2006

Luas Areal dan Produksi Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Timur			
No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (ton)
1	Karet	64.957	43.845
2	Kelapa	47.808	44.11
3	Kelapa Sawit	225.337	1268600
4	Kopi	17.469	4613
5	Kakao	41.413	26774
6	Lada	14.769	9959
7	Cengkeh	252	20
8	Pala	24	3
9	Kemiri	5.121	2281
10	Kayu Manis	197	47
11	Aren	1.351	836
12	Kapok	423	148
13	Jambu Mete	163	29
14	Panili	257	5
15	Melinjo	155	54
16	Nipah	77	45
17	Pinang	61	8
18	Sagu	15	6
19	Jarak Pagar	424	0
20	Tebu	43	10
21	Jahe	408	975
22	Kanaf	30	51
Jumlah		4.296,874	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

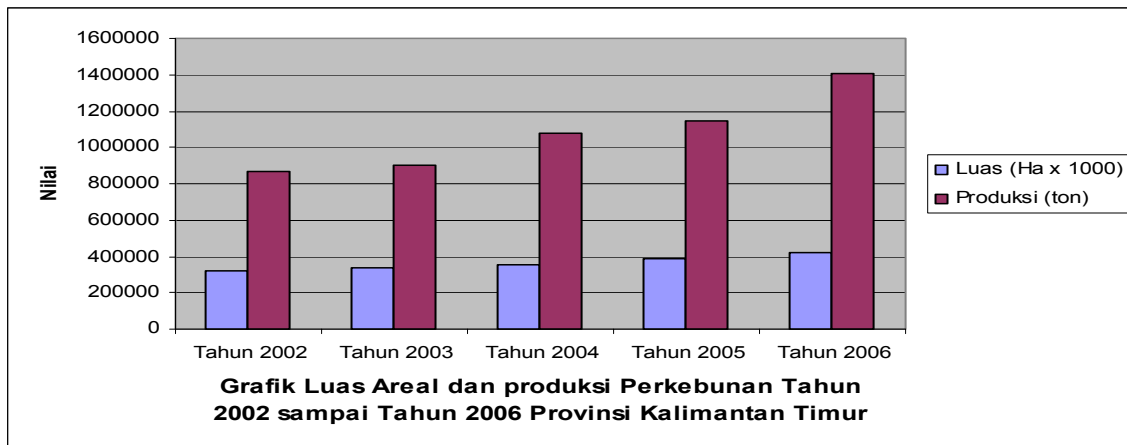


5.2.5. Luas Areal Perkebunan Mulai Tahun 2002 Sampai Tahun 2006

Tabel 51. Luas Areal Perkebunan di Kalimantan Timur Tahun 2002 - 2006

Total Luas Areal dan Produksi Perkebunan Tahun 2002 sampai Tahun 2006 Provinsi Kalimantan timur			
No	Tahun	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	2002	315.802	871.082
2	2003	339.047	902.424
3	2004	351.128	1.081.553
4	2005	385.674	1.143.260
5	2006	420.751	1.402.417
Jumlah		1.812.402	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

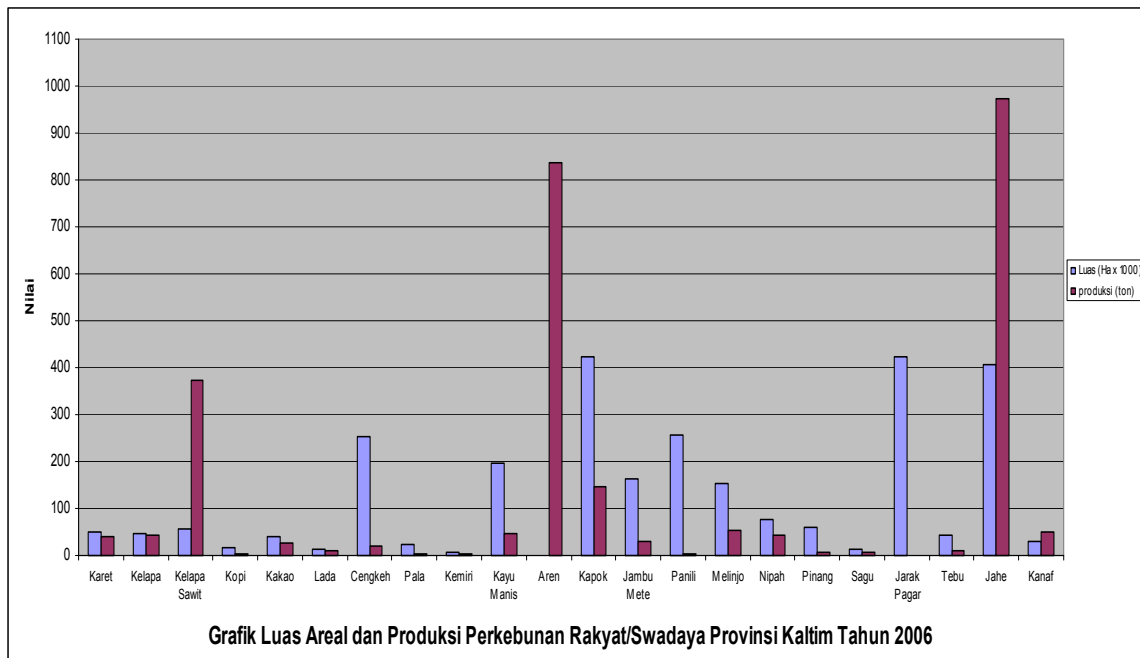


5.2.6. Luas Areal Perkebunan Rakyat

Tabel 52. Luas Areal Perkebunan Rakyat di Kalimantan Timur Tahun 2006

Luas Areal Dan Produksi Perkebunan Rakyat/Swadaya Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006			
No	Komoditi	Luas (Ha x 1000)	produksi (ton)
1	Karet	50.981	39.228
2	Kelapa	47.808	44.112
3	Kelapa Sawit	55.748	374.002
4	Kopi	17.469	4.613
5	Kakao	41.212	26.774
6	Lada	14.769	9.959
7	Cengkeh	252	20
8	Pala	24	3
9	Kemiri	5.121	2.281
10	Kayu Manis	197	47
11	Aren	1.351	836
12	Kapok	423	148
13	Jambu Mete	163	29
14	Panili	257	5
15	Melinjo	155	54
16	Nipah	77	45
17	Pinang	61	8
18	Sagu	15	6
19	Jarak Pagar	424	0
20	Tebu	43	10
21	Jahe	408	975
22	Kanaf	30	51
Jumlah		236.989,0	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

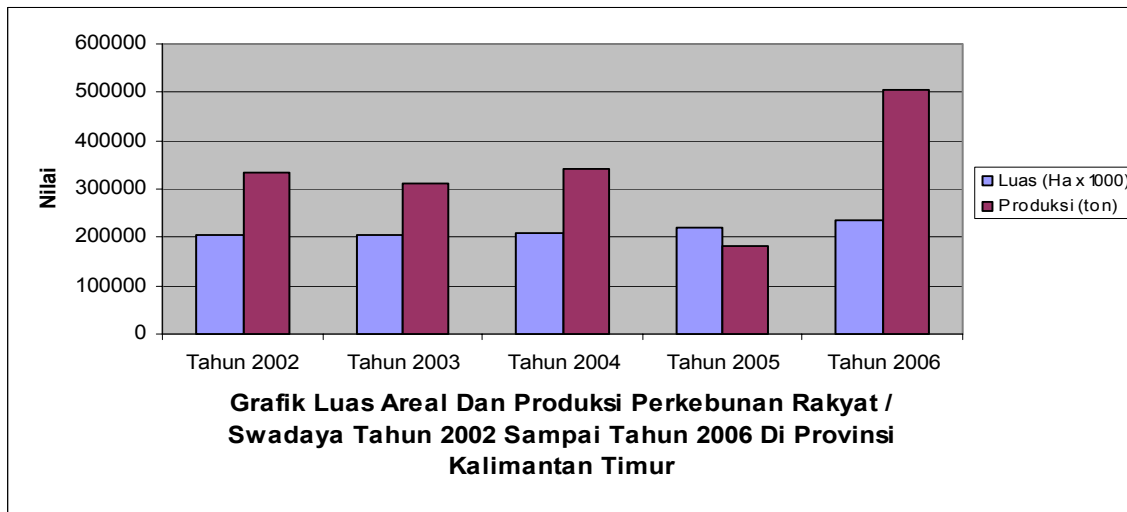


5.2.7. Luas Areal Perkebunan Rakyat Sejak Tahun 2002 – Tahun 2006

Tabel 53. Luas Areal Perkebunan Rakyat di Kalimantan Timur Tahun 2002 - 2006

Luas areal Dan Produksi Perkebunan Tahun 2002 sampai Tahun 2006 Provinsi Kalimantan Timur			
No	Tahun	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	2002	204.661	332.855
2	2003	206.165	311.055
3	2004	209.335	342.097
4	2005	222.025	180.608
5	2006	236.985	503.201
Jumlah		1.079.171,0	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

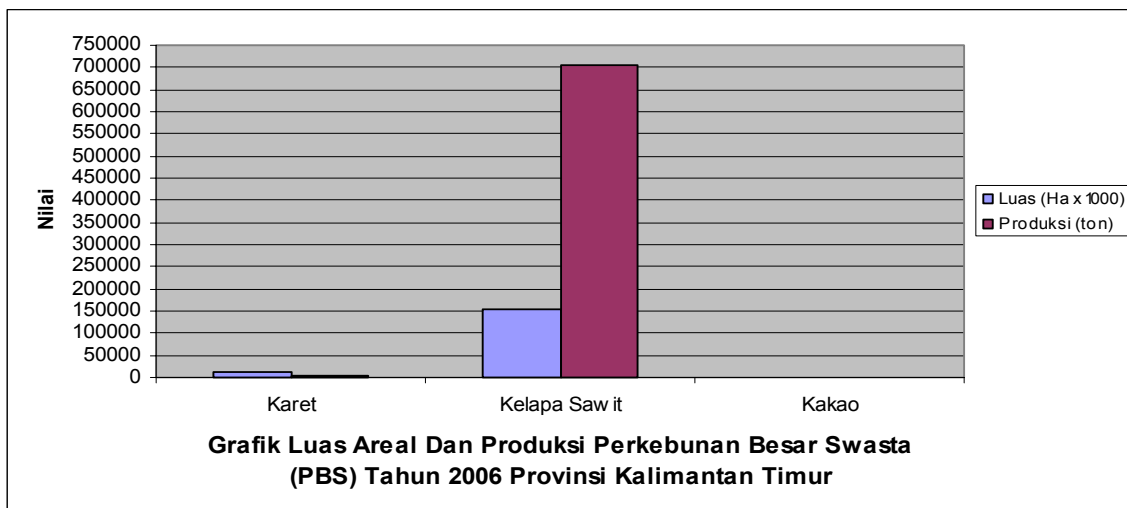


5.2.8. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta

Tabel 54. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta di Kalimantan Timur Tahun 2006

Luas areal Dan Produksi Perkebunan Besar Swasta (PBS) Provinsi Kalimantan Timur			
No	Komoditi	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	Karet	11.727	3.810
2	Kelapa Sawit	156.038	707.372
3	Kakao	201	0
Jumlah		167.966	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

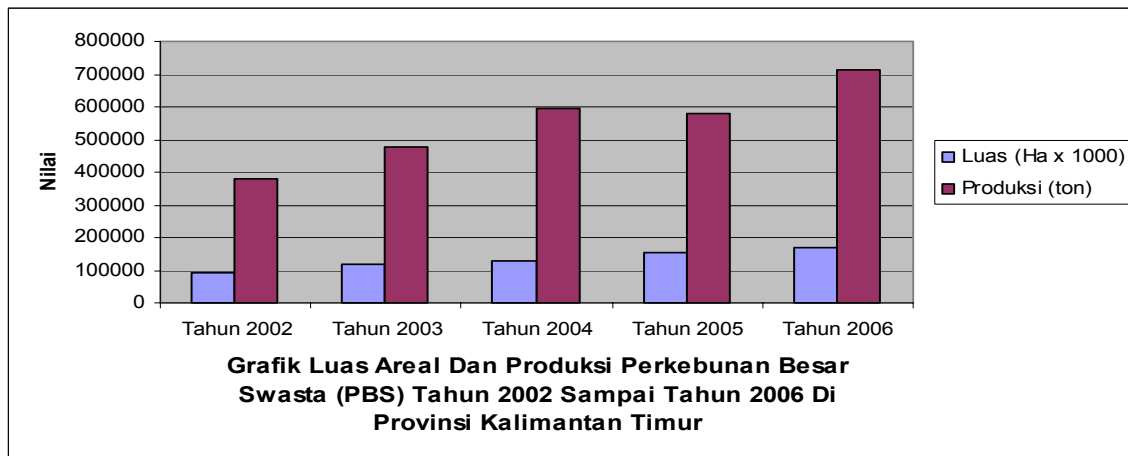


5.2.9. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta

Tabel 55. Luas Areal Perkebunan Besar Swasta di Kalimantan Timur Tahun 2006

No	Tahun	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	Tahun 2002	93.880	381.359
2	Tahun 2003	117.082	479.201
3	Tahun 2004	125.993	595.766
4	Tahun 2005	151.540	577.512
5	Tahun 2006	167.966	711.181
J u m l a h		656.381	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007



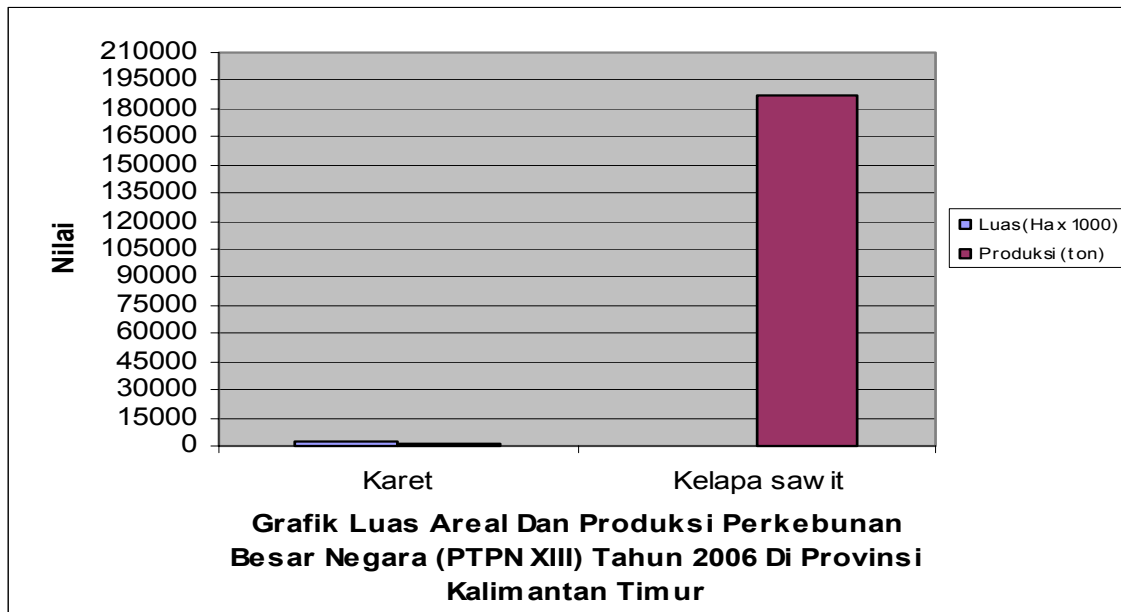
5.2.10. Luas Areal Perkebunan Besar Negara

5.2.10.1. Komoditi Karet dan Kelapa Sawit

Tabel 56. Luas Areal Perkebunan Besar Negara di Kalimantan Timur Tahun 2006

Luas Areal Dan Produksi perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) Provinsi Kalimantan Timur			
No	Komoditi	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	Karet	2249	808
2	Kelapa sawit	200	187.227
J u m l a h		2.449	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007

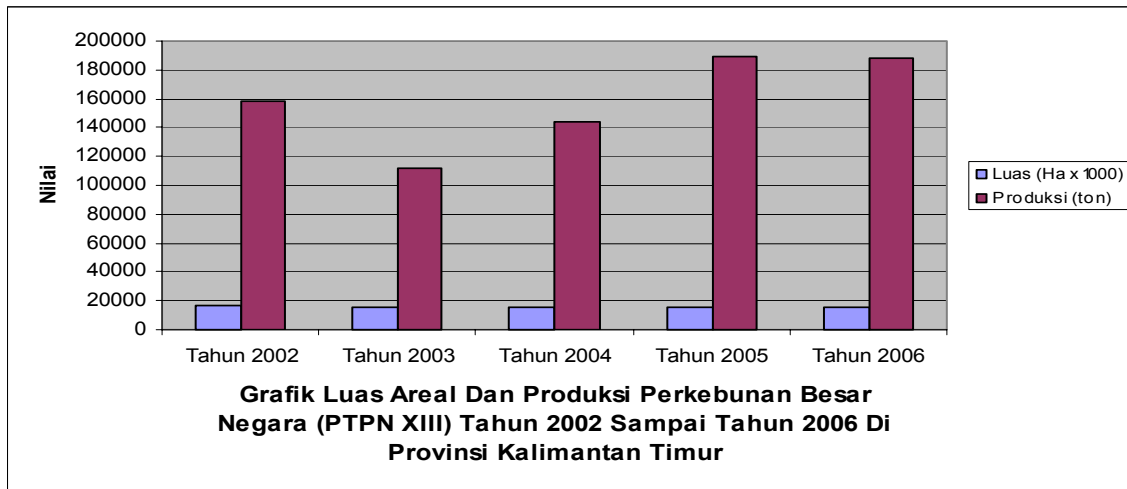


5.2.10.2. Luas Areal dan Produksi

Tabel 57. Luas Areal Perkebunan Besar Negara dan Produksi di Kalimantan Timur Tahun 2002 – 2006

No	Tahun	Luas (Ha x 1000)	Produksi (ton)
1	2002	17.261	158.868
2	2003	15.800	112.168
3	2004	15.800	143.690
4	2005	15.800	188.927
5	2006	15.800	188.035
Jumlah		80.461	

Sumber : Dinas Perkebunan Kalimantan Timur 2007



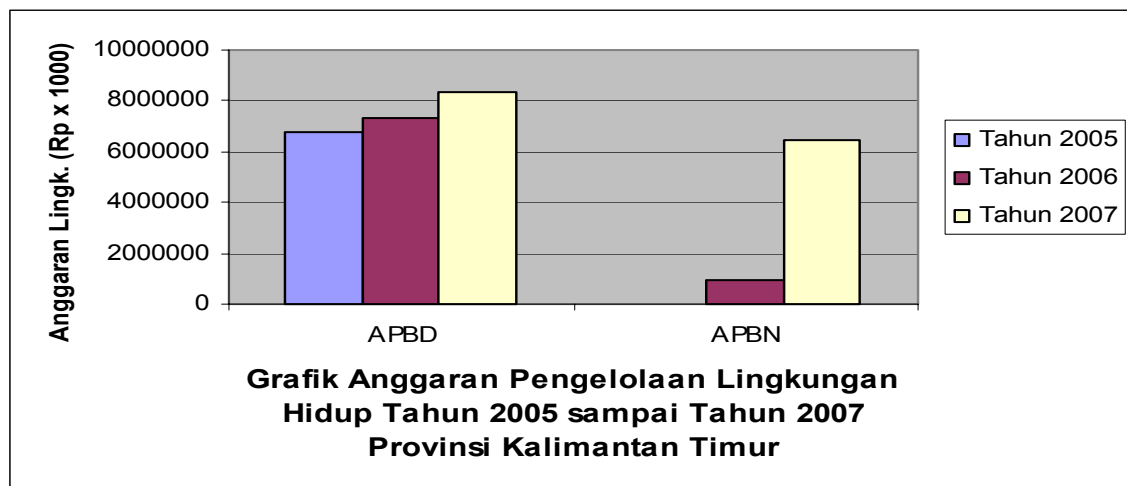
5.2.11. Pengelolaan Lingkungan Hidup

5.2.11.1. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari APBD dan APBN

Tabel 58. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2005 - 2007

Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup			
No	Tahun	APBD	APBN
1	2005	6.805.645	-
2	2006	7.316.796	960.000
3	2007	8.378.655	6.446.000

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim 2007

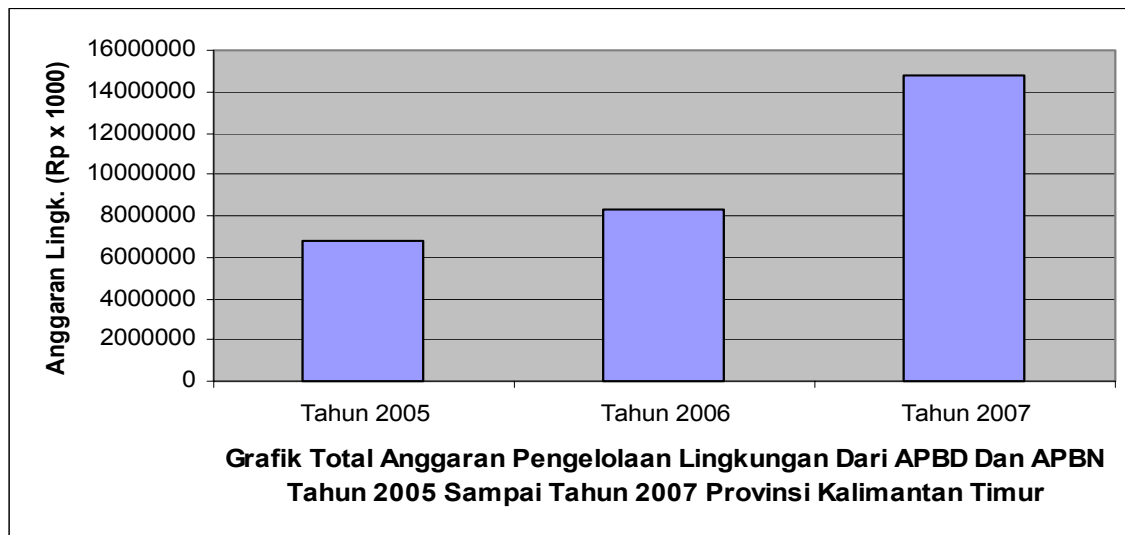


5.2.11.2. Total Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Dari APBD dan APBN

Tabel 59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2005 - 2007

No	Tahun	Anggaran Lingkungan Total
1	Tahun 2005	6.805.645
2	Tahun 2006	8.276.796
3	Tahun 2007	14.824.655

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim 2007



5.2.11.3. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Diterima 13 Kabupaten/kota

Tabel 60. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2007 Yang Diterima 13 Kabupaten/Kota (x 1.000)

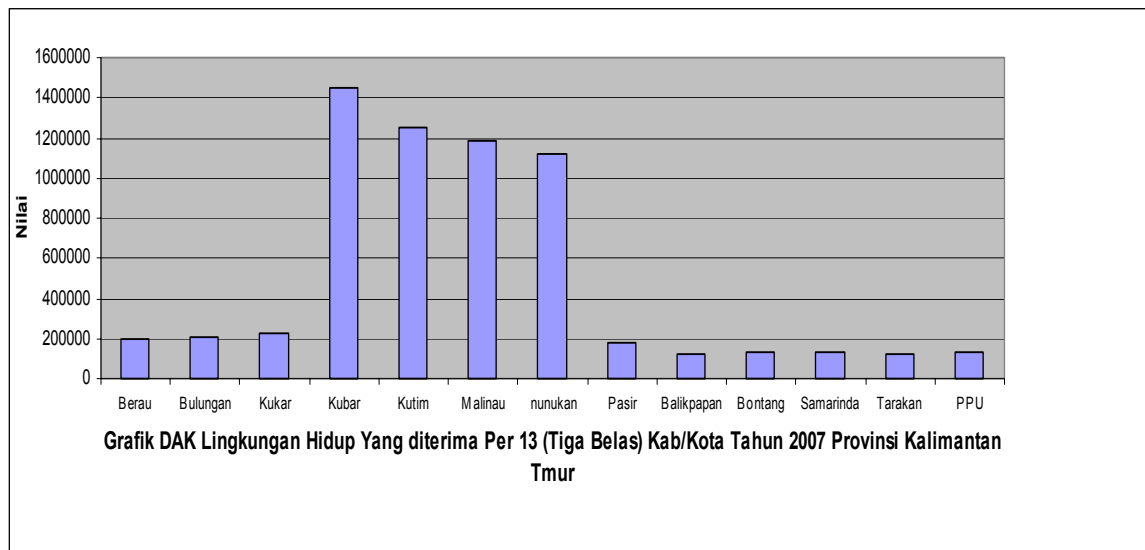
No	Kab/Kota	Tahun 2007
1	Berau	198.000
2	Bulungan	205.000
3	Kukar	222.000
4	Kubar	1.451.000
5	Kutim	1.252.000
6	Malinau	1.189.000

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 60. Lanjutan

No	Kab/Kota	Tahun 2007
7	Nunukan	1.118.000
8	Pasir	178.000
9	Balikpapan	124.000
10	Bontang	128.000
11	Samarinda	132.000
12	Tarakan	120.000
13	PPU	129.000
Jumlah		6.446.000

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim

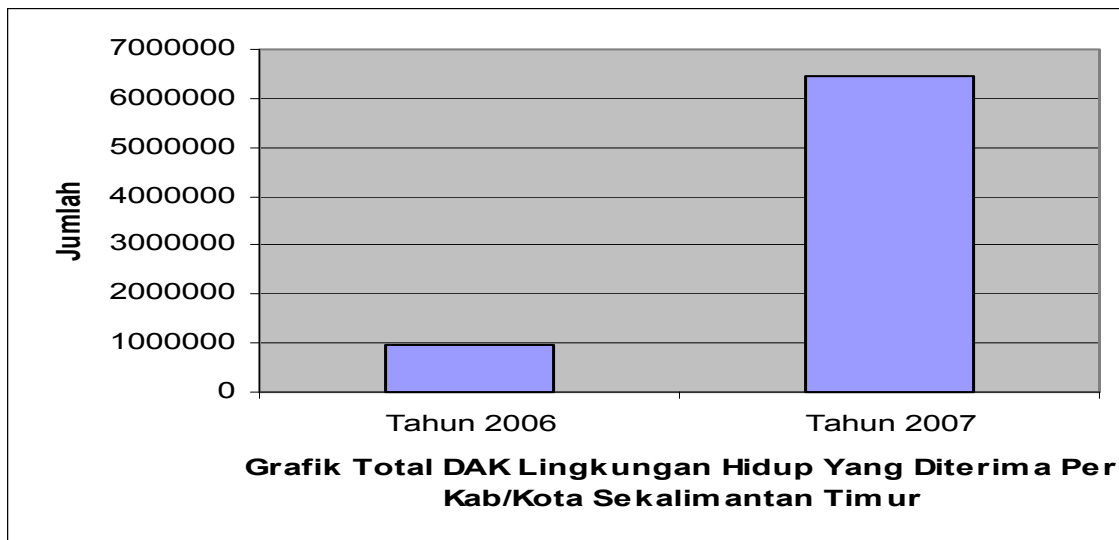


5.2.11.4. DAK Lingkungan Hidup

Tabel 61. DAK Lingkungan Hidup Tahun 2006 - 2007 Yang Diterima 13 Kabupaten/ Kota

Dak Lingkungan Hidup yang Diterima Per Kab/Kota Se-Kalimantan Timur			
No		Tahun 2006	Tahun 2007
1	Kaltim	960000	6446000

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007



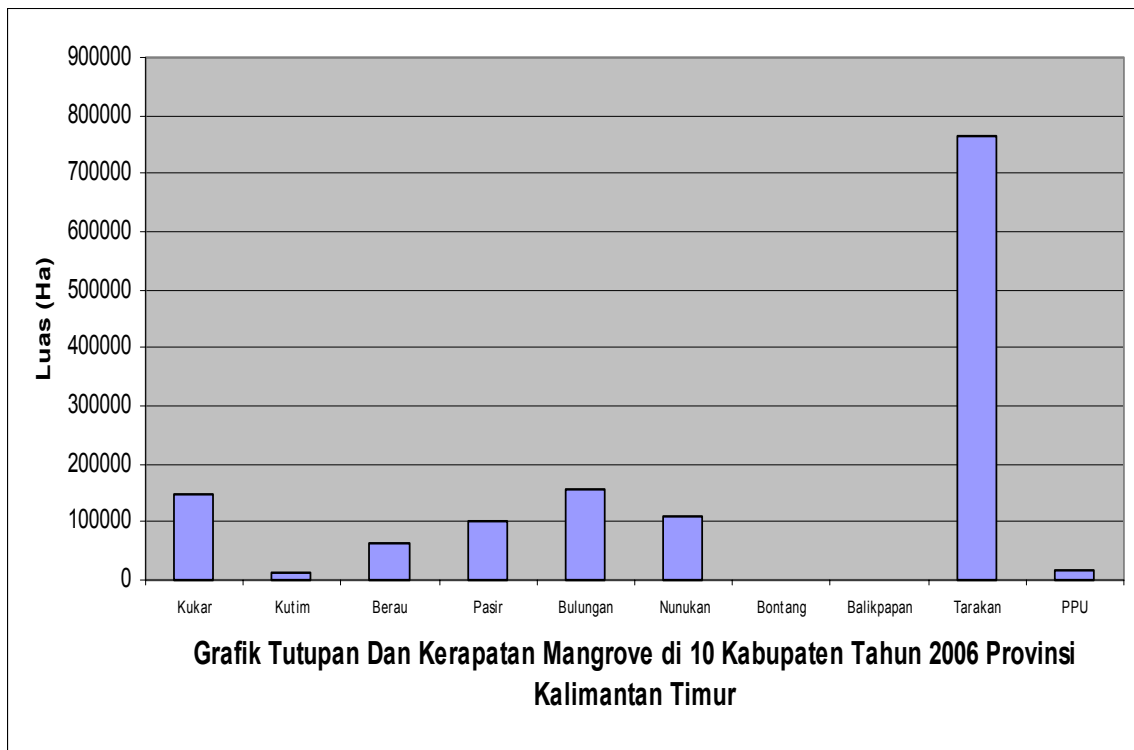
5.3. Mangrove

5.3.1. Luas Tutupan Mangrove

Tabel 62. Luas Tutupan Mangrove Pada 10 Kabupaten/Kota Tahun 2006

No	L o k a s i	luas (Ha)
1	Kutai Kartanegara	150.000
2	Kutai Timur	11.754
3	Berau	64.386
4	Pasir	100.000
5	Bulungan	157.722
6	Nunukan	111.927
7	Bontang	600
8	Balikpapan	2.020
9	Tarakan	766.601
10	Penajam Pasir Utara	15.3.44
J u m l a h		1.380.354,03

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007

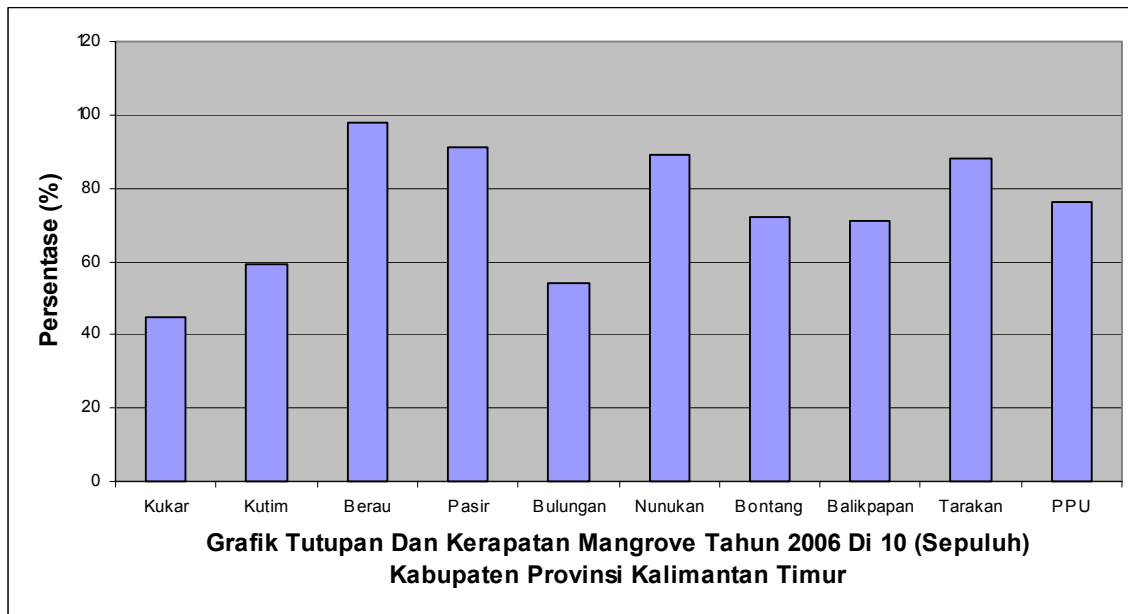


5.3.2. Kerapatan Mangrove

Tabel 63. Kerapatan Mangrove Pada 10 Kabupaten/Kota Tahun 2006

No	Lokasi	Persentase (%)
1	Kutai Kartanegara	45
2	Kutai Timur	59
3	Berau	98
4	Pasir	91
5	Bulungan	54

Sumber : Bapedalda Provinsi Kaltim, 2007



Tabel 64. Luas Hutan Mangrove Dan Luas Tambak Pada Kabupaten/Kota Di Kalimantan Timur

Kab./Kota	Luas Hutan Mangrove (ha)			Luas Tambak (ha)		
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Paser	101.634	100.000	100.000	8.571	10.205	10.205
Kutai Barat	0	0	0	0	0	0
Kutai Kartanegara	50.000	50.000	45.000	85.000	85.000	90.000
Kutai Timur	11.754	11.754	11.754	350	350	350
Berau	21.108	21.000	21.000	590	670	670
Malinau	0	0	0	0	0	0
Bulungan	45.579,62	45.473,88	44.812,88	50.760	61.344	127.434
Nunukan	111.927	111.927	111.927	*	*	*
PPU	72.800	72.800	67.800	0	0	5000
Balikpapan	2.020	2.020	2.020	813	813	813
Samarinda	0	0	0	0	0	0
Tarakan	170	170	85	750	750	835
Bontang	600	600	600	450	450	450
J u m l a h	417.592,62	415.744,88	404.988,88	147.284	159.572	235.757

Sumber : Bapedalda Prop. Kaltim 2006

Keterangan : * belum didata

Status :

1. Luas hutan mangrove cenderung menciut.
2. Kualitas dan kuantitas vegetasi kawasan mangrove cenderung merosot.
3. Luas tambak pada kawasan mangrove cenderung meningkat/bertambah luas.
4. Produktivitas tambak yang dibuat kawasan hutan mangrove setelah 2-3 tahun mengalami kemerosotan.
5. Banyak tambak di kawasan mangrove yang dibiarkan/terlantar Tambak yang dilerantarkan berpotensi menjadi gundul permanen.

Pressure :

1. Pembukaan tambak yang tidak ramah lingkungan.
2. Pemanfaatan kayu pada kawasan mangrove.
3. Penguasaan kawasan mangrove oleh masyarakat/pengusaha tambak.

Impact :

1. Kerusakan vegetasi mangrove.
2. Kerusakan tempat bertelur dan berkembangnya ikan.
3. Terjadi erosi dan sedimentasi.

Respons :

1. Reboasasi pada kawasan mangrove tidak seimbang laju deforestasi mangrove.
2. Pembinaan tambak lestari belum dilakukan dengan intensif.

BAB VI. KEANEKARAGAMAN HAYATI

Tabel 65. Keaneekaragaman Jenis Tumbuhan Tahun 2004 dan 2006

No	Keaneekaragaman jenis	Variabel tahun 2004	Variabel tahun 2006	Kecenderungan perubahan
		Volume (Jenis)	Volume (Jenis)	
1.	Luas pesisir & Pantai yang dilindungi	33.500 ha	#	
2.	Luas lahan basah	138.000 ha	#	
3.	Jumlah Species Alga	4	#	
4.	Jumlah Species Jamur	7	#	
5.	Jumlah Species Bunga	10	#	
6.	Jumlah Species tanaman merambat	10	3	Turun 70%
7.	Jumlah Species Pohon	#	4	
8.	Jumlah Species Reptil	3	9	Naik 200%
9.	Jumlah Species Amphibi	48	#	
10.	Jumlah Species Aves	#	17	
11.	Jumlah Species Mamalia	18	20	Naik 11.11%
12.	Jumlah Species Kupu-kupu	5	#	
13.	Jumlah Species Ikan Air Tawar	#	#	
14.	Jumlah Bivalvia	#	3	
15.	Jumlah Anthozoa	#	1	

Sumber : Balai konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kaltim, 2006

Keterangan : # = Data belum lengkap

Status :

- 1). Jumlah species tanaman merambat tahun 2006 (3 jenis) terhadap tahun 2004 (10 jenis) menurun sebesar 70%.
- 2). Jumlah species Reptil tahun 2006 (9 jenis) terhadap tahun 2004 (3 jenis) naik sebesar 200%.
- 3). Jumlah species mamalia tahun 2006 (20 jenis) terhadap tahun 2004 (18 jenis) naik sebesar 11.11%.

Pressure :

- 1) Invasi masyarakat/gangguan aktivitas masyarakat (eksploitasi).
- 2). Bencana alam (kebakaran hutan, erosi, longsor dan banjir).

Impact :

- 1). Terganggunya keanekaragaman flora dan fauna yang dikonservasi.
- 2). Menurunnya fungsi konservasi terhadap sumberdaya kehidupan.
- 3). Menurunnya estetika lingkungan.

Respons :

- 1). Pembuatan peraturan tentang konservasi keanekaragaman hayati belum mampu mengendalikan merosotnya keanekaragaman hayati.
- 2). Rehabilitasi kawasan konservasi dengan replanting dan pengkayaan. Kegiatan ini akan sedikit demi sedikit mampu merestorasi lingkungan hidup.

Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 66. Sebaran Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur Tahun 2005

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN KONSERVASI DARATAN													
		Cagar Alam		Suaka Margasatwa		Taman Wisata Alam		Taman Buru		Taman Nasional		Taman Hutan Raya		Jumlah Total	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	Pasir	2	100.700	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2	100.700
2	Kutai Barat	1	5.000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	1	5.000
3	Kutai Kartanegara	1	62.500	=	=	1	64.850	=	=	=	=	1	61.850	3	189.200
4	Berau	=	=	1	220	1	280	=	=	=	=	=	=	2	500
5	Malinau	=	=	=	=	=	=	=	=	1	1.360.500	=	=	1	1.360.500
6	Kutai Timur	=	=	=	=	=	=	=	=	1	198.629	=	=	1	198.629
Jumlah/Total		4	168.200	1	220	2	65.130	0	0	2	1.559.129	1	61.850	10	1.854.529

Sumber : Balai konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kaltim, 2005

Tabel 67. Sebaran Kawasan Konservasi di Kalimantan Timur Tahun 2006

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	KAWASAN KONSERVASI DARATAN													
		Cagar Alam		Suaka Margasatwa		Taman Wisata Alam		Taman Buru		Taman Nasional		Taman Hutan Raya		Jumlah Total	
		Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)	Unit	Luas (Ha)
1	Pasir	2	100.700	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2	100.700
2	Kutai Barat	1	5.000	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	2	5.000
3	Kutai Kartanegara	1	62.500	=	=	=	=	=	=	=	=	1	61.850	1	124.350
4	Berau	=	=	1	220	1	280	=	=	=	=	=	=	1	500
5	Malinau	=	=	=	=	=	=	=	=	1	1.360.500	=	=	2	1.360.500
6	Kutai Timur	=	=	=	=	=	=	=	=	1	198.629	=	=	1	198.629
Jumlah/Total		4	168.200	1	220	2	62.130	0	0	2	1.559.129	1	61.850	9	1.789.679

Sumber : Balai konservasi Sumberdaya Alam Provinsi Kaltim, 2006

Status :

- 1). Kawasan konservasi pada tahun 2006 berkurang 1 unit yakni Taman Wisata Alam seluas 64.850 ha.
- 2). Luas kawasan konservasi pada tahun 2006 menciut sebesar 64.850 ha.

Pressure :

- 1). Kebijakan pemerintah daerah.
- 2). Okupasi masyarakat.

Impact :

- 1). Menurunnya luas kawasan hutan.
- 2). Menurunnya kawasan dikonservasi.
- 3). Menurunnya fungsi konservasi terhadap sumberdaya kehidupan.
- 4). Menurunnya estetika lingkungan.

Respons :

- 1). Pembuatan peraturan kawasan konservasi belum mampu mengendalikan merosotnya sumberdaya pada kawasan konservasi.
- 2). Rehabilitasi kawasan konservasi dengan replanting dan pengkayaan. Kegiatan ini akan sedikit demi sedikit mampu merestorasi lingkungan hidup.

BAB VII. PESISIR DAN LAUT

Tabel 68. Kualitas Air Laut di Kota Tarakan Bulan Agustus 2006

No	Papameter	Satuan	Lokasi	
			30 Agustus 2006	Baku Mutu Air Laut Kepmen 51 Tahun 2004
FISIKA				
1	Kecerahan	m	50	>3
2	Kebauan		Tidak berbau	tidak berbau
3	Padatan tersuspensi total	mg/L	34	80
4	Sampah	-	-	nihil
5	Suhu	°C	29	nihil
6	Lapisan minyak	-	-	nihil
KIMIA				
1	pH	-	7	6.5-8.5
2	Salinitas	%	24.5	-
3	Amonia total (NH ₃ -N)	mg/L	0.49	0.3
4	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0.005	0.03
5	Hidrokarbon total	mg/L	-	1
6	Senyawa fenol total	mg/L	0.006	0.002
7	PCB (.....)	mg/L	-	0.01
8	Surfaktan (deterjen)	mg/L MBAS	-	1
9	Minyak dan lemak	mg/L	0.059	5
10	TBT (Tri Butil Tin)	mg/L	-	0.01
LOGAM TERLARUT				
11	Raksa (Hg)	mg/L	0.0002	0.003
12	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0.0001	0.01
13	Tembaga (Cu)	mg/L	< 0.003	0.05
14	Timbal (Pb)	mg/L	0.156	0.05
15	Seng (Zn)	mg/L	0.6118	0.01
BIOLOGI				
1	Coliform (total)	MPN/100ml	280	1000

Sumber : Dinas LH Kab. Tarakan, 2006

Tabel 69. Kualitas Air Laut di Kota Balikpapan Tahun 2005 dan 2006

No	Papameter	Satuan	Lokasi		Baku Mutu Air Laut Kepmen 51 Thn 2004
			9 Agustus 2005	23 Agustus 2006	
FISIKA					
1	Kecerahan	m	52.8	65	>3
2	Kebauan		Tidak berbau	Tidak berbau	tidak berbau
3	Padatan tersuspensi total	mg/L	44	42	80
4	Sampah	-	-	-	nihil
5	Suhu	°C	30.2	31	nihil
6	Lapisan minyak	-	-	-	nihil
KIMIA					
1	pH	-	7.6	8	6.5-8.5
2	Salinitas	%	32.0	-	-
3	Amonia total (NH3-N)	mg/L	0.007	0.01	0.3
4	Sulfida (H2S)	mg/L	-	0.004	0.03
5	Hidrokarbon total	mg/L	-	0.004	1
6	Senyawa fenol total	mg/L	0.005	-	0.002
7	PCB (.....)	mg/L	-	-	0.01
8	Surfaktan (deterjen)	mg/L MBAS	-	0.037	1
9	Minyak dan lemak	mg/L	0.052	-	5
10	TBT (Tri Butil Tin)	mg/L	-	-	0.01
LOGAM TERLARUT					
11	Raksa (Hg)	mg/L	0.0002	0.0001	0.003
12	Kadmium (Cd)	mg/L	0.0161	< 0.0001	0.01
13	Tembaga (Cu)	mg/L	0.4053	0.0813	0.05
14	Timbal (Pb)	mg/L	0.5961	< 0.002	0.05
15	Seng (Zn)	mg/L	0.4058	0.1472	0.01
BIOLOGI					
1	Coliform (total)	MPN/100ml	1600	2	1000

Sumber : Bapedalda Kota Balikpapan, 2006

Tabel 70. Kualitas Air Laut di Kabupaten Berau Tahun 2006

No	Papameter	Satuan	Lokasi	Baku Mutu Air Laut
			25 Juni 2006	Kepmen 51 Tahun 2004
FISIKA				
1	Kecerahan	m	42	>3
2	Kebauan		Tidak berbau	tidak berbau
3	Padatan tersuspensi total	mg/L	30	80
4	Sampah	-	-	nihil
5	Suhu	°C	30.2	nihil
6	Lapisan minyak	-	-	nihil
KIMIA				
1	pH	-	7.5	6.5-8.5
2	Salinitas	%	20.3	-
3	Amonia total (NH ₃ -N)	mg/L	0.002	0.3
4	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	-	0.03
5	Hidrokarbon total	mg/L	-	1
6	Senyawa fenol total	mg/L	0.005	0.002
7	PCB (.....)	mg/L	-	0.01
8	Surfaktan (deterjen)	mg/L MBAS	-	1
9	Minyak dan lemak	mg/L	0.04	5
10	TBT (Tri Butil Tin)	mg/L	-	0.01
LOGAM TERLARUT				
11	Raksa (Hg)	mg/L	0.0003	0.003
12	Kadmium (Cd)	mg/L	< 0.0001	0.01
13	Tembaga (Cu)	mg/L	-	0.05
14	Timbal (Pb)	mg/L	-	0.05
15	Seng (Zn)	mg/L	-	0.01
BIOLOGI				
1	Coliform (total)	MPN/100ml	-	1000

Sumber : Bapedalda Kab. Berau, 2006

Status :

A. Tarakan

- 1). Kualitas air laut kota Tarakan dari parameter fisik dibawah ambang baku mutu air laut (* KEPMEN 51, Tahun 2004)
- 2). Parameter kimia Amonia Total 0.49 mg/L > baku mutu air laut* 0.3 mg/L
- 3). Parameter kimia senyawa fenol 0.006 mg/L > baku mutu air laut* 0.002 mg/L
- 4). Parameter logam berat Timbal (Pb) 0.156 mg/L > baku mutu air laut* 0.05 mg/L
- 5). Parameter logam berat Seng (Zn) 0.6118 > baku mutu air laut* 0.1 mg/L

B. Balikpapan

- 1). Kualitas air laut kota Balikpapan tahun 2005 dari parameter fisik dibawah ambang baku mutu air laut (* KEPMEN 51, Tahun 2004)
- 2). Parameter senyawa fenol total, 0.005 mg/L > baku mutu air laut*
- 3). Parameter Tembaga (Cu), 0.4053 mg/L > baku mutu air laut*
- 4). Parameter Timbal (Pb), 0.5961 mg/L > baku mutu air laut*
- 5). Parameter Seng (Zn), 0.4058 mg/L > baku mutu air laut*
- 6). Parameter Coliform, total 1600 MPN/100 ml > baku mutu air laut*
- 7). Kualitas air laut kota Balikpapan tahun 2006 dari parameter fisik dibawah ambang baku mutu air laut (* KEPMEN 51, Tahun 2004)
- 8). Parameter Tembaga (Cu), 0.0813 mg /L > baku mutu air laut*
- 9). Parameter Seng (Zn), 0.1472 mg /L > baku mutu air laut*

C. Berau

- 1). Kualitas air laut kota Tarakan dari parameter fisik dibawah ambang baku mutu air laut (* KEPMEN 51, Tahun 2004)
- 2). Parameter kimia senyawa fenol 0.005 mg/L > baku mutu air laut* 0.002 mg/L

Pressure :

A. Kualitas air laut

- 1). Kegiatan transportasi air (Kapal laut, tanker, tug bot + ponton, LCT)
- 2). Erosi dari daratan
- 3). Limbah domestik

B. Hutan mangrove

- 1). Perluasan dan pembuatan tambak, empang
- 2). Pembangunan sarana infrastruktur
- 3). Pemanfaatan kayu mangrove untuk kegiatan ekonomi (kayu bakar, bahan bangunan).

Impact :

A. Kualitas air laut :

- 1). Mengganggu pertumbuhan dan perkembangan plankton.
- 2). Dapat menimbulkan gangguan kesehatan kepada manusia yang mengkonsumsi ikan dari perairan yang tercemar logam berat (kasus itai-itai di Jepang).

B. Hutan mangrove :

- 1). Menurunnya kemampuan penyaring/filter masuknya pencemaran logam berat ke laut.
- 2). Menurunkan produksi ikan, melalui hilangnya tempat-tempat pemijahan ikan.
- 3). Hilangnya bumper/penahan hempasan gelombang besar dari laut yang dapat menimbulkan abrasi.

Respons :

- 1). Pemantauan kualitas air laut secara berkala. Kegiatan ini baik untuk merestorasi lingkungan melalui informasi tentang kondisi terbaru dari kualitas air laut, sehingga dapat diambil tindakan penanganan. Perlu kelembagaan yang jelas dan anggaran bagi pelaksana pemantauan
- 2). Rehabilitasi hutan mangrove. Kegiatan ini baik untuk merestorasi lingkungan, perlu dikembangkan dengan memperkuat kapasitas masyarakat.

BAB VIII

AGENDA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.1. Isu Lingkungan Hidup Utama : Deforestasi lahan dan hutan

8.1.1. Sektor Kehutanan (degradasi vegetasi)

Tujuan : Untuk menghentikan penebangan vegetasi hutan yang masih ada, dan untuk memberi kesempatan pada hutan untuk suksesi dan pemulihan

Rekomendasi :

1. Mengeluarkan kebijakan moratorium penebangan kayu terbatas (10-20 tahun) pada Kabupaten yang hutannya mengalami kerusakan berat
2. Revitalisasi pengelolaan hutan lestari kepada perusahaan HPH (IUPHHK) dan HTI pada Kabupaten yang masih mempunyai hutan produksi yang ekonomis (Tanam Dulu Tebang Kemudian) .
3. Membuat sanksi yang dapat menghasilkan efek jera bagi Pembalak dan *illegal logging* (Sita habis)
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan (Informan).
5. Memperluas TUPOKSI Dinas perkebunan, Dinas Pertanian, Bapedalda dalam hal pencegahan, mitigasi, mengendalikan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (UPTD) .
6. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas kelembagaan pada dinas/kantor yang terkait dengan penanganan lahan kritis (SDM, Dana dan Alat).
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan lahan kritis (padat karya).
8. Orientasi pengembangan perkebunan pada lahan-lahan bukan kawasan hutan (Perkebunan rakyat).

8.1.2. Sektor Pertambangan batubara

Tujuan : Untuk meningkatkan keberhasilan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang batubara

Rekomendasi :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menaikkan jumlah luas lahan bekas tambang yang direklamasi dan direvegetasi (Pengembangan sistem Penginderaan Jarak Jauh)
2. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada ijin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Penghargaan "Tambang Sejati")
3. Mengurangi jumlah ijin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota (kuota ijin)
4. Sanksi bagi perusahaan batubara yang memperoleh penilaian proper buruk (Stop operasi terbatas)

8.1.3. Sektor Perkebunan

Tujuan : Untuk mengurangi penggantian vegetasi hutan pada kawasan hutan dengan tanaman perkebunan secara besar-besaran

Rekomendasi :

1. Mengutamakan pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat (Kebun desa, kebun kecamatan)

8.2. A i r

8.2.1. Air Sungai Mahakam

Tujuan : Untuk menjaga kualitas air sungai Mahakam sebagai air bahan baku air bersih PDAM

Rekomendasi :

• **Sektor Kehutanan**

- 1). Evaluasi, pengurangan dan penghentian Kebijakan IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu) oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2). Operasi terhadap Pembalakan dan *illegal logging* perlu ditingkatkan, sanksi yang diterapkan harus lebih keras sehingga menimbulkan efek jera
- 3). Pembinaan terhadap teknologi budidaya masyarakat sekitar hutan dengan teknologi "kesejahteraan" yang berbasis pada sumberdaya dapat pulih (*renewable*)

• **Sektor Pertambangan Batubara**

- 1). Program pembinaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan nama Proper oleh Pemda Provinsi Kaltim perlu diberlakukan sanksi atau tindakan pembinaan hukum bagi perusahaan yang propernya buruk.
- 2). Program evaluasi reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang perlu dikembangkan sampai pada pemberian penghargaan dan atau sanksi (*insentive* dan *disinsentive*).

• **Sektor Perkebunan**

- 1). Pembinaan dan pengawasan pada sistem pembukaan lahan (*land clearing*) yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan agar tidak terjadi erosi.
- 2). Membuat rekomendasi atau peraturan daerah (perda) tentang pembuatan hutan konservasi pada perkebunan besar baik swasta maupun negara

8.2.2. Air Bersih

Tujuan : Menjaga dan mempertahankan tersedianya sumber air untuk sumber air minum dengan kondisi yang memenuhi dsyarat secara fisik, kimia dan bakteri.

Rekomendasi :

1. Sosialisasi tentang pengelolaan air bersih
2. Program pemindahan jamban sungai menjadi jamban *septik tank*

3. Pemantauan kualitas air sungai yang digunakan masyarakat sebagai air bersih secara terjadwal
4. Pemantauan perkembangan penyakit yang disebabkan oleh penggunaan air (diare, penyakit kulit, dll)

8.3. Udara

8.3.1. Kualitas Udara Ambien

Tujuan : Menjaga dan mempertahankan kualitas udara yang baik

Rekomendasi :

1. Pengawasan ketaatan pelaksanaan pemantauan kualitas udara oleh industri
2. Konsisten melakukan pemantauan kualitas udara pada titik pemantauan yang telah dilakukan
3. Instrumentasi peralatan informasi tentang kualitas udara
4. Melakukan gerakan-gerakan penanaman pohon diperkotaan dan di ibukota kecamatan
5. Memperbanyak hutan kota
6. Melakukan uji petik dan pembinaan (instansi terkait) pada industri dan kendaraan yang polutif.
7. Sosialisasi tentang pemanfaatan sampah (organik dan an-organik) untuk mengurangi pembakaran

8.3.2. Emisi Gas Buang (Sumber : Tidak bergerak)

Tujuan : Menjaga dan mempertahankan sistem pengelolaan emis gas buang yang sudah baik

Rekomendasi :

1. Pengawasan ketaatan pelaksanaan pemantauan kualitas udara oleh industri
2. Konsisten melakukan pemantauan kualitas udara pada titik pemantauan yang telah dilakukan

3. Instrumentasi peralatan informasi tentang kualitas udara
4. Melakukan gerakan-gerakan penanaman pohon diperkotaan dan di ibukota kecamatan
5. Memperbanyak hutan kota
6. Melakukan uji petik dan pembinaan (instansi terkait) pada industri yang polutif.

8.3.3. Emisi Gas Buang (Sumber : Bergerak)

Tujuan : Mengurangi pencemaran udara perkotaan dari pencemaran udara oleh kendaraan bermotor

Rekomendasi :

1. Membuat gerakan-gerakan hari tanpa kendaraan bermotor
2. Konsisten melakukan pemantauan kualitas udara pada titik pentaatan yang telah dilakukan
3. Instrumentasi peralatan informasi tentang kualitas udara
4. Melakukan gerakan-gerakan penanaman pohon diperkotaan dan di ibukota kecamatan
5. Memperbanyak hutan kota
6. Melakukan uji petik dan pembinaan (instansi terkait) pada kendaraan yang polutif.

8.4. Lahan dan Hutan

8.4.1. Lahan

Tujuan : Mencegah berkurangnya luas lahan kebun, ladang, bantaran sungai, hutan desa, hutan kota, rawa, dan *landscape* untuk pemukiman

Rekomendasi :

1. Penyusunan rencana detail pemanfaatan ruang untuk pemukiman dan perumahan (Sistem cluster terpisah)
2. Menata kawasan bantaran sungai, rawa, *landscape* untuk bebas dari perumahan (Kawasan lestari)
3. Menata kawasan perumahan kumuh (Perumahan asri).

4. Mengembangkan orientasi pengembangan perumahan massal dengan dimensi vertikal (Rumah susun, apartement, dll)

8.4.2. Hutan

Tujuan : Mengurangi dan mencegah degradasi kawasan dan sumberdaya hutan

Rekomendasi :

1. Mengutamakan pembangunan dan pengembangan perkebunan rakyat (Kebun desa, kebun kecamatan)
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pencegahan pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran hutan (Informan).
3. Memperluas TUPOKSI Dinas perkebunan, Dinas Pertanian, Bapedalda dalam hal pencegahan, mitigasi, mengendalikan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (UPTD) .
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan – rehabilitasi - lahan kritis (padat karya)
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam menaikkan jumlah luas lahan bekas tambang yang direklamasi dan direvegetasi (Pengembangan sistem Penginderaan Jarak Jauh)
6. Melakukan evaluasi terhadap keberhasilan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang pada ijin kuasa pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Penghargaan "Tambang Sejati")
7. Membangun sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan bersama masyarakat.

8.4.3. Reboisasi dan Penghijauan

- Tujuan :**
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas vegetasi hutan dan lahan
 2. Mencegah bertambahnya luas lahan kritis
 3. Merehabilitasi lahan kritis

Rekomendasi :

1. Melakukan pendampingan kegiatan pemerintah pusat dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan (Pendampingan)
2. Memfasilitasi pembangunan pembibitan tanaman reboisasi dan penghijauan di tingkat kecamatan yang mempunyai lahan kritis (Kebun Kalpataru)
3. Melakukan gerakan penanaman pohon besar-besaran (TaHaN = Tiap Hari Tanam Pohon)
4. Melakukan pembinaan bagi peladang berpindah (Agroforestry)
5. Mengembangkan sumber-sumber perekonomian baru di luar hutan dan pertanian (Jasa)

8.5. Keanekaragaman Hayati

Tujuan : Mencegah menurunnya keanekaragaman hayati

Rekomendasi :

1. Melakukan kegiatan pengayaan jenis (Penangkaran)
2. Memfasilitasi pendirian kebun/taman koleksi keanekaragaman hayati
3. Mengembangkan wisata kebun/taman keanekaragaman hayati
5. Sosialisasi tentang keanekaragaman hayati kepada pelajar SLTA, SLTP, SD dan TK/TKA serta Taman Bermain
6. Sosialisasi tentang sistem produksi (kepada peladang, nelayan, dll) yang ramah lingkungan

8.6. Pesisir dan Laut

- **Mangrove**

Tujuan :

1. Mencegah meluasnya kerusakan dan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak dan kegiatan lain (eksploitasi kayu bakau)
2. Memperbaiki kerusakan kawasan hutan mangrove

Rekomendasi :

1. Pembinaan pembuatan tambak berwawasan lingkungan.
2. Rehabilitasi kawasan hutan mangrove.
3. Reboisasi kawasan hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2006. Sensus Ekonomi 2006. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. 2006. Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Bappeda Provinsi Kaltim. 2006. Profil Pembangunan Kalimantan Timur. Bappeda Provinsi Kaltim. Samarinda. 195 h.
- Bapedalda Provinsi Kaltim. 2006. Profil Lingkungan Hidup Kalimantan Timur. Bapedalda Provinsi Kaltim. Samarinda. 115 hal.
- Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur. 2007. Daftar Kuasa Pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur. Samarinda.
- Hormansyah. 2007. Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Lingkungan Unmul. Samarinda. 108 h.